

JURNAL SOSIOLOGI USK

Media Pemikiran dan Aplikasi

Vol. 3, No. 3, Juni 2013

JURNAL SOSIOLOGI
Media Pemikiran dan Aplikasi



Menuju Kemandirian Petani
Dr. Hempri Suyatna

Mendamaikan Aktor dan Struktur dalam Analisis Sosial Perspektif
Teori Strukturasi Antony Giddens
Dr. Nirzalin, M.Si

Dialektika Wali Nanggroe: Perjuangan Dan Perdamaian Aceh
Dr. Muhammad Nazaruddin

Perbedaan Perilaku Petani dalam Mewujudkan Ketahanan
Pangan Rumah Tangga di Lahan Basah dan Lahan Kering,
Daerah Istimewa Yogyakarta
S. Djuni Prihatin, Sunarru Samsi Hariadi dan Mudiyono

Paradigma Pembangunan Pertanian: Pertanian Berkelanjutan
Berkas Petani Dalam Perspektif Sosiologis
Mahmuddin, M.Si

Pemberdayaan Sosial Ekonomi Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan
Dr. Ishak Hasan, M.Si

Jurnal Sosiologi USK adalah Jurnal Prodi Sosiologi fakultas ilmu Sosial dan Ilmu politik yang memuat berbagai pendekatan sosial yang berlandaskan pada berbagai isu-isu sosial kemasyarakatan secara lokal, nasional maupun internasional melalui karya tulis ilmiah. Untuk kemajuan Jurnal ini Redaksi mengundang dan mengharapkan partisipasi para intelektual agar dapat menyumbangkan tulisannya ke email: sociologyusk@yahoo.co.id, Jurnal terbit dua edisi dalam setahun (Juni dan Desember).



ISSN: 2252-5254



Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala
Banda Aceh

Jurnal Sosiologi
Media Pemikiran Dan Aplikasi
Universitas Syiah Kuala

Volume 3, Nomor 3, Juni 2013

Pengarah

Dr. Syarifuddin Hasyim, SH., M.Hum., Dr. Alamsyah Taher, M.Si
Dr. Ishak Hasan, M.Si., Drs. Zainal Abidin AW, SH., M.Si
Dr. Muhammad Saleh, Sjafei, SH., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Bukhari, M.HSc

Sekretaris Redaksi

Masrizal, MA

Dewan Redaksi

Prof. Bahrein T. Sugihen. Prof. Dr. Abidin Hasyim, M.Sc,
Drs. Zulfan, M.Si, Dr. Nurhayati, M.Si, Khairulyadi, M.HSc

Mitra Bestari

Prof. Heru Nugroho (Universitas Gadjah Mada)
Dr. Nirzalin (Universitas Malikul Saleh)
Mahmuddin, M.Si (IAIN Ar-Raniry)
T. Syarifuddin, M.Si (Universitas Iskandarmuda)

Sekretariat Pelaksana

Drs. Ibnu Jasad, Cut Herlina, SE, Purlina, SE

Sirkulasi

Rahmatillah, Supardi, A.Md.

Alamat Redaksi

Prodi Ilmu Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)-Universitas Syiah Kuala
Jln. Tgk. Tanoh Abee, Darussalam Banda Aceh
Telp. (0651) 7555267, Fax (0651) 7555270
E-mail: Sosiologyusk@yahoo.co.id

Jurnal Sosiologi USK

(Media Pemikiran Dan Aplikasi)

Volume 3, Nomor 3, Juni 2013

DAFTAR ISI

Menuju Kemandirian Petani

Hempri Suyatna..... 1

Mendamaikan Aktor dan Struktur dalam Analisis Sosial Perspektif
Teori Strukturasi Antony Giddens

Dr. Nirzalin, M.Si..... 15

Dialektika Wali Nanggroe: Perjuangan Dan Perdamaian Aceh

Dr. Muhammad Nazaruddin..... 25

Perbedaan Perilaku Petani dalam Mewujudkan Ketahanan
Pangan Rumah Tangga di Lahan Basah dan Lahan Kering,
Daerah Istimewa Yogyakarta

S. Djuni Prihatin, Sunarru Samsi Hariadi dan Mudiyono 33

Paradigma Pembangunan Pertanian: Pertanian Berkelanjutan
Berbasis Petani Dalam Perspektif Sosiologis

Mahmuddin. 59

Pemberdayaan Sosial Ekonomi Komunitas Adat Terpencil
(KAT) Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan

Dr. Ishak Hasan, M.Si. 77

Menuju Kemandirian Petani

Oleh :

Hempri Suyatna¹

Abstrak

Dari era pra kolonial hingga era sekarang ini, nasib petani tidak pernah berubah. Mereka masih sekedar menjadi obyek kebijakan dari pemerintah. Mengingat peran strategis pertanian maka revitalisasi kebijakan pertanian perlu dilakukan. Kebijakan pertanian tersebut tidak sekedar berorientasi pada kebijakan kultural akan tetapi juga harus menyentuh aspek struktural. Berbagai kebijakan perlu direvisi agar lebih memberikan iklim yang kondusif bagi berkembangnya sektor pertanian. Melalui revitalisasi kebijakan pertanian tersebut diharapkan petani akan dapat lebih berdaya dan mandiri.

Kata Kunci : Obyek kebijakan politik – revitalisasi kebijakan – kemandirian petani

A. Pengantar

Berbagai strategi dan kebijakan untuk memberdayakan petani sudah banyak dilakukan oleh pemerintah maupun berbagai pihak. Namun hingga saat ini, nasib petani cenderung tidak berubah. Sebagian besar petani masih memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Liberalisasi perdagangan justru memperburuk nasib para petani. Dalam beberapa sektor komoditi pertanian, petani Indonesia justru tidak memiliki kuasa di dalam negeri karena ketergantungan terhadap produk-produk pertanian impor. Terjadinya fluktuasi harga beberapa komoditi pertanian seperti bawang, kedelai, cabai yang terjadi pada awal tahun 2013

1. Dr. Hempri Suyatna adalah Dosen Jurusan Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan Fisipol UGM

ini disebabkan karena ketergantungan Indonesia terhadap produk-produk impor tersebut.

Kondisi di atas tentunya sangat ironis. Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai negara agraris ternyata justru semakin tergantung pada impor. Kekurangan stok produksi di dalam negeri selalu diatasi dengan jalan pintas yaitu dengan melakukan impor dari luar negeri. Akibatnya petani semakin tidak berdaya. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut maka menjadi penting untuk menemukan model ideal bagi upaya mendorong kemandirian petani. Dengan melihat kondisi bahwa ketidakberdayaan petani selain disebabkan karena factor kultural (etos kerja, ketrampilan/teknologi dan inovasi) dan struktural (kebijakan) maka strategi mendorong kemandirian petani harus juga menyentuh kedua aspek tersebut. Kebijakan-kebijakan di sektor pertanian perlu terus didorong agar mampu memberikan iklim yang kondusif bagi berkembangnya sektor pertanian.

B. Nasib Petani : Obyek Kebijakan Politik Dari Era Pra kolonial Hingga Pasca Orde Baru

Dari era pra kolonial hingga sekarang ini, posisi petani masih lemah dan menjadi pihak yang terpinggirkan. Di era pra kolonial, sebagai wujud kesetiaan rakyat terhadap penguasa maka rakyat diwajibkan untuk menyerahkan sebagian hasil pertanian (*glondong pengarem-arem*) kepada rajanya. Raja memberikan kompensasi dengan memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Kebijakan-kebijakan pertanian pada waktu itu juga diarahkan kepada upaya peneguhan dominasi penguasa terhadap rakyatnya.

Di era pemerintahan kolonial, nasib petani juga tidak berubah. Di era VOC, pemerintah menerapkan sistem perekonomian merkantilis. Di era ini, kegiatan ekonomi dari tahapan produksi hingga distribusi hampir semuanya dijalankan oleh pemerintah. Negara selalu berusaha menghambat kelahiran atau kemajuan kelas menengah ekonomi baru apalagi golongan pribumi (Suseno dan Suyatna, 2006 : 2). Setelah era VOC berakhir, kendali kebijakan pemerintah kemudian diteruskan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Gubernur Jendral Daendels yang memerintah pada waktu itu mengembangkan kebijakan konsep tuan tanah. Tanah-tanah dijual kepada tuan tanah dan para tuan tanah ini diberikan hak untuk mengatur/mengorganisir buruh untuk bekerja bagi keuntungan pemerintah Belanda. Ketika pemerintahan beralih ke pemerintahan Inggris, Indonesia diperintah oleh Raffles (1811-1816). Raffles kemudian menerapkan *land rente* (sistem sewa tanah). Adanya sistem sewa tanah ini mengharuskan bahwa semua subyek yang mengambil keuntungan dari tanah harus membayar pajak kepada Pemerintahan Inggris. Pada tahun 1816, pemerintahan Hindia Belanda beralih kembali ke Pemerintah Belanda. Sistem tanam pakda (*culture stelsel*) kemudian diterapkan oleh Van Den Bosch. Sistem ini mengasumsikan bahwa petani di Hindia Belanda berhutang kepada pemerintah. Pajak harus dibayar dengan cara penyediaan 20% dari lahan miliknya untuk ditanami tanaman-tanaman yang laku keras di Eropa

seperti gula, nila, kopi dan cengkeh. Sistem tanam paksa ini telah menimbulkan keuntungan yang luar biasa bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda akan tetapi disisi lain, kondisi petani Indonesia justru mengalami penderitaan. Sistem ini juga tidak memberikan peluang bagi berkembangnya ekonomi rakyat. Dampak buruk dari pelaksanaan sistem tanam paksa ini telah menimbulkan protes di kalangan Pemerintah Hindia Belanda sehingga pada tahun 1870 muncul *Agrarische Wet* dan *Agrarische Besluit*. Undang-Undang ini memberikan jalan bagi pengusaha untuk menginvestasikan modalnya ke sektor industri. Keberadaan Undang-Undang ini telah memberikan kepada kapitalisme modal untuk menyewa tanah rakyat dalam skala yang luas pada periode tertentu (Simamarta, 2002 :10). Meskipun terjadi perubahan kebijakan akan tetapi kebijakan tersebut tidak membawa perubahan nasib pada petani. Justru yang terjadi adalah berkembangnya usaha tani yang berskala gurem.

Kondisi kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami oleh penduduk pribumi ini mendorong perhatian pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mengembangkan politik etis (1900-1942). Program-program yang berorientasi pada politik balas budi mulai dikembangkan seperti program-program irigasi, imigrasi, pendirian lumbung desa, bank kredit rakyat dan rumah-rumah gadai pemerintah. Namun demikian, dalam tataran implementasinya beberapa kebijakan yang muncul di era politik etis tersebut digunakan untuk mendukung kepentingan penguasa kolonial. Dalam bidang imigrasi, perpindahan penduduk hanya sekedar digunakan untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan Belanda. Sedangkan untuk program irigasi, pembangunan jaringan-jaringan irigasi lebih banyak ditujukan kepada kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Sedangkan di bidang edukasi, program pendidikan juga hanya digunakan untuk pendidikan rendah yang nantinya bekerja untuk kepentingan pemerintah kolonial.

Peralihan kekuasaan penjajahan di Indonesia dari pemerintahan kolonial Belanda ke Jepang juga tidak banyak membawa perubahan kepada nasib para petani karena kebijakan yang ada pada waktu itu juga lebih banyak digunakan untuk kepentingan pemerintah Jepang. Kegiatan-kegiatan perekonomian seperti penanaman padi, jarak, kapas dan kegiatan untuk mendukung proyek-proyek untuk lapangan terbang bagi kepentingan militer Jepang banyak digalakkan oleh pemerintah Jepang (Hersumpama, 2005). Dalam proses produksi, Jepang juga mengontrol harga produksi dan seluruh aktivitas perekonomian masyarakat. Untuk memperlancar usahanya, Jepang membentuk *Jawa Hokokai* (Kebaktian Rakyat Jawa) dan *Nogyo Kumiai* (Koperasi Pertanian). *Kumiai* bertindak sebagai unit dasar yang memanipulasi seluruh struktur ekonomi dan sebagai alat dari Jepang untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan untuk Jepang. Lembaga ini dipropagandakan kepada penduduk sebagai upaya untuk melindungi ekonomi non pribumi yang terancam Cina.

Pasca kemerdekaan, berbagai upaya pembangunan pertanian mulai dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya ada-

lah Rencana Kasimo mengenai swasemda beras (1948) yang kemudian disusul pada tahun 1951 dengan Program Kesejahteraan Khusus/Istimewa yang mengawinkan Rencana Kesejahteraan Kolonial dengan Rencana Kasimo. Instabilitas politik yang terjadi pada waktu itu menyebabkan kegagalan Rencana Kasimo. Kebijakan-kebijakan lain yang cukup urgen di era Orde Lama adalah pendudukan tanah-tanah eks perkebunan terlantar, nasionalisasi perusahaan milik asing, penghapusan tanah partikelir dan pembaruan dalam persewaan tanah pada tahun 1959. Selain itu, pada era ini juga muncul Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) nomer 5 tahun 1960. Undang-Undang ini sebenarnya menghendaki penataan struktur penguasaan sumber agraria yang timpang. Ada beberapa hal esensial yang sebenarnya diatur dalam UUPA ini, misalnya larangan penguasaan tanah pertanian melebihi batas maksimal dan penetapan batas minimum kepemilikan tanah, larangan penguasaan tanah secara *absentee* (tanah yang berada di luar kecamatan yang didiami sang pemilik) dan UU Land reform dimana tanah yang sudah digadaikan selama 7 tahun harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa harus berkewajiban membayar uang tebusan. Meskipun secara substantif, adanya UUPA ini memberikan harapan akan keberpihakan terhadap petani akan tetapi stabilitas politik pada saat itu yang tidak menentu menyebabkan UUPA ini belum sempat terimplementasikan secara baik.

Perubahan orientasi kebijakan pembangunan dari orde lama ke orde baru membawa perubahan pula pada orientasi kebijakan pembangunan pertanian. Di era pemerintahan orde baru ini, pangan lebih ditempatkan sebagai komoditi politik daripada komoditi ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah melakukan intervensi dalam penguasaan sektor produksi dan distribusi pangan. Dalam proses produksi, pemerintah melakukan kontrol secara ketat dalam penggunaan jenis-jenis bibit baru, teknologi dalam pertanian dan pupuk. Proses distribusi juga dilakukan dengan membentuk beberapa kelembagaan yang mendukung pertanian seperti BULOG (Badan Urusan Logistik), KUD (Koperasi Unit Desa). Program-program kredit untuk petani juga dikururkan seperti Kredit Usaha Tani (KUT), Bimas, Inmas dan sebagainya. Berbagai program yang dilakukan tersebut memang mampu telah mampu mendorong tercapainya swasembada beras pada tahun 1986. Namun demikian, keberhasilan tersebut harus dibayar mahal dengan beberapa dampak negatif yang dimunculkan. Mekanisasi dalam bidang pertanian telah menyebabkan terjadinya pengangguran di pedesaan. Penentuan varietas padi yang akan ditanam juga berdampak buruk hilangnya varietas-varietas padi lokal. Selain itu penggunaan berbagai pupuk kimiawi juga telah berdampak buruk pada kerusakan ekologis. Lembaga-lembaga di bidang pertanian seperti KUD dan BULOG juga tidak mampu berfungsi sebagai wadah pemberdayaan kepada petani. Pada akhirnya, kebijakan-kebijakan pertanian di era orde baru ini belum mampu mendorong kemandirian dan keberdayaan para petani. Bahkan kebijakan-kebijakan yang ada justru semakin menambah munculnya petani-petani gurem. Kepemilikan luas lahan pertanian juga semakin timpang karena banyak pemilik kapital yang mengakumulasi kapital mereka un-

tuk memperluas tanah.

Runtuhnya rejim orde baru ternyata juga tidak memberikan dampak yang lebih baik kepada para petani. Kehadiran IMF di Indonesia pasca krisis ekonomi justru semakin memperburuk kondisi petani Indonesia. Akibat liberalisasi perdagangan tersebut, menyebabkan impor pun melonjak tinggi dan ekspor komoditas pertanian merosot. Sejak tahun 1994, Indonesia jatuh dari negara *net food exporter country* menjadi *net food importer country*. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, kebijakan impor beras selalu dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini telah menyebabkan pertanian sebagai basis penghidupan petani terancam dan digantikan dengan pangan impor (Khudori, 2005 : 16).

Adanya impor beras akhirnya telah menjatuhkan harga beras lokal. Kebijakan impor beras menyebabkan merosotnya tingkat pendapatan petani. Beras impor menjatuhkan harga panen petani baik harga kering giling (GKG) dan harga beras sampai 20%. Melakukan kebijakan impor beras di saat surplus beras menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap petani sendiri di dalam negeri dan akan menurunkan motivasi petani untuk meningkatkan produktivitas. Belum lagi, petani juga terbebani oleh naiknya harga-harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM. Pendek kata, dilihat dari segi apapun, kebijakan impor beras tersebut tidak akan menguntungkan perberasan secara nasional dan akan semakin memperburuk petani. Selain kebijakan impor beras, ternyata Indonesia juga melakukan impor terhadap beberapa kebutuhan pangan. Kekurangan beras, jagung, gula, daging sapi, garam, susu dan lain-lain solusinya selalu impor. Akibatnya, antara tahun 1998-2001, Indonesia menjadi negara importir beras terbesar di dunia, dan kini setiap tahun kita mengimpor gula 40 persen dari kebutuhan nasional, impor sekitar 25 persen konsumsi nasional daging sapi, impor satu juta ton garam yang merupakan 50 persen dari kebutuhan nasional dan impor 70 persen kebutuhan susu (Suseno dan Suyatna, 2006).

Dari hari ke hari, angka ketergantungan impor atas berbagai komoditas pangan terus menanjak. Liberalisasi perdagangan telah menghancurkan pasar pertanian di Indonesia dan menggeser produksi pangan dari dalam negeri menjadi berorientasi pada impor. Beberapa komoditi pangan harus diimpor dari luar negeri. Sebagai contoh adalah kedelai. Data Kementerian Pertanian misalnya menyebutkan tahun 2010 produksi kedelai dalam negeri hanya mencapai 910.000 ton padahal, kebutuhan konsumsi dalam negeri 1,6 juta ton sehingga kekurangannya harus diatasi dengan impor kedelai. Produk-produk kedelai impor dari China, Vietnam, Thailand pun kemudian banyak membanjiri pasar kedelai di Indonesia. Dalam hal beras, Indonesia juga melakukan impor Beras dari Thailand, Vietnam dan Kamboja. Bahkan pada Bulan Desember Tahun 2012 Indonesia mendatangkan 100.000 ton beras dan pada tahun 2013 sebanyak 1 juta ton. Selain itu, data dari Data Asosiasi Sayur dan Buah-Buahan Tahun 2011, 70-80% produk buah-buahan dan sayuran menguasai pasar domestik Indonesia. Fakta tersebut menunjukkan bagaimana rapuhnya ketahanan pangan di Indone-

sia.

Liberalisasi perdagangan ini juga diperparah dengan adanya konversi lahan pertanian yang semakin massif. Banyak lahan-lahan pertanian yang tergusur dan digantikan dengan kawasan industri dan pertokoan. Akibatnya lahan pertanian semakin menyusut. Luas lahan pertanian di Indonesia sekitar 13 juta hektar. Jika dibagi dengan jumlah petani pangan sebanyak 30 juta orang, maka rata-rata lahan per petani hanya sebatas 0,3 hingga 0,4 hektar. Kondisi ini berbeda dengan Thailand misalnya. Rata-rata petani di sana sudah memiliki 3 hektar sawah. Keterbatasan lahan pertanian ini akan menjadi ancaman bagi ketersediaan pangan di Indonesia. Persoalan tersebut diperparah dengan lemahnya dukungan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertanian seperti akses transportasi, modal dan teknologi. Selain itu, para petani juga lemah dalam akses Tata Niaga khususnya terkait dengan penetapan Harga produk-produk pertanian rendah dan fluktuasi harga.

C. Agenda Pembangunan Pertanian di Indonesia

Dari paparan yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa dari era ke era para petani masih sekedar menjadi obyek dari kebijakan pertanian Indonesia. Jika ditelusuri, kegagalan sektor pertanian di Indonesia untuk mensejahterahkan rakyat dikarenakan tidak adanya kerangka yang jelas dalam strategi pembangunan Indonesia. Sebagai contoh, kebijakan yang diambil oleh pemerintah kolonial pada saat itu, sangat merugikan petani. Tindakan pembatasan dan tekanan yang dilakukan oleh pemerintah justru mencegah ekonomi kaum tani sedemikian rupa sehingga ekonomi petani tidak mengalami transformasi yang bersifat kapitalistis dan mencegah terbentuknya suatu pertanian rakyat komersial yang bisa menjadi saingan bagi produksi perkebunan besar dan mencegah terjadinya kenaikan tingkat upah secara menyeluruh (Geertz dalam Husken, 1988 : 364). Kebijakan pembangunan pertanian selama periode orde baru berpaham modernisasi dan kapitalisasi. Orientasi kebijakan tersebut adalah peningkatan produksi pangan guna mencapai standar kecukupan. Regim pemerintahan orde baru cenderung melaksanakan pembangunan pertanian melalui *by-pass approach* (jalan pintas) yaitu revolusi hijau tanpa reformasi agraria. Pertanian sekedar dipandang sebagai persoalan produksi, teknologi dan harga.

Kelalaian kebijakan pembangunan pertanian dengan langkah pemihakan berlebihan pada sektor industri padat modal memberi kontribusi besar pada peminggiran peran petani. Pencapaian swasembada pangan pada waktu itu, harus dibayar mahal dan tidak membawa perbaikan riil pada tingkat kehidupan petani. Ruwetnya dunia pertanian Indonesia saat ini, disebabkan kebijakan negara yang tidak berpihak kepada petani dan hanya melayani kepentingan global. Serbuan produk-produk impor terus masuk ke Indonesia yang menyebabkan tersingkirnya produk-produk lokal.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka perlu ada revitalisasi dalam kebijakan pembangunan pertanian Indonesia ke depan . Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kemandirian petani Indonesia baik dari aspek kultural maupun struktural.

1. Mendorong Perbaikan Tata Niaga Pertanian Indonesia,

Tata niaga pertanian menjadi aspek krusial di dalam pengembangan pertanian di Indonesia. Fluktuasi harga produk-produk pertanian yang sering terjadi dan merugikan petani akibat tata niaga perdagangan yang tidak berpihak kepada petani. Oleh karena itu, revitalisasi pertanian menjadi mutlak untuk diperlukan. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai peng- etatan impor, pengaturan dan penertiban siapa yang memiliki hak untuk impor perlu untuk dilakukan. Selain itu, perlu ada standarisasi harga-harga produk hortikultura yang dihasilkan para petani lokal. Aspek ini penting agar jangan sampai berlimpahnya produk-produk hortikultura tidak ber- korelasi dengan kesejahteraan para petani karena harga dimainkan oleh para tengkulak atau pengijon yang membeli produk-produk mereka.

2. Memberikan Kebijakan Pemberian Insentif/Subsidi Untuk Petani

Selama ini sektor pertanian dianggap kurang menarik karena dianggap tidak menjanjikan bagi sumber pendapatan ekonomi keluarga. Oleh karena itu perlu ada strategi untuk mendorong agar sektor pertanian ini menja- di lebih menarik. Pemberian insentif ataupun subsidi kepada petani dapat dilakukan untuk menumbuhkan iklim yang kondusif bagi pengembangan sektor pertanian. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif untuk keringanan pajak untuk lahan-lahan pertanian dan sarana produksi pertanian lainnya. Indonesia dapat belajar dari pengalaman beberapa ne- gara. Negara-negara maju memberikan subsidi yang besar bagi para petani bukan semata-mata karena negara tersebut kaya akan tetapi pangan adalah cerminan kedaulatan bangsa. Sebagai contoh adalah Amerika Serikat yang memandang bahwa pangan tidak sesempit para ekonom yang terfokus pada barang privat. Pangan adalah komoditas politik yang strategis. Jika diperlukan, pemerintah AS dapat menggunakan pangan sebagai senjata ampuh untuk menekan suatu negara yang tidak sejalan dengan garis poli- tiknya (Khudori, 2008 : 305).

3. Memperketat regulasi konversi lahan pertanian

Untuk mendukung kebijakan pertanian, pemerintah perlu membuat kebi- jakan penataan ruang yang jelas mengenai kawasan mana yang akan dijadi- kan sebagai sentra industri, sentra perdagangan dan sentra pertanian. Se- lama ini, terkesan bahwa tata ruang kota selalu mengorbankan lahan-lahan pertanian. Rumah-rumah pertokoan dan kawasan real estate justru semak- in tumbuh subur dengan menggusur lahan-lahan pertanian. Oleh karena

itu, adanya penataan ruang yang jelas diharapkan akan dapat meminimalisir terjadinya penyusutan lahan pertanian menjadi kawasan pertokoan/perumahan. Dengan demikian, pemerintah perlu mengawal secara ketat terhadap proses perijinan pengalihan lahan agar eksistensi lahan-lahan pertanian tetap terjaga. Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RT RW) harus dikawal implementasinya sehingga penggunaan tanah benar-benar sesuai dengan peruntukannya.

4. Aksesibilitas Permodalan.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh para petani Indonesia adalah akses permodalan yang mudah dan bunga yang rendah. Rata-rata bunga Perbankan di Indonesia masih dua digit (di atas 10%). Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang notabene merupakan kredit pemerintah pun suku bunganya masih tinggi. Proses administrasi untuk mendapatkan pinjaman tersebut juga cenderung masih procedural. Fakta-fakta empiric menunjukkan bahwa kebanyakan usaha berskala mikro dan kecil di pedesaan sulit mengakses kredit melalui skema formal. Faktor penyebabnya tidak hanya menyangkut tidak tersedianya skema pembiayaan formal yang sesuai akan tetapi juga terkait dengan karakteristik kontrak dan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan formal seperti agunan yang terkadang tidak memungkinkan untuk dipenuhi oleh masyarakat di pedesaan seperti petani miskin (Wijaya, 2011 : 19).

Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengembangkan skema-skema program perkreditan dari lembaga perbankan agar tidak memberatkan para petani. Beberapa tahun lalu pemerintah pernah mewacanakan akan membentuk Bank Khusus Petani. Namun sayangnya, wacana tersebut tidak pernah terdengar hingga saat ini. Selain itu, Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi juga dapat didorong agar lebih memberikan kemanfaatan kepada petani.

5. Jaminan ketersediaan sarana dan produksi pertanian (bibit, pupuk dan obat-obatan) baik dari aspek kuantitas maupun harga dan Program Pendampingan Petani

Pemerintah perlu menjamin akan adanya ketersediaan sarana produksi pertanian. Sarana-sarana produksi pertanian tersebut perlu tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang terjangkau para petani. Adanya jaminan ketersediaan sarana produksi pertanian akan menjadi jaminan bagi peningkatan produktivitas petani. Dengan demikian, program peningkatan kualitas dan produktivitas harus dijadikan sebagai prioritas program pemerintah. Aspek inilah yang perlu segera diperbaiki karena dilihat dari produktivitas petani petani Indonesia pun masih kalah dengan produktivitas petani –petani luar negeri. Sebagai contoh untuk komoditas pertanian kentang. Tingkat produktivitas yang dihasilkan petani

Indonesia hanya berkisar 15 ton per hektar sementara di negara lain, produktivitasnya dapat mencapai 30 hektar.

Oleh karena itu, selain menjamin ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian. Pemerintah perlu secara kontinyu untuk melakukan proses pendampingan kepada para petani hortikultura dari proses pembibitan, pembudidayaan tanaman-tanaman hortikultura tersebut. Program-program bimbingan, pelatihan dan pendampingan yang intensif dapat dilakukan untuk mendukung program tersebut.

6. Mengembangkan Potensi Unggulan Pertanian

Strategi pilihan terhadap produksi unggulan yang didasarkan pada *comparative advantage* (keunggulan komparatif). Misalnya : Malaysia menitik-beratkan pengembangannya pada industri kelapa sawit. Thailand fokus pada keinginannya menjadi negara nomor satu di industri karet, tebu dan hortikultura. Dalam konteks Indonesia Fokus pada pengembangan industri-industri yang berpeluang besar Indonesia dapat unggul. Potensi unggulan yang dapat dikembangkan oleh Indonesia adalah agroindustri berbasis tropis.

Pengembangan potensi unggulan ini juga dapat dilakukan dengan berupaya memperkuat keterkaitan antara sektor pertanian dengan industri. Industri-industri yang berbasis pada pertanian harus dikembangkan sehingga akan memberikan nilai tambah bagi produk-produk hasil pertanian. Selama ini banyak produk-pertanian yang dijual dalam bentuk mentah sehingga tidak memberikan keuntungan kepada para petani. Strategi lain yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong diversifikasi hasil-hasil pertanian sehingga memberikan nilai tambah penghasilan bagi petani dan mendorong pengembangan pertanian yang berorientasi pada agroindustri dan agribisnis.

7. Reforma Agraria

Upaya mendukung pembangunan pertanian perlu dilakukan dengan melakukan reforma agraria. Reforma agraria adalah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam merombak dan menata kembali bentuk-bentuk penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria dan hubungan-hubungan sosial agraria bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Setiawan, dalam Fauzi (ed), 1997 : 21). Reforma agraria tidak sekedar mengatur kepemilikan (membagi atau mengumpulkan) tanah (*land reform*) tetapi juga mencakup cara berproduksi, teknologi dan sebagainya. Reforma agraria adalah *land reform* plus seperangkat infrastruktur : jaminan hukum, kredit (bila diperlukan), akses terhadap jasa advokasi, akses informasi baru dan teknologi. Dalam konteks reforma agrarian ini, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat atas

lingkungan agrarian mutlak diperlukan. Sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945 dan pasal 2 UUPA nomer 5 Tahun 1960 negara berhak mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan lahan pertanian bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Baswir, 2009 : 139).

Pengalaman reforma agraria di Jepang dan Cina dapat dijadikan contoh. Reforma agraria di Jepang dilakukan untuk memberikan landasan ekonomi dalam sebuah pemerintah yang demokratis. Setelah reforma agrarian, hampir semua petani berstatus sebagai pemilik tanah tanpa utang. Keluarga petani penyakap yang tidak memiliki tanah dalam beberapa generasi akhirnya dapat memperoleh penghasilan yang layak baik sebagai penyakap maupun sebagai pemilik tanah. Reforma agraria di Cina selain menghasilkan petani bertanah juga mematahkan dominasi kelas tuan tanah dan mengalihkan kekuasaan kepada petani miskin dan menengah (Khudori, 2008 : 336).

8. Revitalisasi Kelembagaan Petani Indonesia

Salah satu faktor yang menyebabkan petani Indonesia selama ini tidak berdaya adalah tidak adanya lembaga yang benar-benar mampu mewadahi kepentingan para petani. Lembaga-lembaga yang ada seperti Bulog, KUD telah dikooptasi untuk kepentingan penguasa. Berkaitan dengan hal tersebut, revitalisasi kelembagaan yang mendukung sektor pertanian perlu dilakukan. Fungsi dari KUD, BULOG, Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) atau kelompok-kelompok tani yang ada di pedesaan perlu untuk direvitalisasi dalam rangka mendukung pemberdayaan para petani. Koperasi-koperasi sejati di tingkat petani juga perlu untuk diwujudkan. Koperasi sejati adalah koperasi yang modalnya dimiliki oleh seluruh konsumen dan anggota koperasi. Dengan kata lain, koperasi sejati adalah koperasi yang tidak mengenal diskriminasi sosial, agama, ras dan antar golongan dalam menentukan kriteria keanggotannya (Baswir, 2009 : 140). Dalam konteks revitalisasi kelembagaan petani ini, penguatan jaringan-jaringan sosial (aliansi) di antara para petani perlu dilakukan agar mereka memiliki posisi tawar yang kuat di dalam proses perumusan kebijakan.

Melalui pemanfaatan institusi lokal ini akan memungkinkan penerapan strategi pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kelompok tani. Di dalam kelompok terjadi suatu *dialogical center* yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Anggota kelompok menumbuhkan identitas seragam dan mengenali kepentingan mereka bersama. Selain itu, melalui kehidupan kelompok masing-masing individu belajar untuk menganalisis secara kritis situasi total mereka termasuk dimensi politiknya dan berusaha memperoleh kembali daya untuk mengubah situasi tersebut (Moeljarto, dalam Priyono dan Pranarka, 1996 : 138).

9. Pembatasan produk-produk impor

Pembatasan akan produk-produk impor sebenarnya perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap produk-produk pertanian lokal. Pada awal tahun 2013 sebenarnya pemerintah telah memberikan kebijakan yang memberikan angin segar bagi perlindungan petani lokal di Indonesia dengan mengeluarkan Permentan nomer 60 tahun 2012 yang berisi larangan impor terhadap 13 produk hortikultura selama bulan Januari-Juni 2013. Tiga belas produk hortikultura dilarang diimpor selama 6 bulan ini yakni kentang, kubis, wortel, cabe, nanas, melon, pisang, mangga, papaya, durian, krisan, anggrek dan heliconia. Kebijakan ini didasarkan diambil dengan didasarkan pertimbangan adanya ketersediaan produk dalam negeri mencukupi untuk kebutuhan konsumsi selama enam bulan ke depan. Kebijakan ini tentunya perlu diapresiasi dan dapat menjadi sinyal positif bagi perlindungan produk-produk hortikultura dalam negeri. Dengan kebijakan ini, diharapkan produk-produk petani lokal dapat terserap secara maksimal di nasional. Kebijakan ini perlu menjadi entry point bagi upaya perlindungan dan memandirikan petani-petani hortikultura dalam negeri.

Namun sayangnya pemerintah tidak secara konsisten melakukan kebijakan tersebut. Pasca pemberlakuan kebijakan stop impor produk hortikultura tersebut beberapa persoalan memang terjadi. Ada beberapa pusat perbelanjaan yang mengalami kelangkaan buah dan sayuran karena keterlambatan stok. Fluktuasi harga untuk beberapa komoditi seperti cabe, bawang melonjak cukup tajam. Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa kenaikan harga beberapa komoditi telah berimplikasi pada kenaikan inflasi sebesar 0,75% pada Bulan Februari 2013. Kebijakan larangan impor ditengarai juga memicu munculnya spekulasi-spekulasi yang mengeruk keuntungan ekonomi dari keterbatasan stok produksi dalam negeri. Permainan spekulasi-spekulasi inilah yang diduga menyebabkan naiknya harga produk-produk hortikultura saat ini. Adanya permainan dari para spekulasi diperparah dengan lemahnya posisi tawar petani di dalam menghadapi struktur pasar yang mendominasi mereka. Selama ini, posisi petani seperti cabai ini misalnya selalu lemah karena mereka sangat tergantung kepada para pengepul di dalam menjual produk-produk panen mereka. Relasi ketergantungan inilah yang menyebabkan harga komoditas tertentu mudah diombang-ambingkan oleh para pengepul.

Selain itu secara eksternal, kebijakan tersebut juga mendapatkan protes dari Amerika Serikat yang menggugat kebijakan tersebut ke World Trade Organization. Kebijakan tersebut dianggap telah mempengaruhi ekspor pertanian AS karena prosedur persyaratan impor yang lebih rumit. Dampaknya, beberapa produk ekspor AS ke Indonesia mengalami penurunan, Sebagai contoh ekspor aspal Washington ke Indonesia dalam dua bulan terakhir mengalami penurunan.

Problema yang muncul pasca pemberlakuan Permentan inilah yang kemudian mendorong pemerintah melakukan revisi atas Permentan tersebut. Pada Bulan April ini, pemerintah merevisi Permentan tersebut sehingga 13 produk yang sebelumnya dilarang untuk diimpor diperbolehkan untuk masuk ke Indonesia lagi. Revisi kebijakan ini tentunya sangat disayangkan. Persoalan tersebut sebenarnya perlu diatasi terlebih dahulu dengan memperbaiki tata niaga impor komoditi pertanian Indonesia dan bukannya diselesaikan dengan jalan pintas dengan membuka kran impor lagi. Demi mendorong kemandirian pangan dan hortikultura di negeri ini, maka pemerintah seharusnya tetap konsisten untuk melakukan pembatasan impor produk-produk hortikultura.

10. Mendorong kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk-produk pertanian lokal

Membangun kebanggaan akan produk-produk pertanian sendiri menjadi strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan para petani. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 240 juta jiwa sebenarnya dapat menjadi agen yang akan sangat strategis untuk mengembangkan kebanggaan akan produk-produk lokal. Namun sayangnya, masyarakat Indonesia sendiri seringkali kurang bangga dengan produk-produk milik bangsanya sendiri, sehingga justru menjadi penghambat membangun pasar lokal. Selama ini, orang-orang lebih senang mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran impor dikarenakan kualitasnya dianggap lebih baik dibandingkan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh petani-petani dalam negeri. Negara tetangga seperti Jepang dan Korea Selatan dapat dijadikan contoh bagi bangsa ini agar lebih bangga terhadap produk-produk dalam negeri.

D. Penutup

Jika dikaji secara lebih mendalam, akar persoalan dari menyusutnya lahan pertanian tersebut adalah kurang responsifnya kebijakan pemerintah terhadap kepentingan petani. Petani masih menjadi pihak yang belum diuntungkan dalam proses pembangunan. Atas nama pembangunan, petani sering dikorbankan oleh pemerintah demi memberikan keleluasaan kepada para pemilik modal. Hal ini mengakibatkan kesejahteraan petani dari dulu hingga sekarang tidak berubah secara signifikan. Harga produksi hasil pertanian, ternyata tidak seimbang dengan harga sarana produksi pertanian sehingga menjadi hal yang wajar ketika kemudian petani lebih memilih menjual tanah pertanian yang dimilikinya dan dari hasil penjualan tanah tersebut dialokasikan untuk investasi usaha lain. Penjualan lahan pertanian oleh para petani tersebut memang tidak dapat disalahkan, karena itu menjadi hak mereka, namun ketika situasi tersebut dibiarkan terus-menerus,

maka bukan tidak mungkin Sleman akan mengalami krisis pangan.

Berdasarkan hal tersebut, komitmen dari pemerintah akan sangat menentukan dalam pengembangan sektor pertanian. Pemerintah perlu merumuskan suatu program pembangunan yang mendukung pengembangan sektor pertanian sehingga memberikan kemanfaatan dan tetap menarik bagi petani. Agenda kedaulatan pangan harus dijadikan sebagai alternatif paradigma ketahanan pangan di Indonesia. Kedaulatan pangan ini harus diwujudkan dengan mendorong system pertanian yang berkelanjutan, proteksionis dan mendorong pasar lokal. Melalui strategi ini diharapkan petani akan lebih berdaya dan mandiri.

Referensi

- Baswir, Revrison, 2009, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Hersumpna, 2005, *Indonesianisasi Dan Ekonomi Off-Farm Pribumi, (Kajian Historis Perkembangan Industri Kerajinan Tenun Lokal Di Yogyakarta 1930-1960)*.
- Husken, Frans, 1988, *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Khudori, 2008, *Ironi Negeri Beras*, Yogyakarta, Insist Press.
- Khudori, 2005, *Lapar : Negeri Salah Urus!* Yogyakarta, Resist Book.
- Moeljarto, Vidhyandika *Pemberdayaan Kelompok Miokin Melalui Program IDT*, dalam Priyono Ony S., dan A.M.W Pranarka, 1996, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta, Center For Strategic And International Studies.
- Setiawan, Bonnie, *Perubahan Strategi Agraria : Kapitalisme Agraria Dan Pembaruan Agraria Di Indonesia* dalam Fauzi, Noer (penyunting), *Tanah dan Pembangunan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Simamarta, Rikardo, 2002, *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah Oleh Negara*, Yogyakarta, Insist Press dan Pustaka Pelajar.
- Suseno, Djoko dan Hempri Suyatna, 2006, *Quo Vadis Petani Indonesia, Terhempasnya Anak Bangsa Dari Sektor Pertanian*, Yogyakarta, Aditya Media.
- _____, Suseno, Djoko dan Hempri Suyatna, *Mewujudkan Kebijakan Pertanian Yang Pro-Petani*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Volume 10 Nomer 3 Maret 2007.

Wijaya, Krisna, 2011, *Kredit Umum Pedesaan BRI Dalam Dinamika Perekonomian Pedesaan*, Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana UGM.

Mendamaikan Aktor dan Struktur dalam Analisis Sosial Perspektif Teori Strukturasi Antony Giddens

Oleh:

Dr. Nirzalin, M.Si

Abstrak

Dunia keilmuan sosiologi dalam analisis-analisisnya terjerebab kedalam kebekuan teoritis. Jika tidak terperangkap ke dalam mazhab fenomenologisme maka ia terpasung dalam strukturalisme. Mazhab fenomenologisme di satu sisi menempatkan aktor sebagai dewa yang mampu mewujudkan sendiri semua tindakan-tindakannya. Maka para sosiolog yang tergabung dalam mazhab teoritis ini dalam bahasanya Weber selalu berusaha mencari motif apa dibalik tindakan aktor. Sebaliknya disisi lain penganut paham strukturalisme menempatkan aktor seperti robot yang dikendalikan oleh remote kontrol. Remote kontrol itu adalah struktur atau fakta sosial dalam bahasanya Durkheim. Aktor individu yang terpasung, tidak kreatif dan hanya bertindak berdasarkan apa yang diinginkan oleh struktur atau fakta sosial. Maka para sosiolog yang semazhab dengan strukturalisme ini dalam analisisnya terhadap fenomena sosial selalu berusaha menelusuri struktur dan norma-norma sosial seperti apa yang mempengaruhi aktor. Giddens menilai kedua mazhab ini menggunakan kaca mata kuda (hanya mampu melihat satu arah) dalam analisis sosialnya. Akibatnya mereka tidak mampu memahami realitas sosial secara utuh dan komprehensif. Untuk mengatasi problem teoritis dari kedua mazhab teoritik yang dominan dalam ranah sosiologi ini, Giddens kemudian menawarkan teorinya yang dinamakan teori strukturasi. Apa itu teori strukturasi?. Bagaimana kerangka epistemologi teori ini dalam memahami realitas sosial?. Kedua pertanyaan itulah yang akan dijawab dan dikupas dalam tulisan ini.

Kata Kunci : Strukturasi, Fenomenologisme, Strukturalisme

A. Pendahuluan

Tindakan sosial sebagai suatu reaksi aktor dalam merespon fenomena-fenomena sosial merupakan sesuatu yang lahir dari dua dorongan besar, pertama motivasi pribadi aktor dan yang kedua paksaan dari struktur sosial dimana aktor berada. Sayangnya, dua elemen dasar yang membidani lahirnya tindakan sosial aktor ini kurang diperhatikan oleh para sosiolog dalam menelurkan pikiran-pikiran

analisis sosialnya. Akibatnya, para sosiolog terjebak dalam pandangan “berat sebelah” ketika melakukan analisis terhadap pelbagai fenomena sosial itu. Jika tidak terperangkap dalam perspektif strukturalisme maka ia terkungkung dalam kaca mata fenomenologisme. Kedua pandangan teoritis tersebut berat sebelah karena strukturalisme terlalu menekankan struktur dalam menilai tindakan-tindakan aktor sosial (objektivisme). Akibatnya aktor seolah-olah hanyalah robot yang dikendalikan melalui *remote control* oleh struktur. Ia tidak memiliki peran apapun dalam merealisasikan tindakan-tindakannya. Sebaliknya fenomenologisme dengan gagah beraninya berkeyakinan bahwa struktur tidak memiliki peran apa-apa dalam menentukan tindakan aktor. Aktor sendirilah yang menentukan tindakan-tindakannya (subjektivisme). Alhasil para sosiolog yang mengandalkan perspektif teoritik fenomenologisme tidak mampu melihat bagaimana pengaruh struktur yang sangat penting pula dalam menentukan tindakan aktor. Akibatnya, kaum fenomenolog tidak mampu memahami gejala-gejala sosial secara utuh.

Giddens menolak pandangan yang berat sebelah ini. Fenomena sosial merupakan sebuah gejala yang teruntai secara rumit dengan pelbagai pengaruh dari unsur-unsur yang terlibat. Meskipun aktor memiliki kesadaran yang tinggi dalam mewujudkan tindakan-tindakannya namun campur tangan struktur dalam realisasi tindakannya juga tidak dapat diabaikan. Oleh sebab itu kata Giddens, sosiolog harus mempertimbangkan kedua unsur tersebut baik aktor maupun struktur dalam melakukan analisis terhadap pelbagai fenomena sosial. Untuk melakukan ini maka sosiolog harus meninggalkan perspektif teoritik yang berat sebelah yaitu strukturalisme maupun fenomenologisme. Sosiolog hendaknya mengalihkan perspektifnya pada teori yang menjembatani antara struktur dan aktor dalam menganalisis setiap gejala sosial. Teori itu adalah strukturasi. Apa itu teori strukturasi? Bagaimana pemahamannya tentang struktur dan aktor? Dan bagaimana pula menghubungkan antara struktur dan aktor dalam analisis sosial?. Kajian ini mengupas lebih lanjut tentang strukturasi itu. Namun untuk memudahkan pemahaman terhadap teori strukturasi tidak bisa tidak harus dipahami dulu bagaimana teori strukturalisme dan fenomenologisme. Karena itu, sebelum beranjak ke teori strukturasi studi ini mengupas terlebih dahulu kritik Giddens terhadap strukturalisme dan fenomenologisme.

B. Metode Penelitian dan Analisis Data

Penelitian ini bersifat kepustakaan murni (Library Research). Artinya data-datanya diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan baik buku maupun jurnal. Pengumpulan data tidak dipergunakan metode khusus hanya saja diupayakan agar data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dikumpulkan selengkap mungkin baik data primer maupun sekunder. Karya Antony Giddens merupakan data primer sementara tulisan para penulis lainnya yang mengupas pemikiran yang terakhir ditempatkan sebagai data sekunder. Selain itu, untuk membandingkan pemikiran teoritis Giddens dengan pemikiran strukturalisme dan fenom-

enologisme studi ini juga menggali inti pemikiran tokoh dari kedua perspektif tersebut. Untuk pemikiran strukturalisme analisis dilakukan terhadap karya Emile Durkheim khususnya “The Rules of Sociological Methods (1964)” dan karya Max Weber “The Theory of Social and Economic Organization (1964)” untuk perspektif fenomenologisme.

Data yang terkumpul diatur secara berurutan, diorganisasikan kedalam satu pola, dikategorikan dan diuraikan kedalam satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy Moleong, 2000: 1030). Selanjutnya, data-data tersebut dikomparasikan dan interpretasikan. Pengkomparasian data dimaksudkan untuk menemukan data-data yang dirasa kurang valid, terhadap hal demikian data tersebut akan direduksikan (Norman K. Denzin, 1994: 433). Keseluruhan hasil kajian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif-analitik. Dengan metode ini diharapkan dapat dipilah secara tegas antara deskripsi data disatu sisi dan analisis data disisi lain.

C. Kritik Giddens Terhadap Teori Fenomenologisme dan Strukturalisme

Giddens membagi teori sosial konvensional kedalam dua kubu yang berseberangan yaitu teori subjektivisme (fenomenologisme) dan objektivisme (strukturalisme). Subjektivisme merupakan teori yang menekankan fokus perhatian pada tindakan aktor (*actor centre perspective*). Premis utamanya adalah bahwa fenomena sosial semata-mata hasil produksi dan reproduksi dari aktor. Dengan demikian untuk memahami fenomena sosial peneliti tinggal mengarahkan perhatiannya pada motivasi apa yang melatarbelakangi tindakan aktor. Pemahaman terhadap motivasi tindakan aktor dipercaya menjadi satu-satunya jalan untuk memahami sebuah realitas sosial. Kelompok teoritis subjektivisme ini adalah mereka yang berada dalam jalur perspektif hermeneutik dan fenomenologi. Dipihak lain, teoritikus objektivisme adalah mereka yang berpandangan sebaliknya bahwa fenomena sosial merupakan kreasi dari struktur sosial, aktor hanyalah mereka yang menjalankan tindakan-tindakan berdasarkan tuntutan dari struktur. Peneliti dipercaya sudah dapat memahami realitas sosial hanya dengan mengkaji dan mengeksplorasi norma-norma sosial seperti apa yang berlaku dalam suatu masyarakat. Norma, qanun dan sebagainya adalah struktur yang menjadi kode tersembunyi dibalik perilaku aktor. Mengetahui kode tersembunyi ini maka dengan sendirinya peneliti diyakini dapat menjelaskan apa yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan didalam lingkungan sosialnya. Teoritikus objektivisme ini menurut Giddens adalah mereka yang tergabung dalam paham strukturalisme dan fungsionalisme (Mark Haugaard, 1997: 99).

Jika realitas sosial menunjukkan bahwa setiap hari Hasan bekerja keras untuk menghidupi dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya maka teoritikus fenomenologisme (subjektivisme) seperti teoritikus weberian dan schulztian berupaya keras memahami (*verstehen*) realitas tersebut dengan cara menggali

motivasi dan nilai etik apa yang mendorong Hasan (aktor) melakukan itu. Bisa saja motivasi tersebut karena Hasan merasa bangga dan terhormat jika ia mampu membahagiakan keluarganya. Secara etik, etos kerja Hasan sangat mungkin dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang dia anut yang menegaskan bahwa umat yang terbaik adalah mereka yang hidupnya selalu bekerja keras, aktif memperbaiki kondisi hidupnya dan tidak berpangku tangan mengharapkan bantuan orang lain. Dipihak lain, teoritikus objektivisme sosial seperti mereka yang terkonsolidasi dalam kelompok Durkheimian, Marxian dan Parsonian memahami realitas tersebut secara bertolak belakang. Hasan bekerja keras tidak dipahami sebagai kehendak aktif dari Hasan sendiri tetapi dinilai sebagai dorongan dari struktur sosial yang menjadi kode tersembunyi yang memaksa Hasan untuk bekerja keras. Kelompok teoritikus ini berusaha menjelaskan (*ekslaren*) tindakan Hasan melalui penelusuran norma (fakta sosial) apa yang memaksa Hasan bekerja keras. Dapat saja semata-mata keterdesakan ekonomi sehingga untuk bertahan hidup ia harus bekerja keras. Tidak menutup kemungkinan pula hal itu terjadi karena tekanan, ejekan dan bahkan alienasi dari masyarakat terhadap mereka yang hidupnya miskin.

Giddens menilai teori subjektivisme dan objektivisme itu keliru karena memaksa memahami realitas sosial secara sepihak (berat sebelah). Keduanya terperangkap kedalam dualisme. Yang pertama terlalu meng-agungkan subjek dan menafikan struktur sementara yang kedua telah melakukan imperialisme objek sosial atas subjek atau pemikiran yang memberi prioritas pada struktur dengan merelativir aktor (Antony Giddens, 1984: xx). Pemahaman realitas sosial tidak dapat dilakukan secara utuh jika tidak menyatukan antara aktor dengan struktur yang mempengaruhinya. Dengan demikian bagi Giddens antara aktor dan struktur tidak dapat dinafikan dalam memahami sebuah realitas sosial. Kedua unsur tersebut saling mempengaruhi dan mengikat.

D. Strukturasi Sebagai Terobosan Teoritik

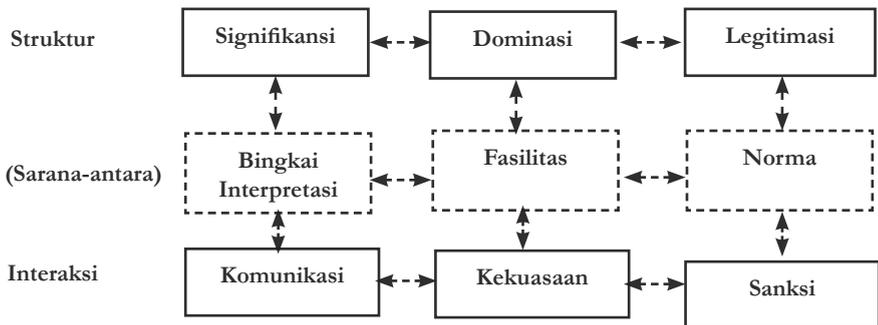
Giddens tidak percaya sebuah realitas sosial dapat dipahami secara utuh jika analisis sosial tidak mempertautkan antara perilaku aktor dengan struktur yang dia pahami. Lahirnya tindakan aktor merupakan persenyawaan antara motivasi pribadi dan tuntutan struktur yang telah ditafsirkannya. Keduanya saling mengandaikan sehingga keduanya memiliki hubungan yang bersifat dualitas bukan dualisme. Keduanya setara, saling mempengaruhi dan memiliki nilai signifikansi yang sama dalam terwujudnya sebuah tindakan. Giddens menyebut aktor sebagai pelaku yang melakukan tindakan dan peristiwa-peristiwa di dunia. Sementara struktur bukanlah nama bagi totalitas dan bukan pula kode tersembunyi. Struktur adalah aturan dan sumberdaya yang terbentuk dari dan membentuk keterulangan praktik sosial. Dalam hal ini Giddens berseberangan dengan penganut strukturalisme seperti Durkheim yang menganggap hubungan agen dan struktur bersifat dualisme, eksternal dan berupa kekangan (*memaksa/constrained*) terhadap agen

(Doyle Paul Johnson, 1994: 177-178). Giddens meyakini bahwa hubungan struktur dengan agen itu bersifat dualitas (timbang-balik), internal, mengekang (*constraining*) namun juga membuat agen mampu (*enabling*) melahirkan tindakannya sekaligus. Dualitas struktur itu terjadi dalam praktik sosial yang berulang (reproduksi sosial) dan terpola dalam lintas ruang dan waktu (Antony Giddens, 1984: 25-27).

Praktik sosial ini merupakan kebiasaan yang bisa berupa menyebut pengajar agama Islam sebagai teungku (ulama di Aceh), pergi shalat berjamaah di mesjid, korupsi, memberi suap, illegal logging dan sebagainya. Struktur terbagi kedalam tiga skema yaitu struktur signifikansi, dominasi dan legitimasi. Struktur signifikansi merupakan struktur simbolik, kewacanaan dan penyebutan, struktur dominasi terbagi dua yaitu otoritatif dan alokatif. Struktur dominasi merupakan penguasaan atas orang sementara alokatif penguasaan terhadap barang atau ekonomi. Akhirnya, struktur legitimasi merupakan peraturan normatif yang terungkap dalam tata-hukum, (Antony Giddens, 1979: 82). Dalam tindakan sosial ketiga struktur ini saling terkait dan memberi pengaruh terhadap tindakan aktor.

Hubungan dan dialektika pertautan ketiga skema struktur dalam konsep strukturasi Giddens tersebut digambarkan sebagai berikut.

Gambar. 1
Konsep Dimensi-Dimensi Dualitas Struktur Giddens



Ketiga kategori struktur di atas menurut Giddens adalah sumberdaya (yang difokuskan melalui signifikansi dan legitimasi) yang merupakan sifat-sifat sistem sosial yang terstruktur, ditimbulkan dan direproduksi oleh agen-agen berpengetahuan mumpuni selama interaksi. Keterkaitan ketiga struktur tersebut dalam praktik sosial dapat dilihat misalnya menyebut seseorang sebagai teungku (ulama) dengan sendirinya menempatkan dia pada posisi mendominasi pihak lain. Bersamaan dengan sebutan statusnya tersebut ia memiliki legitimasi yang diberikan oleh doktrin keagamaan untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang menentramkan umatnya melalui harapan syurga. Begitupula dengan ancaman-ancaman neraka yang menakutkan umat. Menyebut seseorang dengan teungku adalah struktur signifikansi yang bertalian dengan otoritas yang menjadi struktur dominasi sebab bersamaan dengan legitimasi itu ia menjadi sumber rujukan umat

dalam pelbagai tindakannya sehingga mereka patuh dan terikat pada teungku. Sementara wewenang memberikan pernyataan menentramkan dan ancaman neraka merupakan struktur legitimasi yang diperoleh dari status keteungkuhan seseorang yang merupakan justifikasi dari doktrin keagamaan.

Begitupula dengan status sebutan polisi (struktur signifikansi) menyebabkan mereka dapat menilang (struktur dominasi) para pengendara kendaraan bermotor yang tidak patuh pada aturan berlalu lintas. Wewenang polisi untuk menindak para pelanggar lalu lintas ini dibenarkan (struktur legitimasi) oleh aturan-aturan hukum. Hal yang sama dengan sebutan dosen terhadap seseorang. Status dosen membuat seseorang dapat menguji kemampuan para mahasiswanya dan memiliki otoritas (legitimasi) untuk menentukan penilaian. Disini seorang aktor mampu mewujudkan tindakannya bukan hanya karena motivasi dan keinginan dirinya sendiri tetapi juga karena ia mengadaptasikan struktur dan sekaligus struktur memberinya keberdayaan yang memungkinkan tindakannya direalisasikan. Dalam posisi ini Giddens menempatkan kekuasaan bukan sebagai suatu totalitas tetapi suatu dominasi melalui mobilisasi sumberdaya struktur dominasi yang dimiliki oleh para aktor.

E. Kekuasaan Sebagai Dialektika Kendali Atasan-Bawahan

Kekuasaan menduduki posisi sentral dalam rangkaian teoritik strukturasi Giddens. Dalam kacamata Giddens, kekuasaan dihasilkan dalam dan melalui reproduksi struktur-struktur dominasi. Figur yang memiliki kekuasaan adalah mereka yang menguasai sumberdaya dan mampu menyalurkannya pada pihak lain yang dinyatakan sebagai bawahannya. Hal ini berbeda dengan konsep kekuasaan yang dikonstruksikan oleh Weber. Weber (1964) berpandangan bahwa "Kekuasaan adalah kemampuan seorang aktor (pelaku) mewujudkan gagasan-gagasannya sekalipun ditentang oleh orang-orang lain dalam suatu hubungan sosial" (*"Power (macht) is the probability that one actor within a social relationship will be in a position to carry out his own will despite resistance"*). Bagi Giddens, kekuasaan tidak dapat dipertahankan jika ia hanya mendasarkan pada kemampuan memaksa. Sebab ketundukan seseorang terhadap ketakutan pada orang lain hanyalah ketundukan semu yang apabila ia memperoleh kesempatan dan momentum untuk melawan maka ia akan melepaskan diri dari cengkeraman kekuasaannya. Tetapi kekuasaan yang sesungguhnya adalah kekuasaan yang dapat menyalurkan sumberdaya yang dibutuhkan oleh orang lain pada seseorang. Karena itu menurut Giddens, seorang aktor mampu mendominasi pihak lain apabila ia menguasai struktur-struktur sosial yang mendasari hubungan-hubungan sosial didalam masyarakat.

Kemampuan elite agama menguasai struktur signifikansi (wacana) misalnya pada akhirnya menjadi fasilitas bagi mereka untuk mendominasi dan memobilisasi masyarakat. Dan masyarakat menerima dominasi kekuasaan elite agama melalui sikap kepatuhan dan ketundukan yang mereka maknai sebagai sesuatu yang alamiah atau natural. Tindakan dan praktik sosial kepatuhan dan ketundukan

masyarakat itu lambat-laun menjadi praktik rutinitas bagi mereka. Praktik rutinitas ini terjadi karena apa yang menjadi tindakan rutin itu dilakukan berdasarkan refleksi dari kesadaran praktis. Melakukan sesuatu yang telah menjadi kesadaran praktis membangkitkan rasa aman bagi pelakunya, sehingga dengan sendirinya mendorong mereka melakukannya secara berulang-ulang.

Kesadaran praktis ini sepadan artinya dengan *habitus* dalam konsep Bourdieu, yaitu struktur mental atau kognitif yang digunakan individu (aktor) untuk menghadapi kehidupan sosial. Sebagai struktur mental atau kognitif yang mendeterminasi praksis sosial, *habitus* mencakup pemikiran, persepsi, ekspresi dan tindakan yang lahir dalam bingkai sejarah, situasi dan struktur sosial tertentu (Cheelan Mahar, tt: 15). *Habitus* merupakan produk dialektika internalisasi struktur dunia sosial. Karena itu *habitus* merupakan struktur sosial yang dinternalisasikan dan diwujudkan (George Ritzer, 2000: 522).

Namun, yang perlu diingat menurut Giddens kekuasaan itu tidak muncul begitu saja. Ia mengacu pada kapasitas transformatif dari tindakan manusia (elite yang berkuasa). Maksudnya, makna kekuasaan yang paling luas secara logis tunduk pada subyektivitas yakni introspeksi dan mawas diri. Hal ini perlu ditekankan karena konsepsi kekuasaan dalam ilmu-ilmu sosial cenderung mencerminkan dualisme subyek dan obyek. Jadi kekuasaan seringkali didefinisikan berdasarkan tujuan atau kemauan yakni kemampuan mencapai hasil-hasil yang diinginkan dan dimaksudkan (Antony Giddens, 1984: 15). Sementara, Faucault (2002) lain lagi, ia memandang kekuasaan sebagai milik masyarakat atau komunitas sosial. Kekuasaan sama luasnya dengan lembaga sosial, tidak ada ruang yang sama sekali bebas dicelah-celah jaringannya. Bahwa relasi-relasi kekuasaan saling terjalin dengan jenis-jenis relasi lain.

Kekuasaan dalam pengertian kapasitas transformatif agensi manusia menurut Giddens (1984) merupakan kemampuan aktor untuk mencampuri rangkaian peristiwa dan juga mengubah rangkaiannya seperti kata "bisa" yang memediasi maksud atau keinginan dan realisasi aktual dari hasil yang dicari. Dalam pengertian inilah, beberapa orang memiliki kekuasaan atas orang lainnya: ini adalah kekuasaan sebagai dominasi. Meskipun seorang aktor dengan sumberdaya yang dimilikinya mampu mendominasi kekuasaannya pada pihak lain, namun hal itu tidak berarti ia berkuasa secara total terhadap pihak yang dia didominasi. Sebab ketundukan terhadap seorang figur yang berkuasa selalu tidak bersifat mutlak atau penguasaan total. Karena dalam penguasaan selalu terlibat relasi otonomi dan ketergantungan, baik yang menguasai maupun yang dikuasai.

Semua ketergantungan menawarkan beberapa sumberdaya dimana mereka yang menjadi bawahan bisa mempengaruhi aktivitas-aktivitas atasannya. Mekanisme ini, oleh Giddens (1984) disebut sebagai dialektika kendali (*dialectic of control*) dalam sistem-sistem sosial. Seorang yang mendominasi pihak lain karena ia memiliki sumberdaya yang dibutuhkan baik berupa otoritas maupun ekonomi

harus selalu mampu menyalurkan sumberdayanya itu pada bawahannya. Jika tidak maka bawahan akan keluar dari jaringan kekuasaannya. Sebab sumberdaya yang dimiliki oleh seorang figur yang berkuasa pada satu sisi adalah fasilitas bagi dia untuk mendominasi pihak lain namun disisi lain dan disaat bersamaan hal itu sekaligus juga merupakan sumberdaya bagi bawahan untuk mengontrol atasannya agar selalu mentransfer sumberdaya itu pada mereka. Inilah yang dimaksud dengan dialektika kendali dimana atasan dengan bawahan selalu terikat dalam hubungan saling menerima dan memberi. Sebab itu pula maka setiap figur yang berkuasa harus selalu mawas diri dan memperhatikan kepentingan bawahannya. Dengan demikian, seorang yang berkuasa tidak boleh berbuat sewenang-wenang atau seenaknya sendiri terhadap bawahannya.

F. Penutup

Menjembatani antara pandangan strukturalisme dan fenomenologisme dalam analisis sosial merupakan sumbangan utama dari teori strukturasi Giddens. Ia merupakan suatu terobosan teoritis. Sebab teori strukturasi mampu menerobos kebekuan analisis sosial yang selalu terjebak kedalam dua mazhab teoritik utama yaitu strukturalisme dan fenomenologisme. Disatu sisi, Strukturalisme dengan Emile Durkheim sebagai aktor utamanya menempatkan aktor seolah-olah robot yang dikendalikan secara otomatis seperti remote control oleh struktur. Aktor tidak memiliki otonomi dalam merealisasikan tindakan-tindakannya. Apa yang dia lakukan hanyalah mengikuti kehendak struktur-struktur sosial. Namun dalam tindakan aktor, struktur sosial ini menjadi semacam kode tersembunyi bagi aktor. Sebab itu pula dalam melakukan analisis sosial para sosiolog yang menggunakan strukturalisme sebagai perspektifnya berusaha keras menemukan "kode tersembunyi" ini dibalik tindakan aktor.

Fenomenologisme lain lagi, dengan dimotori oleh Max Weber perspektif ini menempatkan aktor sebagai figur otonom dalam tindakan-tindakannya. Struktur tidak memberi pengaruh apalagi memaksa mereka dalam bertindak. Motivasi dan kesadaran aktor sendirilah yang membuat tindakan-tindakannya lahir. Tugas para sosiolog yang menggunakan perspektif ini dalam analisis sosialnya adalah menggali dan "mengeluarkan" dari aktor motivasi apa dan kesadaran apa yang mendorong ia melakukan tindakannya. Kedua perspektif teoritik ini berdiri dengan kokoh dalam jagad keilmuan sosiologi sehingga para sosiolog terbelah kedalam dua kubu teoritik itu. Akibatnya, analisis sosial berat sebelah, tidak utuh, membosankan dan membeku karena selalu disuguhi oleh kedua perspektif itu. Disinilah signifikansi teoritik strukturasi Giddens. Ia datang menawari pemahaman epistemologi baru dalam analisis sosial. Bagi Giddens tindakan sosial lahir merupakan persenyawaan antara motivasi aktor dan juga pengaruh dari struktur sosial. Maka untuk memahami fenomena sosial sosiolog tidak boleh tidak harus menggali motivasi aktor dan pemahamannya sekaligus terhadap struktur sosial yang mendasari lahirnya tindakan mereka apakah tindakan berkenaan dengan

politik, terorisme, ekonomi maupun sosial budaya.

Referensi

- Denzin K, Norman, 1994, *Handbook of Qualitatif Research*, (London: Sage Publication)
- Durkheim Emile, 1964, *The Rules of Sociological Methods*, (New York: Free Press)
- Faucault, Mitchele, 2002, *Power/Knowledge, Wacana Kuasa/ Pengetahuan*, (Yogyakarta: Bentang)
- Steven Lukes (ed), 1986, *Power*, (Oxford: Basil Blackwell Ltd)
- Giddens, Antony, 1984, *The Constitution of Society, Outline of the Theory of Structuration*, (UK: Polity Press)
- , 1979, *Central Problems in Social Theory*, (London, Macmillan)
- Haugaard, Mark, 1997, *The Constitution of Power, A Theoretical Analysis of Power, Knowledge and Structure*, (British: Machester University Press)
- Johnson, Doyle Paul, 1994, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid I*, (Jakarta: Gramedia)
- Moleong, Lexy, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosada Karya)
- Mahar, Cheelan, dkk, (eds), tt, (*Habitus x Modal*) + *Ranah = Praktik*, (Yogyakarta: Jalasutra)
- Ritzer, George, 2004, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: kencana)
- Weber, Max, 1964, *Economy And Society, An Outline of Interpretive Sociology*, (USA: University of California Free Press, 1964)

Dialektika Wali Nanggroe: Perjuangan Dan Perdamaian Aceh¹

Oleh:

Dr. Muhammad Nazaruddin²

Abstrak

Tulisan ini hendak menyampaikan bahwa konsep tentang Wali Nanggroe dalam posisi kepolitikan Aceh telah menjadi arena kontestasi politik di internal Aceh sendiri dan antara Aceh dan Jakarta. Ada nuansa harapan sekaligus kecurigaan yang melekat dengan pbumian konsep kepemimpinan Wali Nanggroe di Aceh pasca MoU Helsinki 2005. Namun, satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa konsepsi tentang kepemimpinan Wali Nanggroe di Aceh bagian terpenting dari berhasilnya negosiasi kesepakatan RI-GAM. Demikian juga dengan ketuhanan kesepakatan itu.

Kata kunci: Wali Nanggroe, Kesepahaman politik, Perjuangan, Perdamaian.

A. Historical Background dan Relevansi

Bagaimana *historical background* dan relevansi gagasan formalisasi lembaga Wali Nanggroe di Aceh?

Jauh sebelum Dr. Hasan Tiro secara formal memproklamkan Aceh merdeka pada 4 Desember 1976, gagasan tentang pentingnya Aceh menjadi sebuah negara merdeka sendiri telah ia lontarkan melalui percakapan dan tulisan-tulisan ke sidang pendengar dan pembaca.

Gagasan itu ia sandarkan pada fakta sejarah Aceh sebagai sebuah negara berdaulat yang diakui dunia internasional.³ Meskipun faktanya Aceh telah terintegrasi ke Indonesia dari tahun 1945 namun menurut Hasan Tiro proses integrasi itu dianggap tidak sah karena Aceh adalah tetap sebagai negara berdaulat

1. Tulisan ini sebagian pernah disampaikan pada Seminar Mengupas Lembaga Wali Nanggroe. Diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Sosiologi (HIMASOS), Fisip, Universitas Malikussaleh Aceh. Lhokseumawe, 18 Oktober 2012

2. Dosen Fisip Unimal Lhokseumawe, Aceh (nazaruddin_sosiologi@yahoo.com)

3. Hal ini memang dapat dilacak dari beberapa kegiatan diplomasi yang dilakukan Kerajaan Aceh dengan negara sahabat. Lihat M. Nazaruddin "Politik Identitas Perlawanan Aceh". Disertasi UGM 2011. Lihat juga Denys Lombard "Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda". KPG 2007

meskipun kepemimpinannya tidak eksis lagi.

Ia berpandangan bahwa ketika Kerajaan Aceh diperangi Belanda pada tahun 1873 dan ketika posisi Raja Aceh terakhir telah ditawan Belanda maka telah disepakati bahwa Tgk. Chik Ditiro adalah sebagai pemangku Wali Neugara untuk meneruskan kepemimpinan perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda. Sejak saat itu kepemimpinan Aceh dianggap telah berpindah kepada keluarganya.

Meskipun Hasan Tiro bukan turunan garis laki-laki dari keluarga Tgk. Chik Ditiro tetapi karena alasan kapasitas kepemimpinan sebuah perjuangan, pamannya telah menyerahkan tampuk pimpinan tersebut kepada Hasan Tiro sebagai Wali Neugara untuk terus memperjuangkan Aceh mengambil kembali kemerdekaannya dari tangan penjajah.

Atas kepemimpinannya terhadap Gerakan Aceh Merdeka Hasan Tiro memiliki kedudukan dan wewenang sebagai Wali Neugara. Wewenang sebagai Wali Neugara dipahami sebagai naib atau pengganti dari wewenang sebagai kepala negara dalam sebuah negara yang sedang dalam keadaan darurat perang antara dua negara karena kepemimpinan dalam bentuk yang lain belum dapat diwujudkan. Namun jika kemerdekaan telah dapat direbut kembali maka rakyat akan menentukan bagaimana sistem kepemimpinan di Aceh.

Dalam proses perjalanan perjuangannya Hasan Tiro juga didampingi oleh pemimpin-pemimpin lain. Tatkala Hasan Tiro merasa uzur maka kepemimpinan itu pun telah ia serahkan kepada Malik Makhmud Al-Haitar selaku pemangku Wali Nanggroe untuk meneruskan kepemimpinan perjuangan Aceh merdeka yang kala itu ia juga telah menduduki jabatan sebagai Perdana Meuntroe dalam struktur GAM.

Dalam perjalanannya, perjuangan GAM memiliki dinamika yang cukup tajam sampai akhirnya pada tahun 2005 mengantarkan mereka ke meja perundingan (negosiasi) dengan pemerintah RI yang difasilitasi oleh CMI (sebuah LSM internasional pimpinan mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari).

Banyak hal yang telah disepakati dalam perundingan politik itu. Namun ada dua hal yang menjadi point yang lebih penting sebagai kunci bagi GAM menyepakati perdamaian yaitu adanya partai politik lokal dan pelembagaan wali nanggroe secara formal. Meskipun sebelumnya dalam undang-undang 18 tahun 2001 pasal 10 pemerintah RI telah mengakui keberadaan Wali Nanggroe atau Tuha Nanggroe. Namun tentu hal itu dapat ditafsirkan sebagai Wali Nanggroe tandingan versi pemerintah RI untuk mengabsorsi Wali Naggroe versi GAM.

Dalam perjalanannya, baik Wali Nanggroe versi undang-undang no. 18 tahun 2001 pasal 10 maupun Wali Nanggroe versi UUPA no. 11 tahun 2006 pasal 96 kedudukan dan kewenangan Wali Naggroe tidak lebih dari sebagai kepemimpinan adat. Sejauh apa kepemimpinan adat dapat ditafsirkan dalam

konteks kekhasan dan kekhususan Aceh dalam NKRI sangat tergantung pada seberapa besar energi sosio politik dan militansi yang dimiliki oleh Aceh untuk memperjuangkannya.

Komponen pengakuan terhadap keberadaan Wali Nanggroe merupakan elemen penting dari pembagian kewenangan antara pemerintah RI dan GAM (yang kemudian dapat dibaca sebagai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah) sehingga disepakatilah perdamaian itu.

Meskipun Wali Nanggroe Aceh dalam NKRI ternyata berbeda dengan Wali Nanggroe yang dipahami ketika Gerakan Aceh Merdeka masih membara tetapi apakah Wali Nanggroe tersebut dapat memiliki efektifitas terhadap bangunan sistem pemerintahan sendiri yang khas Aceh?

B. KEKHASAN

Kekhasan apa yang dimiliki oleh lembaga Wali Nanggroe dalam konteks pengelolaan pemerintahan di Aceh?

Dalam keseluruhan isi MoU Helsinki yang telah disepakati, pihak GAM memahami bahwa Aceh telah memperoleh kewenangan membentuk sistem tata pemerintahan sendiri (*self government*)⁴. Namun pemahaman itu dapat dianggap sebagai sepihak karena faktanya pemerintah RI sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang sebagai perwujudan dari MoU Helsinki juga tidak menyebutkan Aceh sebagai wilayah dengan sistem pemerintahan sendiri.

Jika dilihat dari keseluruhan isi MoU itu apalagi melihat pasal mengenai pembagian kewenangan sudah jelas disebutkan bahwa pemerintah pusat hanya memiliki enam sektor kewenangan untuk Aceh⁵, selebihnya semuanya menjadi kewenangan pemerintah Aceh. Dalam kewenangan yang luas itulah kemudian dapat ditafsirkan bahwa Aceh tidak cukup hanya memiliki sistem kepemimpinan pemerintahan selevel gubernuran tetapi juga harus memiliki sistem kepemimpinan pemerintahan yang lebih dari itu. Dalam hal ini adalah gagasan sistem kepemimpinan pemerintahan Wali Nanggroe yang tidak hanya direduksi sebagai dan dalam kepemimpinan wilayah adat⁶.

Namun jika terminologi *adat* ditafsirkan dengan kandungan makna dalam konteks historis Aceh maka ia dapat bermakna politik. hal ini disebabkan karena terminologi *adat* dalam ungkapan *badib maja* diletakkan dalam wilayah kewenangan *poe teumeureubom* sebagai raja yang tentu memiliki otoritas kepemimpinan politik dan pemerintahan.

4. Ternyata terminologi *self government* tidak ditemui dalam MoU Helsinki.

5. Lihat MoU Helsinki point: 1.1.2.a.

6. Mengingat istilah *adat* di Aceh memiliki konteks historis tersendiri yaitu ungkapan "*adat bak poe teumeureubom, hukum bak syieb kualah, qanun bak putroe phang, reusam bak laksamana*".

Meskipun dipahami bahwa zaman terus bergerak dan manusianya pun terus berganti sehingga pementasan kehidupan bukanlah suatu replikasi total masa lalu. Tetapi dapatkah manusia itu hidup sepi dari sejarahnya? Yang suka atau tidak telah terlanjur tertanam dalam setiap nafas kita.

Kemampuan inovasi dan transformasi adalah anugrah khas manusia pemberian Tuhan sehingga kehidupan manusia tidaklah bersifat statis tetapi selalu akan berada dalam dialektika perubahan sosial. Disebut dialektika karena sebuah perubahan tidak hanya sebuah dialog tetapi dialog antara masa lalu, masa kini dan masa depan.

C. KONTINUITAS IDENTITAS DAN PERJUANGAN ACEH?

Apakah pengeksistensian lembaga Wali Nanggroe secara formal merupakan salah satu wujud dari kontinuitas identitas keacehan sebagai basis perjuangan bangsa Aceh?

Jika kita membaca dinamika dan pola kehidupan Orang Aceh dalam realitas kehidupan sehari-hari terutama dalam konteks *political everyday life* atau kita membaca literatur-literatur akademik dan komik maka jelas tergambar bahwa Orang Aceh adalah orang memiliki ketegasan (fanatik?) identitas baik personal maupun sosial, dari politik sampai agama.

Ketegasan identitas ini dapat dengan cepat ditransformasikan menjadi instrumen penegasan jati diri dan instrumen perjuangan politik.⁷ Karena itu dalam masa-masa kegalauan atau keterancaman kesadaran identitas telah dapat digunakan sebagai alat untuk menggerakkan massa.

Antara fakta sejarah dengan kesadaran sejarah kadang kala memang tidak selalu seiring sejalan di mana dalam situasi sosial politik yang sedang mengalami anomali kesadaran sejarah menjadi lebih determinan karena dapat digunakan sebagai energi politik. Kesadaran sejarah adalah salah satu dimensi pembentuk kesadaran identitas sosial politik yang dikonstruksi oleh suatu sistem kepemimpinan. Dalam logika ini sistem kepemimpinan pun merupakan suatu konstruksi sosial.

Kesadaran dan ketegasan identitas tidaklah akan menjadi energi sosial politik apa-apa jika tidak ditopang oleh suatu sistem kepemimpinan yang kuat. Bahkan bila sistem kepemimpinan itu hilang maka kesadaran dan identitas suatu keleompok sosial itu pun akan ikut hilang. Sistem kepemimpinan akan terus mereproduksi eksistensi identitas itu sesuai konteks sosial dan dinamika zaman.

Dialektika antara identitas dan kepemimpinan akan melahirkan sintesa

7. Lihat M. Nazaruddin "Politik Identitas Perlawanan Aceh". Disertasi UGM 2011. lihat Anthony Reid "Asal Mula Konflik Aceh". Yayasan Obor Indonesia 2007. Lihat Ibrahim Alfian "Perang di Jalan Allah". Pustaka Sinar Harapan 1984. lihat juga Denys Lombard "Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda". KPG 2007

dinamika sosial dalam kontinuitas menuju peradaban baru bagi suatu komunitas manusia. Dalam konteks ini reproduksi Wali Nanggroe dapat saja merupakan reproduksi sejarah perjuangan bangsa Aceh dalam konteks yang lain. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa sistem perwalian kepemimpinan politik di Aceh hanya dikenal dalam masa ketidak mapanan kondisi politik. Jika logika ini diterima maka sistem perwalian yang masih dianggap perlu bagi Aceh itu harus didasarkan pada thesis bahwa Aceh belum stabil secara politik. Kapan situasi kepolitikan Aceh baru dianggap stabil? Ini merupakan satu teka-teki politik Aceh yang pelik.

Namun di sisi lain kedudukan Wali Nanggroe yang telah disepakati antara GAM dan RI dalam MoU Helsinki hanya menyebut dengan singkat bahwa lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya.⁸ Kalimat ini dapat menimbulkan ruang multitafsir. Salah satu tafsirannya adalah versi Pemerintah Pusat Jakarta yang sudah jelas tersurat sebagaimana yang tertera pada UUPA no. 11 Tahun 2006 BAB XII pasal 96. Bahwa lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat dan bukan lembaga politik.

Di sisi lain sampai saat ini belum dapat kita saksikan bagaimana tafsiran MoU point 1.1.7 menurut versi GAM. Jika dilihat dari sisi komposisi kekuatan politik yang mengisi Parlemen Aceh maka Partai Aceh yang merupakan wujud lain combatan GAM akan memiliki peluang yang besar untuk mempengaruhi dan menentukan keputusan parlemen tentang keberadaan Wali Nanggroe tersebut meskipun rujukan utama Qanun Aceh yang mereka buat adalah UUPA.

Namun karena pihak GAM memiliki komitmen bahwa mereka telah menerima Aceh dalam NKRI maka tafsiran yang dapat memperkuat kewenangan lembaga Wali Nanggrie tersebut paling-paling hanya bagaimana memadukan kelembagaan Wali Nanggroe dalam konteks sistem tata pemerintahan Aceh yang menurut pihak GAM sedang dalam transisi menuju *self government*.

Jadi mereka tidak mungkin misalnya menyebutkan bahwa salah satu tugas Lembaga Wali Nanggroe adalah mempersiapkan dan memberikan pendidikan dan kesadaran politik bagi rakyat Aceh dalam rangka menuju referendum misalnya. Karena hal tersebut akan memiliki kerentanan terhadap perdamaian sebagaimana yang telah disepakati dalam MoU Helsinki 2005. Karena itu rumusan yang paling rasional untuk kelembagaan Wali Nanggroe adalah rumusan yang memiliki logika sebagai simbol perdamaian dan pemersatu Aceh dalam NKRI. Di sisi lain memang tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam politik juga akan muncul pembangkangan politik dari kelompok-kelompok yang telah melakukan *split politik* terhadap kondisi kepolitikan Aceh yang dominan dewasa ini. Rumusan ini didasarkan pada pemahaman bahwa ideologi tak pernah mati.

8. Lihat MoU Helsinki: 1.1.7

D. SIMBOL PERDAMAIAN DAN PEMERSATU ACEH DALAM NKRI?

Adagium; jika anda menginginkan perdamaian maka ada harus siap berperang, tidak berlaku di Aceh dewasa ini. Kenyataannya perdamaian di Aceh dicapai melalui upaya perundingan (negosiasi) dan bukan penaklukan dengan peperangan. Baik GAM maupun RI telah menyadari hal ini sehingga yang paling rasional bagi para pihak adalah melakukan *sharing of power* bagi masing-masing pihak. Dengan demikian maka tercapailah perdamaian Aceh.

Wali Nanggroe yang kemudian akan diformalkan adalah salah satu elemen dari pembagian otoritas tersebut. Formalisasi lembaga Wali Nanggroe tersebut dengan demikian juga bermakna sebagai formalisasi kewenangan Wali Nanggroe. Namun apakah logis bagi sebuah perdamaian politik jika salah satu pihak kemudian hanya memperoleh kewenangan dalam upacara-apacara adat yang sempit? Kemudian juga apakah mungkin jika kewenangan Lembaga Wali nanggroe hanya dibatasi pada pengertian adat yang sempit akan dapat berkontribusi bagi pemantapan perdamaian politik bagi Aceh dalam NKRI? Mari kita fikirkan sebelum semuanya menjadi terlambat!

E. KESIMPULAN

Secara kontemporer rakyat Aceh pada umumnya mendengarkan dan mengenal terminologi Wali Nanggroe adalah sebagai pemimpin tertinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam melawan NKRI. Artinya popularitas Wali Nanggroe melekat dengan gerakan perjuangan atau perlawanan. Namun sekarang ini terminologi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perdamaian Aceh dalam NKRI.

Redefinisi dan reorientasi ini dapat kita lihat bahwa konsepsi tentang Wali Nanggroe adalah sebuah arena kontestasi politik identitas yang dapat saja bermakna sebagai rasionalitas nilai dan atau rasionalitas instrumental yang disandarkan pada rasionalitas tradisional dalam perspektif weberian bagi pihak-pihak tertentu sebagai *political players*. Wassalam

Referensi

Ibrahim Alfian. *Perang di Jalan Allah*. Pustaka Sinar Harapan 1984.

Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. KPG. Jakarta. 2007

M. Nazaruddin. *Politik Identitas Perlawanan Aceh (Studi Reproduksi Identitas Keacehan Oleh Elite GAM)*. Disertasi UGM 2011.

Reid, Anthony. *Asala Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh*. Obor. Jakarta 2005.

Salinan Naskah MoU Helsinki 2005

Perbedaan Perilaku Petani dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Lahan Basah dan Lahan Kering, Daerah Istimewa Yogyakarta

Oleh :

S. Djuni Prihatin, Sunarru Samsi Hariadi dan Mudiyono*

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan perilaku petani dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Perbedaan ini terjadi karena petani di lahan basah sudah merasa aman terbantu dengan fasilitas air namun kurang dalam mengupayakan ketahanan pangan rumah tangga sedangkan petani di lahan kering berjuang untuk mengatasi kekeringan yang terjadi karena kondisi geografis sehingga menyebabkan petani lebih memiliki perilaku daya juang dan motivasi untuk mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang sangat berarti terutama bagi pengembangan kebijakan pemerintah sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga.

Kata kunci : perilaku petani, motivasi dan ketahanan pangan rumah tangga.

A. Pengantar

Pada tahun 2008, Indonesia kembali dapat mencapai swasembada beras, bahkan terdapat surplus padi untuk ekspor sebesar 3 juta ton. Selama periode 2004-2008 pertumbuhan produksi pangan secara konsisten mengalami peningkatan yang signifikan. Produksi padi meningkat rata-rata 2,78 persen per tahun (dari 54,09 juta ton GKG tahun 2004 menjadi 60,28 juta ton GKG tahun 2008, bahkan bila dibanding produksi tahun 2007, produksi padi tahun 2008 meningkat 3,12 juta ton (5,46 persen)). Pencapaian angka produksi padi tersebut merupakan angka tertinggi yang pernah dicapai selama ini (Munif, 2009).

Kondisi swasembada beras nasional ini tidak terlepas pula dari kontribusi peningkatan produksi dari berbagai daerah, termasuk daerah Kabupaten Gunungkidul yang memproduksi 68,38 persen atau 204.058,2 ton (Gunungkidul dalam Angka, 2008) dan Kabupaten Sleman sebesar 250.375 ton (Sleman dalam Angka, 2007). Namun demikian dibalik keberhasilan dalam pencapaian produksi pangan tersebut terdapat 86 desa di DIY mengalami rawan pangan yang disebabkan oleh kemiskinan yang berdampak pada rendahnya akses pangan bagi masyarakat (KR, 20 Juli 2010).

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 tercatat 31,02 juta orang (13,33 persen), sedangkan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan di Indonesia tidak banyak berubah dari Maret 2009 sampai Maret 2010. Pada Maret 2009 tercatat sebesar 20,62 juta penduduk miskin berada di daerah perdesaan begitu juga pada Maret 2010 tercatat sebesar 19,93 juta. Sementara jumlah penduduk miskin propinsi DIY Maret 2010 577.300 orang (16,83 persen) (BPS, 2010), sedangkan penduduk miskin di Kabupaten Sleman sebesar 65.157 KK miskin dan Kabupaten Gunung Kidul sebesar 173.520 jiwa (KR, 5 Oktober 2010). Menurut *Task Force on Hunger* lebih dari separuh mereka yang mengalami rawan pangan dan kelaparan berasal dari keluarga petani miskin (Hadar, 2006).

Khudori (2009) menunjukkan prevalensi gizi buruk 8,3 %. Ini besar sekali, 19 juta rakyat bergizi buruk, yang kurang gizi lebih banyak lagi. Kurangnya upaya peningkatan gizi masyarakat akan mengakibatkan kematian bayi dan anak balita, dan akan menghadapi *the lost generation*. Lahirnya generasi bodoh karena kurang gizi akan mengakibatkan bangsa Indonesia tetap berkubang dalam kemiskinan (Siswono, 2010). Apalagi kalau dikaitkan dengan masih besarnya tingkat kemiskinan di Indonesia, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang bodoh dan terpu-ruk karena persoalan lemahnya ketahanan pangan dan kemiskinan.

Oleh karena itu Mosher (1971) mengungkapkan pentingnya perubahan perilaku merupakan hal yang sangat esensial dalam pembangunan pertanian, adanya perubahan perilaku petani akan meningkatkan produktivitas usahatani. Perilaku petani perlu ditingkatkan agar petani mampu mengelola usaha tani lebih efisien secara teknis dan ekonomis serta mampu mewujudkan ketahanan pangan bagi rumah tangga. Menurut Lewin (1951) terbentuknya perilaku petani dapat dipengaruhi oleh faktor individu (internal) dan lingkungannya (eksternal) atau hasil refleksi atas sejumlah pengalaman belajar terhadap lingkungannya.

Untuk mewujudkan seperti yang diungkapkan oleh Mosher, maka perilaku petani merupakan sesuatu yang esensial untuk meningkatkan produktivitas usaha tani yang dilakukan terutama dalam menciptakan ketahanan pangan rumah tangga. Penelitian dilakukan di lahan basah Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman dan di lahan kering Kecamatan Paliyan, Gunungkidul. Lahan kering yang dimaksudkan adalah lahan pertanian yang mengandalkan sistem tadah hujan

dalam periode panen sedangkan lahan basah adalah pola pertanian yang menggunakan sistem irigasi.

Pada umumnya di kedua lokasi, baik di Moyudan Sleman dan Paliyan, Gunung Kidul sektor pertanian bagi petani pemilik lahan sempit kurang memberikan implikasi positif secara signifikan pada kehidupan rumah tangga petani. Hal ini menunjukkan bahwa untung atau rugi dari hasil produksi bukan penentu utama perilaku petani dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Falsafah Jawa yang sering mereka jadikan pedoman adalah “*Ono Awan Ono Mangan, Ono Dino Ono Upo*” (Ada Siang Ada Makan, Ada Hari Ada Nasi), sehingga sesempit apapun lahan pertanian yang dimilikinya akan tetap ditanami, daripada dibiarkan tanpa penghasilan. Bahkan, lahan tersebut dianggap sebagai warisan yang patut disyukuri dengan cara tetap bertanam. Keterbatasan lahan berbanding dengan hasil panen yang diperoleh. Semakin sempit lahan pertanian maka semakin kecil pula hasil yang diperoleh petani tersebut.

Di Moyudan, petani pemilik lahan sempit rata-rata 500 m² - 800 m², bahkan ada pula yang kurang dari luas lahan di atas. Lahan ini berproduksi sepanjang tahun dengan memanfaatkan irigasi dari bendungan Van Der Wijk. Perilaku petani yang berlahan sempit dalam mewujudkan ketahanan pangan hanya menghasilkan sekitar 3 kuintal gabah dengan waktu kira-kira 5 bulan, hasil panen ini hanya dapat mencukupi kebutuhan cadangan bahan pangan bagi rumah tangga. Bahkan, mereka terkadang harus menambah beras dengan cara membeli sekitar 25 kilogram untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. Ini disebabkan karena masyarakat sudah tidak memiliki sumber bahan pangan lainnya, sementara selera masyarakat telah berubah kearah “beras *minded*”. Sunnaru (2008:361) menambahkan bahwa tantangan rumah tangga petani pada umumnya telah terbiasa makan nasi untuk memenuhi kebutuhan pangan, sementara jagung, sagu, ketela sudah tidak lagi dikonsumsi untuk kebutuhan pokok pangan. Keadaan ini semakin membuat rumah tangga petani senantiasa berjuang untuk memperoleh kebutuhan beras dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang ditempuh dengan berbagai cara. Di sisi lain, perilaku petani harus mampu mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga, sekaligus mencukupi kebutuhan di luar bahan pangan. Guna mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga, perilaku petani di Moyudan melakukan sistem menyakap (Jawa: *maro*). Sistem maro ini adalah petani mengerjakan lahan orang lain dan digunakan sistem bagi hasil, petani penyakap dan pemilik lahan masing-masing mendapat separuh dari hasil panen, tetapi biaya produksi ditanggung oleh petani penyakap.

Dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan anggota keluarganya, perilaku petani di Moyudan memiliki beberapa aktivitas alternatif di luar sektor pertanian, seperti di sektor kerajinan, khususnya kerajinan “*beseke*” (sejenis anyaman bambu). Begitu pula peran ibu juga membantu membuat kerajinan ini. Pekerjaan bapak di luar sektor pertanian sesekali adalah buruh dan tukang. Untuk pekerjaan anak ada pula yang bekerja di restoran, buruh, bengkel dan jasa lainnya.

Kontribusi anak kepada keluarga hanya pada waktu tertentu saja. Mayoritas perilaku petani berlahan sempit di Moyudan berperan sebagai pembuat *beseke*. Dalam satu bulan biasanya mereka dapat membuat 6 kodi *beseke*, tiap kodi dihargai Rp 14.000. dalam satu bulan memperoleh pendapatan tambahan Rp 84.000.

Di Paliyan Gunungkidul, rata-rata kepemilikan lahan yang tergolong sempit dibawah 3000 m²(survei data primer bulan Maret) Lahan pertanian ini hanya ditanami padi satu kali dalam satu tahun, terkadang ada pula yang dapat ditanami hingga dua kali dalam satu tahun dan sisanya ditanami palawija. Aktivitas perilaku petani di sektor pertanian padi di Gunungkidul sangat bergantung dengan turunnya hujan. Dengan demikian, masyarakat Gunungkidul sangat mungkin mengalami rawan pangan ketika hanya mengandalkan sektor pertanian saja.

Sementara perilaku petani dalam mewujudkan ketahanan pangan di Paliyan Gunungkidul dari survei yang dilakukan, ditemukan diversifikasi pekerjaan yang variatif, ini berkaitan dengan faktor alam yang masih menyediakan alternatif tambahan penghasilan. Peran bapak diluar sektor pertanian biasanya membantu proyek padat karya seperti PNPM dan PPK. Selain itu peran bapak juga melakukan pekerjaan sebagai tukang atau hanya sekedar membantu tukang, buruh dan mencari batu. Sementara ibu-ibu memiliki pekerjaan membuat tempe, jualan keliling (jajanan) dan sesekali diminta untuk melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci atau menyetrিকা oleh tetangganya. Aktivitas anak dalam upaya berkontribusi membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan mencari belalang, mencari rumput gajah dan mencari kayu bakar. Hasil pencarian belalang, rumput gajah dan kayu bakar ini kemudian dijual. Hasil dari beberapa alternatif pekerjaan ini diperoleh pendapatan sebesar Rp 5.000 hingga Rp 15.000 setiap hari.

Bagi petani di Moyudan Sleman maupun di Paliyan Gunung Kidul beras telah menjadi bahan pangan utama yang tidak tergantikan oleh apapun. Hal ini mempertegas bahwa perilaku petani dalam mengonsumsi variasi bahan pangan selain beras sudah tidak ditemukan lagi. Jikapun ada, hanya sebagai camilan atau bahan makanan tambahan, yaitu biasanya satu bulan sekali atau satu minggu sekali pada saat persediaan beras mulai berkurang. Akses terhadap bahan pangan, baik beras maupun bahan pangan lain di kedua wilayah, baik di Moyudan maupun Paliyan tidaklah sulit bagi rumah tangga petani. Bahan pangan dapat diperoleh di pasar atau warung di sekitar tempat tinggal mereka. Begitu pula dengan harga bahan pangan tersebut masih terjangkau oleh daya beli rumah tangga petani. Di daerah Moyudan, bahan pangan, terutama beras yang tersedia di pasar berasal dari sekitar wilayah Moyudan sendiri. Sementara, bahan pangan yang tersedia di Paliyan Gunung Kidul mayoritas didatangkan dari luar wilayahnya, yaitu berasal dari Imogiri dan Wonosari. Walaupun demikian, ketersediaan atas bahan pangan selama ini menjamin untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga bagi petani.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perilaku petani dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga di lahan basah dan lahan kering Daerah Istimewa Yogyakarta

C. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

1. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan yang paling banyak dianut oleh Negara-negara di dunia adalah definisi versi Organisasi Pangan Dunia (FAO). Konsep ketahanan pangan FAO dikembangkan sejak pertengahan 1970-an. Pada saat itu ketahanan pangan versi FAO ini hanya berfokus pada masalah ketersediaan pangan, yakni menjamin ketersediaan dan harga pangan utama yang stabil, baik di tingkat internasional maupun nasional. Titik fokus pada aspek ketersediaan pangan sebagai simpul sentral inilah yang di kemudian hari menandai lahirnya sebuah paradigma baru dalam produksi pangan : Revolusi Hijau (Khudori, 2009). Meruyaknya gizi buruk, kelaparan dan krisis pangan mengharuskan FAO untuk memasukkan warga yang rentan dari ekspose kelaparan dalam definisi ketahanan pangan. FAO merumuskan, ketahanan pangan diartikan sebagai situasi yang ada ketika semua orang, sepanjang waktu, mempunyai aspek fisik, sosial dan ekonomi terhadap bahan pangan yang cukup, aman dan bergizi yang sesuai dengan kebutuhan makanan dan makanan yang disukai untuk kehidupan yang aktif dan sehat (Oswald Spring dalam Khudori, 2009). Definisi ketahanan pangan inilah yang diadopsi pemerintah Indonesia dalam UU Pangan No.7 Tahun 1996 dan PP No.68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan. Dikedua produk hukum itu ketahanan pangan diartikan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Merujuk definisi itu, pada dasarnya didalam ketahanan pangan terdapat empat pilar: aspek ketersediaan (*food availability*), aspek stabilitas ketersediaan atau pasokan (*stability of supplies*), aspek keterjangkauan (*access to supplies*) dan aspek konsumsi pangan (*food utilization*). Dengan kata lain, apapun kondisinya, pangan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, baik dimusim panen maupun paceklik, terdistribusi merata di seluruh pelosok negeri, harga terjangkau oleh kantong orang miskin sekalipun, aman serta bermutu (Khudori, 2009).

Ketahanan pangan merupakan suatu hal yang utama dalam pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya pencapaian ketahanan pangan telah menjadi perhatian pada lingkup nasional dan internasional. Kerentanan atas pangan dapat mengakibatkan rendahnya kualitas hidup masyarakat, baik pada aspek fisik-kesehatan, sosial maupun ekonomi. Melihat hal tersebut, upaya mencapai ketahanan pangan pada suatu negara memang bukan persoalan sederhana, yaitu berhubungan dengan orientasi kebijakan atas prioritas pangan yang kom-

prehensif. The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Menyatakan bahwa “..*food security is complex multifaceted issue, concerning not just agriculture, technology and trade, but is also overlaid with multiple political and social considerations?*” (ESCAP, 2009:19).

Di Indonesia persoalan pangan telah menjadi isu utama sejak jaman kerajaan, di mana raja-raja Jawa telah memupuk cadangan bahan pangan. Demikian pula pemerintah kolonial Belanda membentuk badan khusus untuk menangani pengadaan pangan, yaitu *Stichting Het Voedings Middelenfonds* (VMF) (Badan urusan Logistik, 1971; Silitonga, 1997; Dewan Ketahanan Pangan, 2006; Suryana, 2008:2). Pada tahun 1970-an perdebatan ketahanan pangan pada suatu negara mampu menyediakan pangan yang cukup bagi seluruh penduduknya. Pada tahun 1980, fokus kebijakan tidak hanya pada lingkup nasional, namun pada tingkat rumah tangga, bahkan individu (Suryana, 2008:3).

Pada perkembangan awal, ketahanan pangan diartikan menjamin seluruh orang pada setiap waktu terhadap akses pangan dan akses secara ekonomi untuk mendapatkan kebutuhan pangan yang mereka perlukan. Kemudian terdapat perubahan yang membedakan ketersediaan dengan akses, pada akhirnya konsep berkembang dengan memperhatikan faktor lain, seperti nilai gizi, aspek sosial dan latar belakang budaya (ESCAP, 2009:20).

Menyongsong *World Food Summit* dan target *Millenium Development Goals*(MGDs), NCHR sebagai eksekutor hak asasi atas kecukupan pangan dengan tegas menyatakan : *Food Comes First*. Makanan menjadi prioritas utama. Bila pendidikan merupakan penyuaipan pikiran maka makanan merupakan penyuaipan tubuh. Sebelum otak dapat berpikir tubuh harus mendapat makanan terlebih dahulu. World Bank mendefinisikan ketahanan pangan (*food security*) sebagai akses terhadap kecukupan pangan bagi semua orang pada setiap saat untuk memperoleh tubuh yang sehat dan kehidupan yang aktif. Ketahanan pangan mencakup produksi dan ketersediaan pangan, distribusi dan keterjangkauan oleh semua orang, konsumsi individual untuk memenuhi kebutuhan gizi dan monitor kekurangan pangan (*food insecurity*). Ketahanan pangan merupakan alat untuk mewujudkan penerapan hak asasi terhadap kecukupan pangan (Rungkat-Zakaria, 2006:246).

Ketahanan pangan (*food security*) para ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok yaitu ‘ketersediaan pangan’ dan ‘aksesibilitas masyarakat’ terhadap bahan pangan tersebut. Salah satu dari unsur di atas tidak terpenuhi, maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh (Arifin, 2004:31).

Ada tiga pilar yang mendukung bangunan ketahanan pangan. Pertama, ialah ketersediaan pangan sebanyak yang diperlukan oleh masyarakat yang mencakup kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan baik yang berasal dari

produksi, cadangan maupun impor dan ekspor. Kedua, ialah distribusi yang mencakup aksesibilitas pangan antar wilayah dan antar waktu serta stabilitas harga pangan strategis. Ketiga, ialah konsumsi yang mencakup jumlah, mutu gizi/nutrisi, keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan (Suparmo dalam Usman, 2004:66).

Dari definisi tersebut, untuk keperluan praktis dan implementasi kebijakan serta program, dapat diidentifikasi penjabarannya sebagai berikut (Suryana 2001a, 2001b, 2003a; Dewan Ketahanan Pangan 2006; dalam Suryana, 2008:3-4).

Pada tataran kebijakan nasional: (a) pemenuhan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dari hasil produksi sendiri merupakan kebijakan pokok ekonomi pangan nasional; (b) kebijakan penyediaan pangan dari hasil produksi sendiri diperoleh dengan memanfaatkan, melestarikan, dan meningkatkan kapasitas sumber daya secara optimal; dan (c) kebijakan pemerataan pangan antar waktu, antar wilayah, dan antarkelas pendapatan yang ditangani melalui pengelolaan cadangan pangan, distribusi dan harga pangan.

Pada tataran rumah tangga: (a) unit pokok kelompok sasaran ketahanan pangan adalah individu-individu dalam suatu rumah tangga; (b) tolok ukur pencapaian ketahanan pangan adalah terjaminnya aksesibilitas fisik dan ekonomi atas pangan; (c) ketersediaan pangan pada tingkat rumah tangga tersebut harus dapat menjamin agar setiap anggota rumah tangga memperoleh pangan dengan jumlah yang cukup untuk hidup sehat dan produktif.

Pada tataran komoditas: (a) karakteristik pangan yang dikonsumsi diarahkan agar memiliki mutu gizi yang baik untuk kesehatan dan aman (*safety*), serta halal bagi warga muslim; dan (b) walaupun jenis pangan itu beragam dan sangat banyak, yang menjadi titik perhatian untuk ditangani melalui intervensi pemerintah terbatas/dibatasi pada beberapa pangan pokok.

Menurut Nielson (Fatah, 2006:175) bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan diperlukan implementasi strategi yang kokoh dan berkelanjutan kearah pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan *necessary condition* untuk mewujudkan ketahanan pangan, karena pertumbuhan ekonomi berkontribusi terhadap peningkatan produksi dan penguatan posisi dalam perdagangan internasional, yang memungkinkan suatu Negara mengimpor pangan ketika diperlukan. Untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi harus diantarkan melalui pengentasan kemiskinan dan pemerataan. Masyarakat miskin dilibatkan dalam proses pertumbuhan, antara lain dengan cara pengembangan pasar, institusi dan infrastruktur yang dapat diakses oleh mereka.

“Food security for a household is defined as ‘access by all people at all times to enough food for an active, healthy life. Food security includes, at a minimum: (a) the ready availability of nutritionally adequate and safe foods and (b) an assured ability to acquire acceptable foods in

socially acceptable ways (e.g., without resorting to emergency food supplies, scavenging, stealing, or other coping strategies). (National Research Council. 2005:10-11)

Ketahanan pangan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai aksesibilitas oleh seluruh orang pada setiap waktu untuk kecukupan pangan untuk bekerja dan hidup sehat. Ketahanan pangan meliputi, setidaknya pada batas minimum ketersediaan jaminan atas pangan dan kecukupan gizi dan menjamin untuk mampu memperoleh pangan dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Di sini perlu ditekankan bahwa dalam menyediakan jaminan atas pangan perlu dikembangkan sektor pertanian, baik dengan pengembangan kapasitas petani, dukungan teknologi dan kebijakan yang berorientasi pencapaian ketahanan pangan secara komprehensif. Dalam hal kebijakan diharapkan mampu mengakomodasi semua kepentingan, di mana biasanya petani sebagai produsen menjadi korban, sehingga tingkat kesejahteraan mereka tergolong rendah. Persoalan yang dihadapi di Indonesia, bahwa semakin berkurangnya areal garapan per petani, keterbatasan pasokan air irigasi dan mahalnya harga input serta relatif rendahnya harga produk dapat menjadi faktor-faktor pembatas/kendala untuk program peningkatan kesejahteraan (Darwanto dan Ratnaningtyas, 2007).

Pada dasarnya konsep ketahanan pangan dibedakan menjadi empat komponen, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, kegunaan atau fungsi pangan dan kerentanan. Migotto, et.al, menyatakan bahwa “*Conceptually, food security is generally broken down into four different components—availability, access, utilization, and vulnerability—each capturing different, but overlapping, dimensions of the phenomenon.*” (Migotto, et al. dalam Guha-Khasnobis, 2007:15). Komponen di atas hampir mirip dengan empat elemen penting ketahanan pangan yang diutarakan oleh FAO (ESCAP, 2009:20), yang meliputi ketersediaan pangan (*food availability*), aksesibilitas pangan (*food access*), penggunaan (*utilization*) dan stabilitas (*stability*). *Food availability* diartikan ketersediaan kecukupan kuantitas pangan dengan kualitas baik, disediakan melalui produksi sendiri atau impor, termasuk bantuan pangan. *Food access* merupakan akses oleh sumber daya individu cukup untuk mendapatkan bahan pangan yang bergizi. Penggunaan atas bahan pangan yang cukup, air bersih, sanitasi dan pemeliharaan kesehatan untuk dicapai sebuah negara yang memiliki tingkat kecukupan gizi yang baik, di mana kebutuhan psikologis bertemu. *Stability* menjadikan aman pangan bagi penduduk, rumah tangga atau individu harus memiliki akses atas pangan pada setiap saat. Masyarakat seharusnya tidak berisiko kehilangan kemampuan mengakses pangan pada keadaan tertekan, seperti krisis ekonomi atau iklim, atau perputaran musim pertanian. Stabilitas ini membutuhkan ketersediaan dan aksesibilitas bagi masyarakat secara umum.

Konsep ketahanan pangan sudah seharusnya berkaitan dengan aspek keberlanjutannya. Hasil penelitian Darwanto (2005) mengungkapkan bahwa untuk menjamin keberlanjutan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, maka diperlukan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek masih diperlukan kebijakan perlindungan petani dengan pem-

batasan impor, namun hendaknya didukung dengan kebijakan yang mendorong peningkatan produksi domestik melalui upaya peningkatan produktivitas padi terutama di daerah penghasil besar, seperti di Jawa, Sumbar dan Sulsel. Sedangkan untuk daerah penghasil beras perlu dilakukan peningkatan produktivitas dan luas panen, baik dengan perluasan lahan maupun peningkatan intensitas tanam per tahun dengan jaminan ketersediaan irigasi dan input pertanian. Untuk jangka panjang, kebijakan pembatasan impor tersebut dapat dikurangi secara bertahap, namun kebijakan peningkatan produksi domestik masih diperlukan yang disertai pula dengan upaya penganekaragaman konsumsi atau pangan sehingga mengurangi tekanan pada ketersediaan satu macam produk pangan, terutama beras. Pengembangan agroindustri agar sekaligus mendorong berkembangnya agroindustri rumah tangga sehingga meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di perdesaan umumnya dan petani khususnya. Hal ini diharapkan mampu memberikan pandangan jauh ke depan untuk tetap menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat, yaitu terkait dengan aspek teknologi, lahan pertanian dan modal manusianya.

Di Indonesia, subsisten masih menjadi keadaan umum bagi petani, artinya latar belakang mereka beratapencarian sebagai petani memang prioritas untuk kebutuhan konsumsi. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan petani pada aspek ekonomi dapat dikatakan masih cukup jauh untuk tercapai. Perubahan persepsi dan diharapkan mampu merubah perilaku petani yang subsisten menjadi lebih modern, tetapi tetap memproduksi pangan secara maksimal merupakan salah satu cara upaya memperbaiki nasib petani. Sektor pertanian yang subsisten diupayakan menuju ke arah agribisnis, di mana selain kebutuhan akan pangan terpenuhi, tingkat kesejahteraan secara ekonomi juga diperhatikan. Demikian pula hasil penelitian yang dilakukan Adam (2008) menunjukkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga sangat bergantung pada faktor demografi, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Sunnaru (2008:360) menambahkan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Sedangkan untuk suatu wilayah (desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya), suatu wilayah memiliki ketahanan pangan yang baik jika: (1) pangan tersedia cukup, (2) harga pangan stabil, dan (3) ketersediaan secara cukup dan harga yang terjangkau.

Keadaan di atas seperti yang diyakini oleh T. Lang bahwa ketahanan pangan hanya bisa diartikan sebagai hal yang berkelanjutan. Menurut Lang (Lawrence, et al. (ed), 2010:14) syarat-syarat tercapainya ketahanan pangan antara lain:

- a. tujuan utama adalah menyediakan pangan bagi setiap orang secara berkelanjutan, merata dan sesuai dengan nilai gizi;
- b. secara budaya bertujuan mencapai kesesuaian, ketersediaan dan aksesibilitas;
- c. sistem penyediaan pangan dari aspek ekologis yang mampu bertahan menghadapi persoalan atau krisis lingkungan;

- d. sektor pertanian dengan meningkatkan kapasitas lahan;
- e. sistem pangan dengan mengembangkan kapasitas dan keterampilan untuk menjamin bahwa generasi berikutnya dapat menghasilkan bahan pangan dengan cara yang berkelanjutan

2. Perilaku Petani dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Dalam pengertian luas, perilaku manusia meliputi perilaku yang nampak (*overt behaviour*) dan yang tidak nampak (*innert behaviour*). Sebagaimana diketahui bahwa perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisme itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang bersangkutan, baik stimulus eksternal maupun stimulus internal. Namun demikian sebagian terbesar dari perilaku organisme itu sebagai respon terhadap stimulus eksternal. Gambaran tersebut di atas merupakan pandangan yang bersifat behavioristik, di mana individu atau organisme seakan-akan tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan perilakunya karena seakan-akan hubungan stimulus dan respon bersifat mekanistik. Berbeda dengan pandangan kaum behavioris adalah pandangan dari aliran kognitif, yaitu yang memandang perilaku individu merupakan respon dari stimulus, namun dalam diri individu itu ada kemampuan untuk menentukan perilaku yang diambilnya (Walgito, 2009:15). Hubungan stimulus dan respon tidak secara otomatis berpengaruh pada perilaku, namun individu memiliki peran untuk mengambil keputusan atas tindakannya. Skinner (Walgito, 2009: 17) membedakan perilaku menjadi dua, yaitu perilaku alami (*innate behavior*) dan perilaku operan (*operant behavior*). Perilaku alami yaitu perilaku yang dibawa sejak organisme dilahirkan, yaitu berupa refleks-refleks dan insting-insting. Perilaku operan yaitu perilaku yang dibentuk melalui proses belajar.

Perilaku memang tidak dapat dipisahkan dari sikap yang dimiliki individu tersebut terhadap suatu hal yang dihadapinya. Walaupun demikian, hubungan sikap dan perilaku tidak selalu linear, bahkan tidak jarang saling bertentangan. Satu penentu kunci dari kepentingan sikap adalah istilah yang disebut oleh psikolog sosial sebagai kepentingan pribadi (*vested interest*) – sejauh mana sikap tertentu tersebut relevan dengan individu yang memilikinya, obyek atau isu itu memiliki konsekuensi penting bagi orang tersebut. Hasil dari banyak penelitian menunjukkan bahwa semakin besar *vested interest*, maka semakin kuat dampak sikap tersebut pada tingkah laku (Baron dan Byrne, 2004:134). Melihat gambaran di atas memang tidak mudah menentukan atau memprakirakan perilaku seseorang, sebab individu memiliki aspek dan pengalaman historis serta latar belakang yang berbeda.

Menurut Fishbein dan Azjen (1975), agar dapat memprakirakan perilaku adalah dengan memasukkan sekaligus empat faktor, yaitu target, perilaku, *context* dan waktu. Senada dengan tulisan sebelumnya, Fishbein dan Azjen hubun-

gan niat dan perilaku adalah yang paling dekat, yaitu setiap perilaku bebas yang ditentukan kemauan sendiri selalu didahului niat. Keyakinan dalam mengambil keputusan atas perilaku sangat terkait dengan sikap yang ditentukan oleh dua hal. *Pertama*, kepercayaan atau keyakinan (*belief*) tentang konsekuensi-konsekuensi dari perilaku. *Kedua*, evaluasi terhadap konsekuensi-konsekuensi yang ada untuk diri subyek itu sendiri (Sarwono, 2005:245). Lebih jelas bahwa dalam mengambil keputusan dalam berperilaku, seseorang atau individu akan mempertimbangkan berbagai hal. Konsekuensi logis atas perilaku individu tersebut merupakan pertimbangan utama karena berhubungan dengan bagaimana sustainability pemenuhan kebutuhan mereka.

Kurt Lewin (1951) merumuskan suatu model hubungan perilaku yang mengatakan bahwa perilaku adalah fungsi karakteristik individu dan lingkungan. Karakteristik individu meliputi berbagai variabel motif, nilai-nilai, sifat kepribadian dan sikap yang saling berinteraksi pula dengan faktor-faktor lingkungan dalam menentukan perilaku. Faktor lingkungan memiliki kekuatan besar dalam menentukan perilaku, bahkan kadang-kadang kekuatannya lebih besar dari karakteristik individu. Hal inilah yang menyebabkan prediksi perilaku lebih kompleks. Teori tindakan beralasan (*theory of reasoned action*) melihat penyebab perilaku volisional (perilaku yang disebabkan kemauannya sendiri), bahwa perilaku didasarkan pada asumsi-asumsi a) bahwa manusia umumnya melakukan sesuatu dengan cara-cara yang masuk akal, b) bahwa manusia mempertimbangkan semua informasi yang ada, dan c) bahwa secara eksplisit maupun implisit manusia memperhitungkan implikasi tindakan mereka (Azwar, 2005:10-11).

Teori tindakan beralasan mengatakan bahwa sikap memengaruhi perilaku lewat proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, serta dampaknya terbatas pada tiga hal. *Pertama*, perilaku tidak banyak ditentukan sikap umum, tetapi oleh sikap spesifik terhadap sesuatu. *Kedua*, perilaku dipengaruhi tidak hanya sikap tapi juga oleh norma-norma subjektif (*subjective norms*) yaitu keyakinan mengenai apa yang orang inginkan agar diperbuat. *Ketiga*, sikap terhadap suatu perilaku bersama norma-norma subjektif membentuk intensi atau niat untuk berperilaku tertentu (Azwar, 2005:11). Determinasi maupun konsensus yang berkembang di lingkungan masyarakat memiliki pengaruh dalam perilaku individu, dimana keadaan sosial budaya memberikan kerangka keteraturan bagaimana seseorang harus bertindak. Selain itu, adanya informasi mengenai hal-hal baru yang kemudian dianggap relevan dengan kehidupan individu bersangkutan akan menjadi pertimbangan penting dalam memengaruhi perilaku.

Kas dan Rosenzweig (1995) menyebutkan perilaku adalah cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku seseorang dan merupakan hasil kombinasi antara pengembangan anatomis, fisiologis dan psikologis dan pola perilaku dikatakan sebagai tingkah laku yang dipakai seseorang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Perilaku (P) juga merupakan fungsi (F) dari interaksi antara sifat individu (I) dengan lingkungannya (L) yang dapat dilihat dari ucapannya, gerakan dan gaya

seseorang atau $P=F(I.L)$ (Thoha, 1988 :34-35) atau refleksi dari hasil sejumlah pengalaman belajar seseorang terhadap lingkungannya.

Unsur perilaku terdiri atas perilaku yang tidak nampak seperti pengetahuan (*cognitive*) dan sikap (*affective*) serta perilaku yang tampak seperti ketrampilan (*psychomotoric*) dan tindakan nyata (*action*) (Samsudin, 1977). Gabungan dari atribut biologis, psikologis dan pola perilaku actual menghasilkan kepribadian (*character*) yakni kombinasi yang kompleks dari sifat-sifat dan mental, nilai-nilai, sikap, kepercayaan, selera, ambisi, minat, kebiasaan dan ciri-ciri lain yang membentuk suatu diri yang unik (*unique self*).

Pola perilaku orang bisa saja berbeda tetapi proses terjadinya adalah mendasar bagi semua individu, yakni dapat terjadi karena disebabkan, digerakkan dan ditunjukkan pada sasaran (Kas dan Rosenzweig, 1995). Jika pernyataan itu absah (valid) maka perilaku itu tidak dapat spontan dan tanpa tujuan, sehingga harus ada sasaran baik eksplisit maupun implicit. Perilaku kearah sasaran timbul sebagai reaksi terhadap rangsangan (penyebab) yang dapat berupa jarak (*gap*) antara kondisi sekarang dengan kondisi yang diinginkan, dan perilaku yang timbul adalah untuk menutup jarak tersebut. Rangsangan disaring melalui sistem keinginan atau kebutuhan. Tahap rangsangan bisa berubah karena adanya perbedaan persepsi, kognisi dan motivasi, sehingga dapat menyebabkan perbedaan pola perilaku dari rangsangan yang sama.

Teori kognisi percaya bahwa perilaku seseorang itu disebabkan karena adanya rangsangan (stimulus). Pemahaman atas stimulus yang ada membuat orang berusaha untuk mengetahui (*cognition*) dan akhirnya menghasilkan response. Tho-ha (1988:48) juga mengemukakan bahwa kognitif mempunyai fungsi memberikan pengertian pada kognitif baru, menghasilkan emosi, membentuk sikap, dan memberi motivasi terhadap konsekuensi perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan (kognitif) oleh fungsi informasi, dan pengetahuan merupakan faktor yang membentuk perilaku, membentuk sikap dan memberi motivasi.

Teori interaksionis yang dipelopori oleh Erik Erikson (kelompok teori psikoanalisis), Bandura dan Brovenbrener (kelompok teori belajar sosial) bahwa perilaku dianggap sebagai hasil interaksi antara faktor-faktor yang terdapat didalam diri sendiri dan faktor luar. Proses interaksi itu sendiri terjadi pada kesadaran atau kognisi seseorang (Sarwono, 2005). Samsudin (1977) mengemukakan bahwa yang berubah pada perilaku petani adalah pengetahuan, ketrampilan, sikap dan motif tindakan. Berdasarkan teori Kas dan Rosenzweig (1995) tentang terbentuknya perilaku, bahwa perilaku seseorang dapat terjadi karena adanya suatu sebab, dan sebab itu adalah sasaran yang ingin dicapai atau kebutuhan untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Begitu pula perilaku petani dalam ketahanan pangan adalah cara bertindak yang menunjukkan tingkahlaku petani dalam mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik dalam jumlah dan mutu, aman merata,

dan terjangkau oleh daya beli petani. Adapun perilaku petani dalam mewujudkan ketahanan pangan dapat dilakukan melalui bekerja diluar usaha tani, meningkatkan hasil melalui intensifikasi, ekstensifikasi membuat lembaga atau organisasi, menyiapkan kesinambungan penyediaan pangan, dapat menjangkau pangan dan melakukan penganekaragaman konsumsi pangan.

D. Teknik analisis data menggunakan uji anova dengan menggunakan SPSS versi 19.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

E.1.Keadaan Umum Daerah Penelitian

E.1.1. Letak Geografis

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang berada di pulau Jawa. Propinsi DIY terletak 7°.33' - 8°.12' Lintang Selatan dan 110°.00' - 110°.50' Bujur Timur dan memiliki luas 3.185,80 km². Wilayah selatan DIY berbatasan dengan lautan Indonesia, sedangkan sebelah timur laut, tenggara, barat dan barat laut berbatasan dengan propinsi Jawa Tengah yang masing-masing terdiri dari Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang.

Berdasarkan bentang alam, wilayah DIY dapat dibedakan dalam 4 kelompok fisiografi, yaitu Kondisi gunung api Merapi, Pegunungan Selatan atau Pegunungan Seribu, Pegunungan Kulon Progo dan dataran rendah. Kondisi fisiografi tersebut membawa pengaruh terhadap persebaran penduduk, ketersediaan prasarana dan sarana wilayah, dan kegiatan sosial ekonomi penduduk, serta kemajuan pembangunan antar wilayah yang timpang. Daerah-daerah yang relatif datar, seperti wilayah dataran fluvial yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul (khususnya di wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta) adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan memiliki kegiatan sosial ekonomi berintensitas tinggi, sehingga merupakan wilayah yang lebih maju dan berkembang, namun juga banyak terjadi pencemaran lingkungan (DPPKA Pengprov DIY, 2012)

Tabel 1 Satuan Fisiografis DIY

No	Satuan Fisiografi	Luas (± km ²)	Ketinggian
1	Pegunungan Selatan	1.656,25	150-700
2	Gunung berapi Merapi	582,81	80-2.911
3	Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo	215,62	0-80
4	Pegunungan Kulonprogo dan Dataran Rendah selatan	706,25	0-572.

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY, 2012

E.1.2. Keadaan Iklim dan Tanah

Daerah Istimewa Yogyakarta beriklim tropis dengan curah hujan berkisar antara 0,00 mm – 709,00 mm per hari yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Menurut catatan Stasiun Meteorologi Bandara Adisucipto (BPS DIY, 2012), suhu udah rata-rata di DIY menunjukkan angka 27,35° C dengan suhu minimum 19,0° C dan suhu maksimum 36,2° C. curah hujan berkisar antara 0 mm – 1050,0 mm dengan hari hujan per bulan antara 0,0 kali – 27,0 kali. Kelembaban udara tercatat antara 69% - 96%, tekanan udara antara 1.003,4 mb – 1.015,4 mb, dengan arah mata angin antara 60° - 240° dan kecepatan angin antara 1 knot sampai 25 knot.

Berdasarkan data pada Badan Pertanahan Nasional (BPS DIY, 2012), dari 3.185,80 km² luas Daerah Istimewa Yogyakarta, 33,05 % merupakan jenis tanah Lithosol, 27,09 % Regosol, 12,38 % Lathosol, 10,97 % Grumusol, 10,84 % Mediteran, 3,19 % Alluvial, dan 2,47 % adalah tanah jenis Rensina. Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada ketinggian antara 100 – 499 m dari permukaan laut tercatat sebesar 65,65 %, ketinggian kurang dari 100 meter sebesar 28,84 %, ketinggian antara 500 – 999 m sebesar 5,04 % dan ketinggian di atas 1000 m sebesar 0,47 %.

Potensi air tanah dan keberadaan air permukaan satu daerah tidak sama dengan daerah lainnya karena kondisi lahan (geologi, geomorfologi, dan tanah) setiap daerah berbeda. Perbedaan ini akhirnya membawa keberagaman dalam potensi sumberdaya alam dan potensi kebencanaan alam sehingga antara pengembangan sumberdaya alam daerah harus memperhatikan potensi-potensi alam tersebut (Jogjapro, 2010). Pengembangan suatu potensi sumberdaya alam harus memperhatikan sifat dari sumberdaya yang akan dikembangkan, baik sumberdaya alam cadangan (tak terbaharui, misalnya tambang mineral/batuan) atau sebagai sumberdaya alam yang terbaharui (terbaharui, misalnya biota). Dengan kata lain, pengembangan sumberdaya alam harus memperhatikan kesinambungan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan.

E.1.3. Tata Guna Lahan

Tata guna lahan di DIY mengalami banyak perubahan terutama lahan yang dahulunya adalah lahan pertanian menjadi bangunan perumahan, industri dan *shopping centre*. Penyusutan lahan pertanian DIY pada kurun waktu tahun 1992 hingga 2002 semula seluas 61.705 hektar menjadi 58.367 hektar. Dengan demikian, terjadi penyusutan 3.596 hektar selama 10 tahun terakhir ([http://www.kompas.com/lahan pertanian di DIY](http://www.kompas.com/lahan_pertanian_di_DIY)). Pada tahun 2003 luas lahan yang tersisa sekitar 318.580 Hektar, dengan rincian: potensi lahan sawah di DIY adalah 58.210 hektar dan lahan non sawah 260.370 hektar (BPS, 2003). Sedangkan pada tahun 2007 menyusut kembali menjadi berjumlah 57.800 hektar (<http://www.distan.pemda-diy.go.id>).

Tabel 2 Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (hektar)1999 – 2007

Kabupaten/Kota	Luas Lahan Pertanian		Luas lahan b u k a n pertanian	Jumlah
	Sawah	B u k a n Sawah		
Kulonprogo	10.215	36.048	12.364	58.627
Bantul	15.884	9.237	25.564	50.685
Gunungkidul	8.002	104.933	35.601	148.536
Sleman	23.062	16.587	17.833	57.482
Yogyakarta	98	332	2.820	3.250
Provinsi DIY	57.261	167.137	94.182	318.580
DIY Province				
2006	57.661	260.919		318.580
2005	57.762	260.818		318.580
2004	58.050	260.530		318.580
2003	58.210	260.370		318.580
2002	58.367	260.213		318.580
2001	58.608	259.972		318.580
2000	58.858	259.722		318.580
1999	59.742	258.838		318.580

Sumber : Daftar SP-VA, Dinas Pertanian Kab./Kota, Provinsi D.I. Yogyakarta

Menurut data yang dikeluarkan Bappenas, penyusutan lahan pertanian di DIY setiap tahun rata-rata 0,42 persen atau sekitar 182 hektar. Jika dibandingkan dengan rata-rata penyusutan lahan di DIY yang hanya 0,4 persen, angka penyusutan lahan pertanian perkotaan di DIY jauh lebih besar. Penyusutan lahan pertanian perkotaan di DIY mencapai tujuh persen per tahun, dengan kejadian diatas, maka bisa dipastikan produksi pertanian dari tahun ke tahun tidak pernah optimal, serta diprediksi pada tahun 2024 provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bisa mengalami krisis pangan. Penyusutan lahan sedemikian besar itu mengakibatkan tingkat rasio kepemilikan lahan pertanian di DIY per orang hanya 326 m². Karena itu, pemerintah perlu menegakkan peraturan penggunaan lahan pertanian (<http://www.suaramerdeka.com/lahanpertanian> di DIY).

E.1.4. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Propinsi D.I Yogyakarta tahun 2011 berdasarkan cat-

atan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi DIY, berjumlah 3,868,502 jiwa yang tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota, dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu Kabupaten Sleman dengan 1,121,090 jiwa.

Tabel 3 Jumlah Penduduk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk						WNI Dan WNA (L+P)
		WNI			WNA			
		Laki-Laki	Perempuan	L + P	Laki-Laki	Perempuan	L + P	
1.	Kota Yogyakarta	215,315	220,588	435,904	0	0	0	435,904
2.	Bantul	498,430	508,376	1,006,806	16	14	30	1,006,836
3.	Kulonprogo	231,738	238,77	470,508	0	0	0	470,508
4.	Gunungkidul	413,451	420,743	834,194	0	0	0	834,194
5.	Sleman	557,127	563,963	1,121,090	112	109	221	1,121,311
	Jumlah	1,916,062	1,952,440	3,868,502	128	123	251	3,868,753

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi DIY, diolah Bagian Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY.

Keadaan kependudukan propinsi D.I Yogyakarta antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan, dimana jumlah penduduk perempuan lebih besar. Jumlah penduduk laki-laki 1.916.062 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 1.952.440 jiwa, dengan kata lain perbedaannya tidak mencapai 1 persen. Kabupaten/kota propinsi D.I Yogyakarta yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kota Yogyakarta yaitu sebesar 435.904 jiwa. Besarnya jumlah penduduk ini berkaitan dengan keadaan geografis, khususnya seberapa luas wilayahnya.

E.2. Profil Rumah Tangga Petani

E.2.1. Luas Lahan yang Diusahakan

Luas lahan yang dimiliki DI Yogyakarta sekitar 318.580 hektar yang digunakan berbagai fungsi, baik sebagai lahan produktif pertanian maupun perumahan. Berdasarkan data sebelumnya bahwa hanya 57.261 hektar yang diperuntukkan pada sektor pertanian, khususnya area sawah. Luas lahan 167.137 hektar

dipergunakan sebagai lahan pertanian bukan sawah. Pada dasarnya luas area sawah dengan jumlah petani di DIY tidak sebanding, artinya jumlah petani jauh lebih banyak menyebabkan penguasaan lahan pertanian sangat sempit.

Hasil penelitian di DIY menunjukkan penguasaan lahan yang semakin sempit menjadi faktor penyebab utama terjadinya kemiskinan di kalangan petani. Hal ini tidak berbanding linear dengan perubahan jumlah petani, dimana jumlah mereka tidak mengalami penurunan. Sebagian besar petani hanya mengusahakan lahan kurang dari 5000 meter per segi. Bahkan petani yang menguasai lahan kurang dari 1000 meter per segi berkisar empat hingga 28 persen pada seluruh desa (Prawesti, 2012). Sekitar 50 persen petani di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai pendapatan kurang dari Rp 500.000 per bulan (Kurniawan dan Suprihadi, 2012).

E.2.2. Produktivitas Produksi Tanaman Pangan

Pengurangan lahan yang terjadi di DI Yogyakarta setiap tahunnya mencapai 200 hektar untuk fungsi pemukiman. Hal ini mengakibatkan pengurangan hasil panen mencapai 2000 ton padi. Pada 2010 produksi padi DI Yogyakarta sebanyak 823.887 ton dan pada 2011 (Pribadi, 2011) diekspektasikan meningkat menjadi 826.752 ton, tetapi upaya konsistensi produksi ini terhambat karena pengurangan lahan pertanian

E.2.3. Karakteristik Petani Responden

Karakteristik responden yang akan dideskripsikan hasil distribusinya menurut kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir yang dimiliki, jenis pekerjaan, lahan yang dikuasai, kedudukan dan lumbung padi. Sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah petani, baik yang ada di lahan kering maupun di lahan basah.

Umur Petani Responden

Tabel. 4. Distribusi Responden Berdasarkan Umur

Umur Petani (Tahun)	Lahan Basah		Lahan Kering	
	Jumlah Petani (Orang)	Persentase (%)	Jumlah Petani (Orang)	Persentase (%)
21-30	2	1,6	1	0,8
31-40	10	8,0	24	19,2
41-50	28	22,4	45	36,0
51-60	45	36,0	30	24,0
61-70	28	22,4	21	16,8
71-80	11	8,8	3	2,4

81-90	1	0,8	1	0,8
Jumlah	125	100	125	100

Sumber : Analisis data primer, 2012

Responden penelitian menunjukkan variasi usia yang beragam. Petani responden di lahan kering dan basah terlihat struktur yang berbeda. Petani lansia yang telah memasuki masa usia lanjut antara lahan basah dan kering masing-masing 32,2 persen lahan basah dan 20,0 persen lahan kering, sisanya adalah mereka yang masih berusia produktif. Dari tabel tersebut, menarik ketika melihat struktur usia muda antara 21-40 tahun, dimana perbedaan mencapai 11,2 persen, yaitu 9,6 persen di lahan basah dan 20,8 persen di lahan kering. Keadaan ini menunjukkan bahwa ketertarikan usia produktif muda pada sektor pertanian terdapat perbedaan, dimana petani responden pada lahan basah tidak terlalu berminat dengan sektor pertanian dibandingkan responden pada lahan kering, dengan kata lain mereka lebih memilih sektor lain selain pertanian. Hal ini dimungkinkan karena ada berbagai alternatif pekerjaan yang tersedia di luar sektor pertanian.

Jenis Kelamin Petani Responden

Tabel. 5. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Lahan Basah		Lahan Kering	
	Jumlah Petani (Orang)	Persentase (%)	Jumlah Petani (Orang)	Persentase (%)
Laki-laki	108	86.40	107	85.60
Perempuan	17	13.60	18	14.40
Jumlah	125	100	125	100

Sumber : Analisis data primer, 2012

Jumlah keseluruhan responden mencapai 250 responden yang meliputi petani responden dari wilayah lahan basah dan kering, dimana masing-masing 125 petani responden. Lahan basah meliputi petani yang bertempat tinggal di Moyudan, sedangkan untuk lahan kering adalah petani yang bertempat tinggal di wilayah Gunungkidul. Melihat prosentase responden bahwa jenis kelamin laki-laki masih mendominasi total responden yang diambil, baik di lahan basah maupun kering yang masing-masing 86,40 persen dan 85,60 persen. Keadaan ini menunjukkan petani utama yang dilakukan di wilayah di atas didominasi oleh masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki atau dengan kata lain sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama.

Pendidikan Petani Responden

Tabel. 6. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Petani	Lahan Basah		Lahan Kering	
	Jumlah Petani (Orang)	Persentase (%)	Jumlah Petani (Orang)	Persentase (%)
Tidak sekolah (0 tahun)	8	6.40	17	13.60
SD (1-6 tahun)	63	50.40	83	66.40
SLTP (7-9 tahun)	23	18.40	17	13.60
SLTA (10-12 tahun)	30	24.80	8	6.40
Perguruan Tinggi (> 12 tahun)	1	0.80	0	0.00
Jumlah	125	100,00	125	100,00

Sumber : Analisis data primer, 2012

Melihat struktur pendidikan petani responden di kedua wilayah menunjukkan mayoritas pendidikan yang sama yaitu didominasi petani yang berpendidikan SD. Kedua wilayah tersebut memiliki prosentase petani yang berpendidikan SD tertinggi, lahan basah dan kering masing-masing 50,4 persen dan 66,4 persen. Secara umum, petani di wilayah lahan basah memiliki struktur pendidikan yang lebih baik dari petani di lahan kering. Petani di lahan kering dominan absolut hanya memiliki tingkat pendidikan maksimal hanya SLTP/ sederajat, dimana petani yang berpendidikan mencapai SLTA hanya 6,4 persen dan tidak ada yang lulusan perguruan tinggi. Kondisi geografis yang lebih sulit di lahan kering mungkin menjadi faktor yang juga menyebabkan rendahnya akses masyarakat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

Pekerjaan Petani Responden Dalam Kelompok Tani

Tabel. 7. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan

P e k e r j a a n Petani	Lahan Basah		Lahan Kering	
	Jumlah Petani (Orang)	Persentase (%)	Jumlah Petani (Orang)	Persentase (%)
Buruh Tani	63	50.40	24	19.20
Petani	62	49.60	101	80.80
Jumlah	125	100,00	125	100,00

Sumber : Analisis data primer, 2012

Pekerjaan kelompok tani menjadi elemen utama dalam proses sirkulasi produksi pertanian. Seluruh petani melibatkan pekerjaan kelompok tani dalam proses produksi lahan pertanian mereka, seperti pembelian benih dan pupuk serta sesekali terdapat penyuluhan mengenai sarana produksi pertanian sehingga petani mampu mengikuti perkembangan teknologi pada pertanian. Dari tabel 4.7 tersebut, ternyata ada sedikit perbedaan mengenai distribusi responden berdasarkan pekerjaan. Di lahan basah, sebagian besar responden ternyata buruh tani yaitu 50, 40 % sedangkan yang petani 49.60. Kemudian untuk lahan kering mayoritas petani adalah 80.80 sedangkan buruh tani 19.20. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan lahan basah ternyata lebih banyak diminati sehingga banyak tanah tersebut dimiliki oleh orang lain dan kemudian mempekerjakan masyarakat lokal sebagai buruh tani.

Luas Penguasaan Lahan Pertanian Petani Responden

Tabel. 8. Distribusi Responden Berdasarkan Luas Lahan

Luas Lahan (m ²)	Lahan Basah		Lahan Kering	
	Jumlah Petani (Orang)	Persentase (%)	Jumlah Petani (Orang)	Persentase (%)
0-500	45	36.0	58	46.4
501-2000	55	44.0	45	36.0
2001-3500	15	12.0	12	9.6
3501-5000	6	4.8	5	4.0
>5000	4	3.2	5	4.0
Jumlah	125	100	125	100

Sumber : Analisis data primer, 2012

Petani di wilayah lahan basah maupun kering tidak menguasai lahan yang luas. Hal ini berkaitan dengan faktor pembangunan wilayah dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas penguasaan lahan mayoritas hanya berkisar 0-500 m² dan 501-2000 m². Penguasaan lahan oleh petani lahan basah yang memiliki 0-500 m² mencapai 36,0 persen dan kepemilikan lahan 501-2000 m² mencapai 44,0 persen, dengan kata lain secara keseluruhan prosentase mereka telah menyentuh angka 80,0 persen. Penguasaan lahan petani lahan kering dengan kepemilikan lahan 0-500 m² dan 501-2000 m² masing-masing mencapai 46,4 persen dan 36,0 persen, dimana total prosentase mencapai 82,4 persen. Pada dasarnya status petani responden mayoritas adalah sebagai petani yang memiliki luas lahan tanah yang tidak luas. Kepemilikan lahan yang tidak luas ini tentunya akan berpengaruh pada minimnya hasil produksi pertanian yang dihasilkan oleh petani.

F. Perbedaan perilaku petani dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga di lahan kering dan lahan basah

Berdasarkan hipotesis yang diajukan, menyatakan bahwa terdapat perbedaan perilaku petani dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga di lahan kering dan lahan basah. Pengujian hipotesis untuk membuktikan adanya perbedaan tersebut dengan menggunakan analisis varian (anova) dengan bantuan *SPSS for windows versi 19*. Hasilnya sebagai berikut.

Tabel. 9. Hasil analisis perbedaan perilaku petani dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga di lahan kering dan lahan basah

Variabel	Lahan kering		Lahan basah		F Hitung	Tingkat kesalahan (p)
	Rata-rata	Standar deviasi	Rata-rata	Standar deviasi		
Perilaku petani	16,0720	5,04204	12,0480	4,62088	43.273	0.000*

Keterangan: Nilai F Tabel = 3,879; *) Signifikan $\alpha < 5\%$;

Sumber: Analisis data primer, 2012

Berdasarkan hasil analisis anova untuk mengetahui perbedaan perilaku petani dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga, diduga bahwa terdapat perbedaan perilaku petani dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga di lahan kering dan lahan basah. Berdasarkan hasil uji varian (anova) diperoleh nilai $F_{hitung} (43.273) > nilai F_{tabel} (3,879)$ pada tingkat kesalahan (p) $0,000 < 0,05$, karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 5%, maka signifikan yang artinya terdapat perbedaan.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perilaku petani dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga di lahan kering dan lahan basah. Perilaku petani lahan kering lebih kuat dibandingkan perilaku petani lahan basah, hal ini dilihat dari nilai rerata perilaku petani lahan kering sebesar 16,0720 lebih besar dibandingkan nilai rerata perilaku petani di lahan basah sebesar 12,0480. Hal ini dapat dipahami karena di lahan kering petani sangat tertantang dengan realitas keadaan geografis yang kurang menguntungkan sehingga dengan keadaan ini lebih memacu semangat dan daya juang yang tinggi untuk mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Dengan demikian, petani-petani di lahan kering biasanya memiliki tingkat survivalitas dan keuletan yang tinggi di dalam bertahan hidup dan mewujudkan ketahanan pangan

G. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

Terdapat perbedaan perilaku petani dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga di lahan kering dan lahan basah, dibuktikan dengan hasil analisis uji anova. **Perilaku petani lahan kering (Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul) lebih kuat dibandingkan perilaku petani lahan basah (Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman)**, hal ini dilihat dari nilai rerata perilaku petani lahan kering sebesar 16,0720 lebih besar dibandingkan nilai rerata perilaku petani di lahan basah sebesar 12,0480. Hal ini dapat dipahami karena di lahan kering petani sangat tertantang dengan realitas keadaan geografis yang kurang menguntungkan dan strategis untuk lahan pertanian, sehingga dengan keadaan ini lebih memacu semangat dan daya juang yang tinggi untuk mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga para petani. Selain itu para petani di lahan kering memiliki potensi yang sangat bervariasi dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan menanam palawija, bukan hanya menanam padi. Sedangkan perilaku petani di lahan basah merasa dalam posisi aman karena lahan basah memiliki ketersediaan air yang melimpah (sistem irigasi), teratur dan memadai untuk menanam padi, sehingga menyebabkan perilaku petani di lahan basah lebih rendah daripada perilaku petani di lahan kering dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga.

Referensi

- Adam, Felecia P. 2008. *Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Wilayah Pulau Kecil (Studi Kasus di Kabupaten Maluku Tenggara Barat)*. Tesis Program Studi Kependudukan Jurusan Antar Bidang Pascasarjana UGM. Tidak dipublikasikan
- Arifin, Bustanul. 2004. *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Azwar, Saifuddin. 2005. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Baron, Robert A dan Donn Byrne. 2004. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Darwanto, D.H. dan Ratnaningtyas, P.Y. (2007). *Kesejahteraan Petani Dan Peningkatan Ketersediaan Pangan: Sebuah Dilemma?*. Jurnal Ekonomi Rakyat. Tersedia <http://www.ekonomi.rakyat.org/pangan%20halal/kesejahteraan%20n%20keter%20pangan.htm>. diakses 29 Desember 2010
- Dewan Ketahanan Pangan. 2002. PP Tentang Ketahanan Pangan. Dalam Kan-

tor ketahanan pangan. 2005. Ketahanan Pangan. Diambil dari http://ketahananpangan.cirebonkota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=1. Pada tanggal 20 Januari 2010 pada pukul 15.45 WIB

Darwanto, Dwijono H., 2005. *Ketahanan Pangan Berbasis Produksi dan Kesejahteraan Petani*. Dalam Jurnal Ilmu Pertanian Vol.12. No.2, hal: 152-164

Fatah, Luthfi. 2006. *Dinamika Pembangunan Pertanian Pedesaan*. Kalimantan Selatan: Jurusan Sosek Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat dengan Pustaka Banua, Banjarbaru

Fishbein, M and Azjen I, 1975, *Beliefs, Attitude, Intention and Behavior*, Philipines.

Guha-Khasnobis, Basudeb, Shabd S. Acharya and Benjamin Davis (ed). 2007. *Food Security*. New York: Oxford University Press

Gunung Kidul dalam Angka tahun 2008

Hadar, Ivan A, *Hak Atas Pangan*, Kompas 15 Desember

Kas, Fremon E dan Rosenzweig, James E, 1995, *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara

Khudori. *Political Will Pemerintah Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Melalui Diversifikasi Pangan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Mewujudkan Kedaulatan Pangan Indonesia Melalui Diversifikasi Pangan, 21 Maret 2009 oleh Gama Cendekia UGM Yogyakarta

Lawrence, Geoffrey, Kristen Lyons and Tabatha Wallington (ed). 2010. *Food Security, Nutrition and Sustainability*. London: Earthscani

Lewin, Kurt, 1951, *Fields Theory in Social Science*, New York : Harper

Mosher, Arhur T. 1971. *To Create a Modern Agriculture: Organization and Planning*. New York: Agricultural Development Council

Rungkat-Zakaria, Fransisca. 2006. *Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban*. Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara

Samsudin. 1977. *Dasar-dasar Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian*. Bandung: Bina-cipta

Sarwono, Sarlito Wirawan. 2005. *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka

Siswono Yudo Husodo. *Ketahanan Pangan: Kebijakan Tantangan dan Harapan*

Masa Depan, Makalah disampaikan dalam seminar Ketahanan Pangan dalam Perspektif Sejarah, 5 Mei 2010 di University Club UGM Yogyakarta

Sleman dalam Angka tahun 2007

Sunnaru, Samsi Hariadi. 2008. *Pengembangan Kelembagaan Untuk Ketahanan Pangan Nasional*. dalam Prosiding Dies Natalis ke-62 Faperta UGM Yogyakarta "Kedaulatan Pangan Untuk Kedaulatan Negara". UGM Yogyakarta: Fakultas Pertanian UGM

Thoha, Mifta. 1988. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). 2009. *Sustainable Agriculture, Food Security in The Asian and The Pasivic*. The United Nation: ESCAP

Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Usman, Sunyoto. 2004. *Politik Pangan*. Yogyakarta: Cired

Walgito, Bimo. 2009 (IV). *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Bacaan lain :

BPS. 2010. Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2010. No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010. diakses http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan-01jul10.pdf tanggal 4 Oktober 2010 pukul 11.41 WIB

... Perilaku Petani Pangan. Hal.129. Dalam <http://lecture.brawijaya.ac.id/nuh-fil/files/2009/02/8prilaku-petani-pangan-jadi.pdf> diakses pada tanggal 7 Februari 2010

Munif, Abdul. 2009. *Strategi dan Pencapaian Swasembada Pangan Indonesia*. Dipresentasi pada acara Seminar on Agricultural Sciences (SAS) 2009 di Tokyo University of Agriculture (Setayaga Campus), tanggal 22 Februari 2009

Kedaulatan Rakyat. *86 Desa di DIY Rawan Pangan*. Artikel berita KR edisi Selasa Wage 20 Juli 2010.

Kedaulatan Rakyat. Gunung Kidul Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan 50 Persen. Artikel berita edisi Tanggal 05 Oktober 2010, diakses dari <http://www.krjogja.com/krjogja/news/detail/52813/Gunungkidul.Targetkan.Penurunan.Angka.Kemiskinan.50.Persen.html> pada tanggal 06 Oktober 2010

*Drs.S.Djuni Prihatin, MSi adalah mahasiswa S3 Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan UGM. Prof.Dr.Ir. Sunarru Samsi Hariadi, MS adalah Dosen S3 Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan UGM selaku Promotor dan Prof.Dr. Mudyono adalah Dosen S3 Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan UGM selaku Co-Promotor.

*)Naskah ini merupakan bagian dari Disertasi penulis.

Paradigma Pembangunan Pertanian: Pertanian Berkelanjutan Berbasis Petani Dalam Perspektif Sosiologis

Oleh : Mahmuddin¹

Abstrak

Tidak ada kegiatan ekonomi Indonesia yang memiliki kisah semuram sektor pertanian. Dari masalah bencana alam hingga masalah runyamnya pelaku pembangunan pertanian (petani) atas berbagai program yang dikembangkan pemerintah terhadap sektor pertanian. Sejarah pertanian Indonesia adalah sejarah penyimpangan. Penyimpangan inilah yang telah mewariskan pokok-pokok persoalan struktural di sektor pertanian yang masih terus bertaban hingga saat ini. Berbagai program yang diterapkan tidak hanya berdampak positif bagi pembangunan, namun juga meninggalkan kepincangan yang cukup berarti dalam pembangunan pertanian. Perkembangan ragam paradigma pembangunan pertanian yang kemudian lebih dikenal sebagai basis pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan salah satu jawaban atas ketidakmampuan paradigma revolusi hijau yang menyisakan berbagai polemik atas persoalan pertanian di tanah air.

Kata Kunci : Pembangunan Pertanian, Revolusi Hijau, Pertanian Berkelanjutan

A. Pendahuluan

Pembicaraan atau diskusi masalah pembangunan pertanian bukanlah barang baru bagi masyarakat. Bukan hanya kaum ilmuwan, budayawan namun juga politikus hingga pelaku pertanian sendiri (petani) mempunyai ragam pemikiran terhadap masalah pembangunan pertanian. Keberhasilan revolusi hijau yang didevakan pemerintah orde baru misalnya, selain mampu meningkatkan swasembada pangan dan terbebas dari masalah kelaparan, namun tidak luput juga perubahan radikal yang dialami petani lewat revolusi hijau. Dari persoalan rusaknya agro-ecosistem persawahan, merebaknya penggunaan pestisida yang berlebih sehingga serangan hama yang cukup tinggi hingga trauma sosial psikologi akibat ketergantungan dari kebijakan pemerintah pusat terhadap pembangunan pertanian.

Perubahan paradigma pembangunan pertanian pada awalnya sudah dimulai sejak tahun 1920-an dimana tumbuh rasa kesadaran untuk mempertimbangkan aspek biologi dan ekologi dalam pengelolaan industri pertanian. Pada tahun 1930-an di Amerika muncul konsep pertanian lingkungan sebagai solusi atas ke-

1. Dosen Dakwah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

munduran produktivitas lahan dan bencana erosi yang melanda beberapa negara bagian. Tahun 1940-an mulailah berkembang konsep keseimbangan antara penggunaan teknologi kimia dan biologi pada sektor pertanian. Tahap perkembangan ini terus mengalami kemajuan yang pesat hingga penggunaan bahan kimia dan teknologi pertanian terus meningkat pada dekade 1970-an.

Kebijakan ini pula yang ikut mempengaruhi format pertanian di Indonesia. Konsep pertumbuhan yang berorientasi ekonomi dengan melakukan suntikan besar-besaran terhadap berbagai peningkatan usaha tani mulai dari subsidi harga pupuk, pemberian bibit cuma-cuma memperkenalkan teknologi usaha produksi pertanian hingga gencarnya penyuluhan pertanian yang membawa perubahan radikal di komunitas petani untuk beralih dari pola pertanian tradisional (subsisten) ke pertanian modern.

Kendatipun demikian niat baik yang dilakukan pemerintah tidak hanya berdampak peningkatan laju pertumbuhan ekonomi bangsa, namun sekaligus secara tidak sengaja menyebabkan timbulnya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah dan sekaligus mematikan nilai-nilai lokal petani dalam pembangunan pertanian yang digantikan oleh jargon ekonomi global yang meniadakan hubungan manusia dengan ekosistem alam sebagai hubungan yang simetris dan bukan saling ketergantungan satu sama lain.

Kondisi inilah yang memunculkan sigma dari banyak pihak untuk memikirkan ulang pola pembangunan pertanian yang tidak hanya menguntungkan bagi pelaku sendiri dalam hal petani, namun juga sekaligus mampu membangun hubungan sinergis aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pembangunan pertanian. Berangkat dari hal tersebut, tulisan singkat ini diarahkan untuk menjembatani paradigma yang sudah banyak diterapkan dinegara berkembang lain dengan sistem pembangunan pertanian berkelanjutan sebagai jawaban atas persoalan semua persoalan pembangunan pertanian yang berkembang di Indonesia sejak masa warisan kolonial dari pemerintah Belanda hingga jargon pendewaan revolusi hijau pada masa pemerintahan orde baru.

B. Pertanian Indonesia : Catatan Historis

Sejarah pertanian Indonesia adalah sejarah penyimpangan. Penyimpangan inilah yang telah mewariskan pokok-pokok persoalan struktural di sektor pertanian yang masih terus bertahan hingga saat ini. Apabila menelusuri lebih jauh pertanian yang berkembang di Indonesia dari waktu ke waktu selalu mengalami berbagai pasang surut. Pertanian yang selalu digaungkan sebagai dasar perekonomian kerakyatan yang pada awalnya sangat diandalkan dalam menopang sendi-sendi pembanguan bangsa, akhirnya mengalami berbagai gejala di dalamnya. Penyebabnya adalah dari berbagai kebijakan negara yang justru menciptakan keadaan yang secara tidak sengaja malah tidak menguntungkan bagi petani. Kebijakan struktural yang seharusnya diharapkan banyak pihak mampu menyele-

saikan masalah pertanian di Indonesia malahan harus terjebak dengan berbagai persoalan kompleks yang tidak menguntungkan petani sebagai pelaku pertanian. Kebijakan-kebijakan tersebut hanya memberatkan petani dan menguntungkan bagi negara dan pengusaha yang terlibat dalam modernisasi pertanian. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa masalah dialektika pertanian di Indonesia tidak terlepas dari unsur kesejarahan yang mempengaruhinya.

Sejarah pertanian adalah bagian dari sejarah kebudayaan manusia. Pertanian muncul ketika suatu masyarakat mampu untuk menjaga ketersediaan pangan bagi dirinya sendiri. Pertanian memaksa suatu kelompok orang untuk menetap dan dengan demikian mendorong kemunculan peradaban. Terjadi perubahan dalam sistem kepercayaan, pengembangan alat-alat pendukung kehidupan, dan juga kesenian akibat diadopsinya teknologi pertanian. Koentjaraningrat (dalam Raharjo, 2004) menyebutkan semenjak keberadaan manusia kira-kira dua juta tahun yang lalu, manusia baru mengenal cocok taman sekitar 10.000 tahun yang lalu. Sebelumnya cara hidup manusia masih dalam taraf *food gathering economics* seperti berburu, menangkap ikan dan meramu. Dengan berkembangnya cocok tanam memaksa manusia untuk hidup menetap disuatu tempat untuk menjaga dan menunggu panen. Proses awal yang dilakukan manusia telah memungkinkan terjadinya akumulasi pengetahuan dan tata perilaku bersama yang terwujud dalam pola kebudayaan bercocok tanam. Sehingga tidak mengherankan seperti disebutkan Childe, peristiwa penemuan cocok tanam merupakan revolusi kebudayaan. Makna revolusi kebudayaan juga berkaitan dengan kenyataan bahwa dengan ditemukannya pertanian bukan hanya menyebabkan munculnya daerah desa namun juga lebih lanjut terhadap munculnya kota.

1. Pertanian pada masa kerajaan kuno

Manakala merunut alur sejarah pertanian di Indonesia bahwa pertanian yang berkembang saat sekarang ini tidak terlalu jauh parameternya sistem pertanian pada masa taman paksa 1830-1870 atau bahkan pada zaman pemerintahan Mataram. Ini berarti bahwa model pertanian yang dilakukan petani sama sekali tidak mengalami perubahan selama 600 tahun ini. Yang dimaksudkan adalah bahwa mental petani dalam melakukan pekerjaan pertanian yaitu dengan mengolah dan menanami tanahnya selalu merupakan fungsi atau berkaitan dengan motivasi petani dan berhubungan dengan harapan yang ada. Dan harapan ini selalu berhubungan dengan apa yang dijanjikan pemerintah.

Adalah hal yang menarik dengan apa yang disebutkan Raffles, bahwa pemerintahan Belanda sama sekali acuh tidak acuh mengenai masalah pertanian dan petani khususnya. Karena tambahnya kesalahan yang dilakukan pemerintah Belanda terlalu banyak terkait dengan perantara sehingga aspek pertanian yang dibangun lebih bersifat feodal dan menekan (Mubyaro, 1987; Booth, 1988).

Hal sebaliknya dapat dicermati sebelum pemerintahan Belanda datang, dimana sistem bertanam padi dengan pola pengairan merupakan hal yang su-

dah dipraktekan secara turun termurun. Karenanya, beberapa ahli asing melihat bahwa sebelum abad masehi penduduk Melayu di Jawa mengolah padi sawah pada pengairan yang berteras-teras.

Bertani adalah kehidupan pokok rakyat dan pemerintah memperoleh sumber penerimaannya semata-mata dari pertanian. Penerimaan negara terutama terdiri atas pembayaran *in natura* dan jasa-jasa tenaga penggarapa tanah. Ini berarti bahwa sebagai *kawula* rakyat kecil harus menyisihkan sebagian hasil panen dan waktunya bagi keperluan raja, kerajaan dan atasan. Pembayaran inilah sebagai bukti bahwa mereka merupakan *kawula* dari suatu negara dan dianggap sebagai imbalan dari serangan musuh atas gangguan keamanan lainnya. Menurut Pigeaud (dalam Hutapea, 1986) adanya lapisan yang muncul dalam masyarakat sangat penting peranannya di dalam ekonomi kerajaan-kerajaan Jawa, kehilangan statusnya sebagai warga masyarakat yang bebas antara lain oleh karena perang, dihukum oleh raja atau tidak mampu membayar hutang. Adanya lapisan dengan jumlah anggota yang besar lebih memudahkan raja untuk melaksanakan kegiatan pembangunan.

Bila menyimak campur tangan pemerintah secara langsung dalam memajukan pertanian realitanya samasekali tidak ada. Pertanian adalah urusan petani. Pemerintah tidak menganggap perlu dan rupanya juga tidak dianggap perlu untuk mengetahui hal ihwal masalah pertanian. Sehingga pada masa kerajaan tidak terbayangkan bahwa para raja atau pangeran berkunjung ke desa dan berdialog dengan petani. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa, petinggi atau tokoh di desa. Hirarkhi pemerintahan cukup berlapis dan otonom amat kentara pada semua tingkat walaupun semua pejabat selalu berorientasi ke atas, yaitu berusaha menyenangkan pejabat atasannya. Hal ini barangkali tidak terlepas dari analisis yang dilakukan Wittfogel yang membedakan pola birokrasi kerajaan Mataram dengan birokrasi negara-negara Timur berhubungan dengan masalah pertanian. Perbedaan antara birokrasi kerajaan Mataram dan negara Timur dapat dilihat dari hubungan antara petani dan pemerintah di atasnya. Keadaan lingkungan di Jawa, memungkinkan petani untuk membangun sendiri jaringan irigasi dengan memanfaatkan mata air serta aliran sungai. Hal ini berbeda wilayah dengan negara-negara Timur dimana pertanian sangat tergantung dengan jaringan irigasi besar yang memanfaatkan sungai besar. Pembangunan jaringan irigasi yang besar memungkinkan munculnya birokrasi dalam proses pembangunan. Pemilikan ini menyebabkan para petani tergantung kepada birokrasi yang bersangkutan.

Kendatipun demikian, ada sisi lain yang menyebabkan munculnya kezaliman kerajaan Mataram dimana terletak di dalam tuntutan yang berat dari penguasa kerajaan kepada petani. Tuntutan tersebut tidak terlepas dari faktor historis kerajaan sebelumnya. Atas alasan inilah Pigeaud menyebut kerajaan Mataram sebagai kerajaan yang zalim dalam masalah hubungan kerajaan dengan petani. Kerajaan Mataram mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari kerajaan sebelumnya dan atas dasar kekuasaan tersebut dapat memberikan tuntutan serta te-

kanan yang lebih berat kepada para petani.

2. Pertanian Pada Masa Penjajahan

Pada masa ini sangat terkait dengan periodisasi di bawah struktur kolonialisme pemerintahan Belanda yang lebih kurang 350 terhadap kompleksitasnya pertanian di Indonesia. Pada masa ini periodisasi tersebut dapat dibagi kepada : (1) zaman VOC 1600-1800 (2) zaman kekacauan dan ketidakpastian 1800-1830 (3) zaman tanam paksa 1830-1850 (4) zaman peralihan ke liberalisme 1850-1870 (5) zaman liberalisme 1870-1900 (6) zaman politik etik 1900-1930 (7) zaman dipresi dan perang 1930-1945 (Booth, 1988; Atmosudirdjo, 1983).

Pembagian periode ini memberi gambaran umum atas keadaan pertanian di Indonesia selama 350 tahun jelas menunjukkan model pertanian yang semuanya ditujukan untuk kepentingan dan keuntungan sebesar-besarnya bagi penjajah. Pada masa ini format pertanian sangat dipengaruhi oleh model tanam paksa yang cukup besar pengaruhnya memberi dampak bagi petani. Dengan pola tanam paksa yang terjawatahkan misalnya dalam sistem persewaan telah menyebabkan berkembangnya kapitalisme di kalangan petani yang tidak boleh menjadi kapitalis. Artinya yang menjadi kapitalis adalah para pengusaha Belanda atau orang Eropa yang membawa modal pengetahuan dan ilmu sistem perekonomian. Hal inilah yang disebutkan Boeke asal mula dualisme yang bertimpakan dengan sistem ekonomi tradisional yang telah berkembang sebelumnya.

Pada masa penjajahan kedudukan dan peranan petani pada hakekatnya tidak berbeda dengan periode sebelumnya, yaitu memenuhi berbagai kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah. Kendatipun demikian, pada masa ini beban menjadi semakin berat terutama pada masa *cultuurstelsel*. Dasar pemikiran ini yang melatarbelakangi tanam paksa tersebut khususnya penanaman tebu sebagai salah satu jalan untuk menumbuhkan industri gula yang stabil yang stabil, efisien dan menguntungkan dengan memaksa petani mengerjakan berbagai pekerjaan dengan nilai upah yang rendah. Konsekuensi tersebut bermuara dengan berlangsungnya tekanan terhadap petani, secara tidak langsung telah mempertajam perbedaan sosial ekonomi. Elson dalam tulisannya menyebutkan di sekitar pertengahan abad kesembilan belas petani terbagi menjadi tiga lapisan. Pertama, sekelompok kecil petani yang mempunyai hak atas tanah yang luasnya memberikan hasil yang melebihi kebutuhan konsumsi sendiri dan yang penggarapnya. Kedua, petani dengan mereka yang memiliki luas tanah yang memberikan produksi untuk keperluan sehari-hari dan dikerjakan juga tenaga keluarga sendiri. Ketiga, para petani yang tidak bertanah, dan menggantungkan hidupnya pada lapisan di atas atau bekerja sebagai pekerja prabikan (Elson, 1984).

Di masa penjajahan Belanda disebutkan, guna melayani sistem tanam paksa dihidupkan kembali komunalisme desa. Sistem tanam paksa yang dikembangkan dengan mengkombinasikan dipertahankannya kekuasaan feodal tuan-tuan tanah dengan kepentingan kolonialisme dari luar. Dengan pola ini petani mendapat

tanah garapan tanam paksa yang sama besarnya, dan statusnya sebagai petani hamba yang menyerahkan tenaga kerjanya untuk tanaman-tanaman komunitas yang diharuskan pemerintah Hindia Belanda sebagai jaminan pembayaran pajak. Dan bersamaan dengan hal tersebut kelas tuan tanah diperlemah.

Tahun 1870 merupakan tahun dimana proses liberalisasi lewat sistem perkebunan yang membawa perubahan besar dimana semakin luasnya pemilikan perorangan atas tanah. Artinya, ruang publik semakin kentara, dan ruang individu semakin menguat, dengan polarisasi yang dikembangkan di daerah pedesaan. Sehingga yang terjadi dimana pelapisan sosial semakin kuat, dengan golongan pemilik tanah beserta para pejabat pemerintah yang pada umumnya penguasaan tanah sebagai lapisan teratas. Tidak berhenti di sini saja, juga mulai berlangsung proses marjinalisasi petani, karena kebutuhan tenaga kerja upah di pabrik perkebunan (Setiawan, 2003)

Pada masa inilah involusi pertanian memasuki masa liberalism. Sehingga petani tanam paksa dianggap telah mendorong petani bekerja lebih giat untuk meningkatkan produksi pertanian. Setelah berakhirnya masa liberal pada tahun 1900 dan mulai memasuki abad ke-20 berkembanglah apa yang dinamakan dengan politik etik. Keuntungan yang diperoleh Belanda kemudian dikembalikan sebagian kecil bagi kalangan pribumi, terutama petani. Pada aras inilah terkenal program pendidikan, pengairan dan transmigrasi.

3. Pertanian Sesudah Masa Kemerdekaan

Pada masa ini gambaran pertanian mengalami pergeseran yang cukup signifikan dengan masa-masa sebelumnya. Soemardjan (dalam Mubyarto, 1987) lewat tulisannya memperlihatkan bahwa pada periode sebelum pembaharuan agraria tahun 1918 petani hanya mempunyai kewajiban dan tidak memiliki hak, antara tahun 1918 dan 1951 petani memiliki keduanya kewajiban dan hak, dan sesudah penghapusan pajak tanah 1951 petani hanya memiliki hak-haknya dan hampir tidak memiliki kewajiban apapun.

Pada masa ini pulalah sistem gotong royong diperkenalkan di daerah desa yang melibatkan semua warga desa dalam proses pembangunan, terutama pembangunan pertanian. Gotong royong yang dikembangkan tidak hanya mencakup bagi mereka yang mempunyai sawah namun juga bagi mereka yang tidak ada sawah ikut melakukan kegiatan gotong royong dalam usaha pembangunan pertanian. Warisan struktural setidaknya tidak berubah, bentuk dan struktur menjadi tidak mengherankan sebagai berubah kapitalisme dengan apa yang disebut sebagai neo-kolonialisme. Secara tidak langsung warisan kolonialisme tidak hanya dihampiri pada masa kolonial Belanda namun juga terus terjadi setelah masa kemerdekaan. Ini cukup kentara terjadi manakala pemerintah lebih menitikberatkan pada pembangunan sistem pertanian ketimbang kepada perubahan sistem agraria.

Perubahan yang terjadi setelah kemerdekaan tidak dapat dipisahkan dari kenyataan masa sebelumnya. Pertanian di Jawa misalnya selama masa penjajahan melibatkan dua lingkungan. Lingkungan yang pertama lingkungan penguasa yaitu tanaman-tanaman perdagangan dengan dukungan pemerintah di satu pihak dan padi milik petani di pihak lain. Lingkungan kedua adalah lingkungan petani, yaitu lingkungan pembayar pajak, yang bebas dari tanaman-tanaman perdagangan dan selama beberapa kurun waktu cukup panjang mengelola sendiri jaringan pengairan. Pada dasawarsa pertama dari abad ke dua puluh, sejalan dengan politik etis, sebagian dari lingkungan ini kehilangan kebebasannya dimana pembangunan jaringan pengairan berada dalam ranah pemerintah di bawah dinas pengairan.

Dipresi ekonomi pada masa tiga puluhan, pendudukan Jepang dan perang kemerdekaan menyebabkan terjadinya perubahan pada lingkungan pengusaha. Pada tahap ini arah pertanian lebih ditekankan pada produksi pangan. Sehingga sistem pembangunan jaringan irigasi mutlak sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Pemerintah berupaya membangun jaringan irigasi untuk meningkatkan produksi padi. Sehingga berbeda dengan apa yang terjadi pada masa penjajahan, jaringan irigasi di lingkungan penguasa kini lebih dimanfaatkan guna mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi padi. Hal ini bahwa dinas pengairan pada masa lalu mengarahkan pada kebijakan terutama kepentingan pabrik tebu, namun kini menjalankan cara yang baru untuk memperhatikan prabik yang masih aktif dan juga memperhatikan kepentingan petani.

Dalam bidang produksi pertanian, petani mengalami perubahan sikap penguasa yang berbeda satu sama lain. Zaman Belanda (zaman normal oleh petani karena politik pertanian tidak begitu banyak berubah dalam waktu yang cukup lama), zaman Jepang (yang keras tetapi relatif pendek) dan zaman Republik.

Pada zaman sebelum Jepang, pejabat pertanian bangsa Belanda maupun bangsa Indonesia bersikap paternalistik terhadap para petani dan masyarakat umumnya. Artinya pejabat menganggap dirinya sebagai bapak, dan petani sebagai anak yang belum dewasa yang selalu berada dibawah pengawasan bapak. Apa yang menurut pendapat pejabat baik, maka baik pula bagi petani. Pada zaman Jepang seperti juga diketahui, pertanian lebih diarahkan pada upaya mendukung peperangan. Pada zaman Jepang dikenang oleh petani sebagai zaman yang kejam dengan penyiksaan.

Apa yang tergambarkan pada masa pendudukan Jepang, pola pertanian yang berkembang selanjutnya juga tidak selalu mengarah kepada keberpihakan pemerintah Indonesia terhadap petani. Lewat salah satu programnya Bimas gotong royong secara tidak sengaja berkembang pola pembangunan pertanian *top down* yang menyebabkan kemerdekaan petani dan pemaksaan program pertanian cukup kuat terasa. Melalui paradigma yang berorientasi produksi dan mengejar pertumbuhan, pemerintah secara tidak langsung mematikan otonomi

petani dalam pembangunan pertanian. Digaungkannya revolusi Hijau pada masa pemerintahan orde baru misalnya menjadi bukti bahwa masalah pertanian erat kaitannya dengan aspek ekonomi dan juga politik. Revolusi hijau yang didewakan pemerintahan orde baru sarat dengan unsur kontrol dan dominasi. Lewat revolusi hijau dan modernisasi pertanian telah menggeser segenap bentuk pengetahuan petani yang dianggap tradisional ke cara-cara yang modern. Cara-cara bertani beserta benih-benih digantikan secara paksa dengan cara modern, dan bersamaan dengan itu pula telah menghancurkan formasi sosial non kapitalistik. Tidak berhenti di situ saja, revolusi hijau ternyata juga telah menggantikan tradisi gotong royong dengan kapitalisme dan industrialisasi pertanian. Sehingga revolusi hijau telah menggeser segenap bentuk proses budaya politik pedesaan berbasis nilai lokal kepada model modernisasi politik modern yang mematenkan sisi lokalitas (Fakih, 2004).

Model modernisasi pertanian lewat input modal besar-besaran yang diperkenalkan masa pemerintahan orde baru dengan paradigma pertumbuhan sebagai jargon ekonomi global dalam kenyataannya tidaklah membawa keuntungan bagi petani. Malah yang diuntungkan adalah pemilik modal dan juga elit desa yang secara serta merta menjadi pemanfaat dari jerih payah keringat petani.

Hal yang sama juga seperti disebutkan Soetrisno, apa yang dilakukan pemerintah lewat program revolusi hijau di dekade 1970-an selain mampu mencapai pembangunan pertanian skala makro dengan peningkatan produktivitas sub-sektor pertanian pangan, namun juga pada level mikro telah menimbulkan masalah tersendiri. Melalui revolusi hijau Indonesia telah mampu mencapai swasembada pangan, khususnya beras. Akan tetapi juga melalui program revolusi hijau telah memunculkan kesenjangan antara daerah kawasan padi pada dan non-padi di daerah pegunungan misalnya. Sekaligus lewat program ini secara tidak langsung telah mematenkan pengetahuan lokal yang cukup arif dalam menjaga hubungan manusia dengan alam harus tergantung dengan logika efisiensi dan keberpihakan pada teknologi modern (Soetrisno, 2002). Logika penerapan revolusi hijau juga diarahkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Namun dalam kenyataannya keberhasilan lewat revolusi pertanian masih menjadi perdebatan panjang. Karena apa yang dicita-citakan melalui revolusi hijau bermanfaat bagi pembangunan pertanian malah menyisakan cukup banyak kesenjangan yang muncul dari terjadinya polarisasi kesenjangan antara petani kaya dan miskin.

Historis perkembangan pembangunan pertanian sejak masa orde lama, hingga runtuhnya orde baru tidak jauh berbeda dengan masa penjajah belanda lewat dominasi pemerintah atas program pertanian yang secara lahiriah bukan hanya menguntungkan pengusaha sebagai pemilik modal namun juga pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Dan seperti disebutkan banyak pengamat tidak sama sekali menguntungkan petani. Kekuatan struktur ekonomi global dunia telah merubah secara radikal kebijakan pembangunan pertanian berbasis rakyat. Melalui ketergantungan yang dilakukan pemerintah kepada lembaga asing,

seperti IMF seperti disebutkan Setiawan (2003), telah mengarahkan kebijakan pertanian untuk semakin pro-pasar bebas dan secara sepihak mematkan nilai-nilai lokal yang dibangun petani dalam pembangunan pertanian berbasis desa. Sehingga bila mencermati lebih jauh ternyata warisan pembangunan pertanian dari masa kolonial dan orde baru kini semakin kompleks dengan mekanisme baru berwajah neo-imperialisme.

C. Paradigma Pembangunan Pertanian

Dalam upaya memajukan sektor pertanian ada beberapa hal yang telah dikembangkan pemerintah dari intensifikasi hingga restrukturisasi pertanian secara global. Pada dasarnya ada beberapa alasan mendasar yang dibangun manakala sektor pertanian mendapat prioritas dalam format pembangunan sekarang ini. Pertama, barang-barang hasil industri memerlukan dukungan daya beli masyarakat. Karena sebagian besar pembelinya adalah masyarakat petani yang merupakan mayoritas penduduk di negara-negara berkembang, maka tingkat pendapatan mereka harus ditingkatkan melalui pembangunan pertanian. Kedua, untuk menekan ongkos produksi dari komponen upah dan gaji diperlukan tersedianya bahan-bahan makanan yang murah, sehingga upah dan gaji yang diterima dapat dipakai memenuhi kebutuhan pokok buruh dan pegawai. Hal ini dapat dicapai manakala produksi pertanian, terutama pangan dapat ditingkatkan sehingga harganya lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Ketiga, industri juga membutuhkan bahan mentah yang berasal dari sektor pertanian, dan karena itu produksi bahan industri memberikan basis bagi pertumbuhan industri sendiri (Rahardjo, 1984).

Dengan mengacu pada perspektif pembangunan pertanian yang seharusnya mendapat posisi urgen dibandingkan prioritas industrialisasi terkait dari suatu logika bahwa sektor pertanian memiliki kemampuan ekonomis untuk meningkatkan surplus. Selanjutnya, apabila cara produksi pertanian dapat lebih dipermudah, dengan teknologi, produktivitas yang lebih tinggi dan hasil pertanian pada bidang pangan, maka beban tenaga kerja sektor pertanian dapat digeser ke sektor industri. Artinya sektor pertanian dinilai merupakan sumber tenaga kerja bagi sektor industri.

Perubahan paradigma pertanian yang mengacu pada pembangunan pertanian secara holistik menjadi fokus utama yang harus terbangun dimana tujuan paradigma pertanian harus lebih menjamin keamanan pangan secara mandiri dan berkelanjutan baik dalam lingkup keluarga dan juga lingkup negara. Untuk mencapai target tersebut ada beberapa pandangan penting yang harus dilakukan negara berhubunga dengan paradigma ini sendiri. Soekartawi (1995) menjelaskan, paradigma pembangunan pertanian harus dirubah dari pendekatan sentralisasi ke desentralisasi, pendekatan komoditas ke sumber daya, dari pendekatan pendapatan petani ke peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, dari skala usaha pertanian subsistem ke komersial, dari padat karya ke mesin, dari komoditi

primer ke komoditi yang mempunyai nilai tambah tinggi, dari pendekatan tarik tambang ke dorong gelombang dan dari dominasi pemerintah ke partisipasi swasta yang lebih besar.

Mengacu dari sentralisasi ke desentralisasi diharapkan pembangunan pertanian di daerah perlu diberikan wewenang yang lebih luas dalam merencanakan pembangunan. Kekuatan nilai lokal yang ada pada masyarakat harus menjadi penyelaras dari berbagai pijakan yang memuat semua elemen masyarakat dan pemerintah daerah dalam membangun sektor pertanian. Pembangunan pertanian tidak hanya berpikir parsial, tetapi juga struktur dan berbagai elemennya saling terkait satu sama lain. Pembangunan pertanian perlu memperhatikan skala usaha. Artinya petani kecil perlu diarahkan berusaha pada skala usaha yang menguntungkan. Aspek manajerial terus menjadi penting dalam meningkatkan produktivitas. Karena logika yang berkembang bukan *doing the right things* saja, melainkan juga memperhatikan *doing the things right*.

Pada tingkat skala yang lebih makro format pembangunan dengan pendekatan tarik tambang yang pernah dipraktekkan pemerintah lewat PJP I dimana investasi diarahkan di daerah yang mempunyai potensi SDA yang harus dikembangkan, sehingga memunculkan ketimpangan pembangunan bagi daerah yang tidak memiliki SDA memadai. Perspektif daerah gelombang diarahkan bagi daerah yang tertinggal perlu didorong untuk dapat berkembang sejajar dengan daerah yang lebih maju.

Dengan konsekuensi yang dikembangkan tersebut partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian harus semakin digalakkan. Bila hal ini dapat dilakukan secara komprehensif akan mengurangi beban pemerintah dalam pembangunan. Sehingga secara bertahap akan dilakukan revitalisasi pertanian tradisional ke arah industrialisasi semakin memungkinkan untuk menjadi *term* pembanguana pertanian selanjutnya. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Ginanjar (dalam Salikin, 2003:73-74) menyebutkan ada beberapa kriteria untuk mewujudkan pertanian berbudaya industri:

1. Pengetahuan merupakan landasan utama dalam pengambilan keputusan (bukan instuisi atau kebiasaan saja) sehingga kebutuhan terhadap perkembangan dan kualitas informasi akan semakin tinggi.
2. Kemajuan teknologi merupakan instrument utama dalam pemanfaatan sumber daya.
3. Mekanisme pasar merupakan media utama dalam transaksi barang dan jasa.
4. Efisiensi dan produktivitas sebagai dasar utama dalam alokasi sumber daya sehingga menghemat biaya pengelolaan sumber daya.
5. Mutu dan keunggulan merupakan orientasi, wacana, sekaligus tujuan.
6. Profesionalisme merupakan karakter yang menonjol.
7. Perencanaan harus menggantikan ketergantungan pada alam sehingga setiap produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan yang telah

ditetapkan pasar.

Format pembangunan pertanian yang tergambarkan di atas berupaya menggeser paradigma pertanian berwajah subsisten menuju pertanian berbudaya industri. Kendatipun demikian Satria (1997), menjelaskan model transformasi ke arah pertanian berbudaya industri tidak mungkin dilakukan secara revolusioner. Lompatan drastis dari masyarakat subsiten ke masyarakat industri justru akan merugikan karena dapat berakibat fatal, yakni terjadinya aliansi atau keteransingan budaya. Akan tetapi yang diperlukan adalah rekayasa transformasi berupa akselerasi atau model evolusi yang dipercepat, dimana laju pergerakan dipercepat melalui aplikasi teknologi baru disertai dengan upaya penyiapan kemapanan dan kematangan masyarakat untuk menggunakan dan mengembangkan teknologi tersebut. Sehingga yang patut dipahami bahwa model transformasi pertanian berbudaya industri tidak salah dipahami serta merta dimaknai dengan pembangunan pabrik industri berskala besar, gedung industri pengolahan hasil pertanian, akan tetapi pola ini lebih terarah pada transformasi pola pikir, pola tindakan, dan sikap dari petani tradisional kearah petani modern.

Dengan apa yang dilakukan pemerintahan orde baru lewat program Repelita dan Pelita pembangunan nasional selama lima tahun telah menempatkan pembangunan sektor pertanian “terpinggirkan” oleh pembangunan sektor-sektor lainnya. Faktor inilah yang melandasi format pembangunan pertanian menjadi prioritas utama dari program pemerintahan reformasi kendatipun masih terdapat banyak kelemahan dalam upaya memberdayakan kehidupan petani sebagai pelaku pembangunan.

Suryana (1997) dalam analisisnya untuk mewujudkan visi pembangunan pertanian sebagai sektor yang modern, tangguh dan efisien harus melandasi empat hal :

1. Memanfaatkan sumber daya pertanian secara optimal dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Sumber daya pertanian meliputi lahan, air dan perairan secara umum, kelautan, plasma nutfah, sumber daya genetika dan sumber daya energy. Pengelolaan sumber daya tersebut harus memenuhi prinsip ekonomi dan efisiensi serta mengacu kebutuhan pasar.
2. Menetapkan diversifikasi secara komprehensif baik dari dimensi vertikal, horizontal. Kunci sukses dalam pengembangan diversifikasi pertanian adalah pemanfaatan teknologi spesifik lokasi, ketersediaan prasarana wilayah pengembangan dan keberadaan lembaga pendukung yang memadai, termasuk informasi pasar dan standarisasi produk. Diversifikasi bukan hanya pada kegiatan produksi, tetapi juga dalam pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian.
3. Menerapkan rekayasa teknologi maju dan spesifik lokasi. Kata kunci di dalam hal ini adalah maju dan spesifik lokasi, mengingat sumber daya pembangunan pertanian yang ada sangat beragam. Dengan penerapan teknologi

maju yang beradaptasi dengan kondisi lokal spesifik, maka upaya peningkatan efisiensi usaha tani yang berdaya dapat dilakukan secara maksimal.

4. Meningkatkan efisiensi sistem agrobisnis dan agroindustri agar mampu menghasilkan produk pertanian berdaya tinggi serta mampu memberikan peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat secara berimbang.

Dengan demikian dari apa yang dikembangkan di atas, agar paradigma tersebut dapat berjalan seperti yang diharapkan, dibutuhkan kebijakan dan keberpihakan pemerintah atas sektor pertanian yang pada dasarnya menjadi penyumbang devisa terbesar dalam pembangunan dan sekaligus merupakan mata pencaharian yang masih dominan dilakukan masyarakat dalam mengatasi krisis global. Karena apa yang sering muncul dari permasalahan pertanian tidak terlepas bagaimana pemerintah menghampiri sektor pertanian dan petani sendiri sebagai pelaku pembangunan. Rekonstruksi sektor pertanian bukanlah hal yang mudah, khususnya setelah dijepit dengan sekian banyak kebijakan pemerintah yang memuat sektor ini semakin terdesak. Yudistika (2003) menyebutkan terdapat dua masalah besar yang masih menggantung pada sektor pertanian. Pertama, kepemilikan lahan yang sangat kecil. Pada tahun 1980-an seperti penelitian yang dilakukan Hayami dan Kikuchi melaporkan kepemilikan lahan rata-rata di Jawa kurang dari 0,5 hektar. Kini rata-rata lahan tinggal 0,25 hektar. Dengan struktur kepemilikan lahan seperti ini jelas atribut-atribut semacam efisiensi dan produktivitas masih jauh dari yang diharapkan. Kedua, menyingkirkan kondisi-kondisi yang menyebabkan sektor pertanian selalu kalah dan tersingkirkan oleh sektor lain. Berhadapan dengan alam, teknologi dan kelembagaan, sektor pertanian selama ini hampir selalu berada pada situasi subordinat, terdesak secara mengenaskan. Bila berhadapan dengan pelaku ekonomi lainnya, kondisi petani selalu kurang mujur akibat kelembagaan ekonomi yang asimetris sehingga biaya transaksi nyaris seluruhnya menjadi beban petani.

Dengan atribut penguasaan lahan yang sangat timpang hal yang dapat dibayangkan adalah bagaimana akhirnya petani terpaksa harus memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan mencari sumber pendapat tambahan di luar sektor pertanian (*off-farm*). Kondisi yang sudah dapat dibayangkan ini akan selalu menjadi pemandangan klasik yang harus dihilangkan dengan mengupayakan kebijakan pembangunan yang dibangun negara dapat merubah sektor pertanian dan petani sendiri menjadi aktor utama dalam pembangunan pertanian dan bukan malah sebaliknya. Karena apa yang digambarkan Soetomo (1997) dalam mensymbolisasikan petani sebagai manusia yang kalah cukuplah berasal. *Pertama*, kekalahan yang datang dari alam. Ini sesuatu yang sangat ironis bila mengingat pada awalnya kultur bercocok tanam lahir berkat anugerah kekayaan alam. Tetapi ini bisa pula dipahami karena ketergantungan petani pada alam sebenarnya menciptakan ancaman di dalam dirinya sendiri. *Kedua*, terbentuknya masyarakat dan lembaga beserta sistem kekuasaan dan politik yang ada di dalamnya. Kelembagaan pertanian modern, misalnya telah membuka babak baru di mana buruh

tani bergantung pada majikannya, pemasaran produk pertanian di bawah hukum permintaan dan penawaran pasar dan bahkan harga jual produk pertanian selalu terancam oleh rekayasa praktek ekonomi makro. *Ketiga*, ilmu pengetahuan dan teknologi yang diangankan bisa mengatasi tradisionalitas ternyata juga tidak tercapai. Justru sebaliknya, ilmu pengetahuan dan teknologi berubah menjadi bentuk dominasi baru yang tidak kurang menindas. Kondisi ketiga inilah yang selalu akhirnya menikam petani secara perlahan dan nyaris tidak dapat menyelamatkan diri terlebih lagi dengan *platform* model pembangunan pembangunan pertanian yang tidak memihak petani.

Artinya, paradigma pembangunan pertanian akan selalu menjadi menjadi sebuah khalayan dari suatu paradigma semata manakala pemerintah belum mampu merubah pola dan bangunan dari kebijakan pertanian yang lebih konsisten dan terpola dengan tetap melihat sektor pertanian sama dengan sektor lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Pertanian Berkelanjutan Berbasis Petani : Sisi Lain Paradigma Pembangunan Pertanian

Pada dasarnya terminologi pertanian berkelanjutan sebagai padanan istilah agroekonomi pertama kali dipergunakan sekitar awal tahun 1980-an oleh pakar pertanian FAO. Agroekonomi sendiri mengacu pada modifikasi ekosistem alamiah dengan sentuhan campur tangan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, serat dan kayu untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Conway dalam Salikin juga menggunakan istilah pertanian berkelanjutan dengan konteks agroekosistem yang berupaya memadukan antara produktivitas , stabilitas dan pemerataan (Salikin, 2003). Jadi semakin jelas bahwa konsep agroekonomi dan pertanian berkelanjutan adalah jawaban bagi kegamangan dampak revolusi hijau yang antara lain ditengarai oleh semakin merosotnya produktivitas pertanian. Revolusi hijau memang dipandang suksse melakukan rekayasa pertanian lewat modal teknologi, namun juga sekaligus menyimpan berbagai problematik dari masalah kemanusia hingga rusaknya ekosistem alam.

Eksistensi konsepsi pertanian berkelajutan bukanlah sesuatu yang baru. King menuliskan baha teknik usaha tani dengan metode organik atau pertanian permanen yang mengintegrasikan pengelolaan kesuburan tanah juga telah dilakukan oleh para petani di dataran Cina, Jepang dan Korea beberapa abad yang lalu. Dengan demikian isu paradigma pertanian berkelanjutan yang berkembang sekarang sebenarnya merupakan reaktualisasi untuk mencari model pengelolaan pertanian yang berbasis alam. Kegagalan pertanian modern telah merubah cara pandang untuk melakukan rekayasa pertanian kembali ke alam.

Soekartawi (1995) dalam pandangannya menyebutkan ada tiga hal yang menyebabkan pembangunan pertanian di Indonesia harus menerapkan model pertanian berkelanjutan. Pertama, sebagai negara agraris, peranan sektor perta-

nian Indonesia dalam sistem perekonomian nasional masih dominan. Kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto adalah sekitar 20% dan menyerap 50% lebih tenaga kerja pedesaan. Dari 210 juta penduduk Indonesia hampir 150 juta orang bertumpu pada sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, sebagai negara agraris agrobisnis dan agroindustri memiliki peranan yang sangat vital dalam mendukung pembangunan sektor lainnya. Pengalaman masa lalu menunjukkan, yakni pada saat sektor industri dan perbankan mengalami krisis ekonomi, sektor agrobisnis dan agroindustri malah mengalami kemajuan akibat krisis mata uang AS di dunia melemah. Ketiga, sebagai negara agraris, pembangunan pertanian berkelanjutan menjadi keharusan agar sumber daya alam yang ada sekarang ini dapat terus dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.

Secara konseptual pendekatan pertanian berkelanjutan merupakan pola dan cara pandang yang harus dikembangkan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan secara sinergis. Pendekatan ekonomi berkelanjutan berbasis pada konsep maksimalisasi aliran pendapatan antargenerasi, dengan cara merawat dan menjaga cadangan sumber daya atau modal yang mampu menghasilkan suatu keuntungan. Upaya optimalisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya yang langka menjadi keharusan dalam menghadapi berbagai isu ketidakpastian baik aspek alam maupun non alam. Konsep sosial berkelanjutan berorientasi pada manusia dan hubungan pelestarian stabilitas sosial dan sistem budaya, termasuk upaya mereduksi berbagai konflik sosial yang merusak. Dalam perspektif sosial, perhatian utama ditujukan pada pemerataan, pelestarian keanekaragaman budaya, serta pemanfaatan praktek pengetahuan lokal yang berorientasi panjang dan berkelanjutan. Tinjauan aspek lingkungan berkelanjutan terfokus pada upaya menjaga stabilitas sistem biologis dan lingkungan fisik dengan bagian utama menjaga kelangsungan hidup masing-masing subsistem menuju stabilitas yang dinamis dan menyeluruh pada ekosistem (Salikin, 2003).

Dari ketiga aspek tersebut memiliki perhatian dan peranan yang sama pentingnya. Aspek ekonomi dan sosial memiliki keterkaitan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat didistribusikan secara merata pada semua lapisan sosial, sehingga tidak ada lagi kesenjangan ekonomi dan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Keterkaitan aspek ekonomi dan lingkungan sebagai pemahaman agar aktivitas ekonomi baik produksi, distribusi dan konsumsi tidak membawa dampak eksternalisasi negatif pada lingkungan dan sedapat mungkin menginternalisasikan aspek lingkungan ke dalam tindakan dan putusan ekonomi. Dan keterkaitan aspek sosial dan lingkungan bertujuan memperbaiki kualitas hidup antargenerasi secara merata dan upaya memfasilitasi partisipasi masyarakat secara menyeluruh.

Sistem pertanian berkelanjutan merupakan sistem pertanian dengan penggunaan input luar secara ekonomis serta memiliki produktivitas tinggi dengan mempertimbangkan sosial ekonomi, budaya dan pemeliharaan lingkungan. Oleh karena itu dalam pertanian yang berkelanjutan berbagai dukungan sumberdaya

manusia, pengetahuan dan teknologi, permodalan hingga pada produk dalam masalah keseimbangan pertanian dalam pembangunan. Dalam mendukung pertanian berkelanjutan, peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian sangat penting dengan visi dan misi dan tujuan dari pembangunan pertanian. Dalam upaya memanfaatkan teknologi juga perlu mempertimbangkan faktor eksternal dan internal serta komponen teknologi di dalamnya. Strategi tersebut kemudian diimplementasikan dalam berbagai sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pelaku pembangunan (Husodo, 2004).

Mengacu pada konsep pertanian berkelanjutan sistem pertanian berkelanjutan dapat dilakukan menggunakan empat model. Pertama, sistem pertanian organik, dimana pola pertanian organik merupakan alih tandingan dari kegagalan sistem pertanian industrial. Kedua, sistem pertanian terpadu, merupakan gabungan dari sistem pertanian terpadu konvensional dan sistem pertanian dengan penggunaan teknologi. Pada tahap ini ada hubungan yang saling mengikat untuk dapat memadukan pola pertanian yang tetap menjaga kelestarian alam sekaligus dengan pemanfaatan teknologi tepat guna sebagai ajang peningkatan produksi pertanian dan efisiensi modal. Ketiga, sistem pertanian masukan luar rendah. Pada tahap ini sistem pertanian yang berkelanjutan harus dibangun dengan fondasi sumber daya yang dapat diperbaharui yang berasal dari lingkungan usaha tani dan sekitarnya. Keempat, sistem pengendalian hama terpadu. Terdesak oleh pemenuhan pangan dan kecukupan pangan bagi penduduk yang jumlahnya 120 juta orang mendesak program pencangan pembangunan pertanian yang telah dilakukan pada masa pemerintahan orde lama dan orde baru melalui program pertanian yang bernama intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi semuanya bermuara pada terjadinya ketidakseimbangan dan penghancuran alam dalam rangka meningkatkan surplus komoditi beras bertaraf internasional sebagai ajang swasembada beras. Di satu titik pertanian Indonesia telah berhasil melakukan swasembada beras, namun disisi yang lain, lewat logika pertumbuhan ekonomi telah merusak kelenstarian alam. Munculnya berbagai seragam hama penyakit pada sektor pertanian menunjukkan adanya ketidakseimbangan kondisi alam dengan logika kebutuhan ekonomi yang hanya mengejar keuntungan dan sedikit sekali berpikir alam sebagai sumber daya terbatas.

Berangkat dari paradigma baru pembangunan pertanian, pertanian berkelanjutan merupakan konsep yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan sekaligus sebagai pijakan dari pemerintah untuk tetap memajukan sektor pertanian sebagai andalan peningkatan devisa negara. Hal ini sangat berkesan untuk tidak mengulang lagi pola pertanian yang dilakukan pemerintah pada masa sebelumnya, yang secara tidak langsung berpola *top down* sepihak dimana kekuatan pusat menjadi pelaku utama pembangunan yang malah mematikan pengetahuan lokal dan kelembagaan lokal dalam peningkatan sektor pembanguna pertanian. Pada tahap ini akhirnya yang harus terbangun adanya kesenergian antara pola *top down* dan juga *bottom up* untuk melibatkan secara penuh petani sebagai pelaku pembangunan dan bukan malah menjadi obyek pembangunan.

E. Penutup

Pembangunan pertanian pada masa sekarang dan selanjutnya adalah berupaya untuk mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan yang harus mampu meningkatkan sumber daya petani dalam menunjang sistem tersebut. Peningkatan sumber daya manusia tidak hanya terbatas dalam artian peningkatan produktivitas semata, tetapi yang lebih penting bagaimana kebijakan pemerintah menempatkan petani berperan dalam proses pembangunan.

Fakta sejarah memperlihatkan sektor pertanian telah menjadi katub pengaman perekonomian nasional lewat penyerapan tenaga kerja yang teramat besar. Paradoknya, kebijakan pemerintah tidak pernah menempatkan petani sebagai pihak yang harus disantuni. Kebijakan pertanian yang berakar dari masa kolonial dan peninggalan kolonial telah menjadi kisah suram dari kehidupan petani, sehingga masyarakat petani menempati lapisan terbawah dari komunitas miskin di Indonesia.

Mendasari dari fakta inilah paradigma baru pembangunan pertanian yang melibatkan hubungan kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan beserta merubah menseset kebijakan dan program pemerintah yang memihak kepada petani mutlak diperlukan. Hal ini cukup mendasar karena sektor pertanian merupakan sektor andalan yang mampu meningkatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.

Referensi

- Atmosudirdjo, MR. Prajudi, *Sejarah Ekonomi Indonesia Dari Segi Sosiologi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Booth, Anne (peny.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988.
- Elson, R. E. 1984. *Javanese Peasants and the Colonial Sugar Industry. Impact and Change in an east Java Residency 1830-1940*. Oxford University.
- Fakih, Mansour. 2004. *Bebas Dari Neoliberalisme*. Insist. Yogyakarta.
- Hutapea, S.R. 1986. "Partisipasi Petani Dalam Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier". *Disertasi*. Pasca Sarjana IPB. Bogor.
- Mubyarto. 1987. *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Raharjo. 2004. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

- Rahardjo, M. Dawam. 1984. *Trasformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja*. UI Press.Jakarta.
- Soekartawi. 1995. *Pembangunan Pertanian*. Rajawali Press. Jakarta.
- Salikin, Karwan A. 2003. *Sistem Pertanian Berkelanjutan*. Kanisius.Yogyakarta.
- Satria, A. 197. “Transformasi Ke Arah Pertanian Berbudaya Industri”. Dalam *Analisis CSIS* . Jakarta.
- Suryana, A. 1997. “Pertanian 2020, Tidak Dapat Dengan Pendekatan Biasa Lagi”. *Kompas*. 7 Maret.
- Setiawan, Bonnie. 2003. *Globalisasi Pertanian*. IGJ. Jakarta.
- Soetrisno, Loekman. 2002. *Paradigma Baru Pembangunan Pertanian Sebuah Tinjauan Sosiologis*. Kanisius. Yogyakarta.
- Soetomo, Greg. 1997. *Kekalahan Manusia Petani: Dimensi Manusia dalam Pembangunan Pertanian*. Kanisius.Yogyakarta.
- Soekartawi. 1995. “Agribisnis dalam Perspektif Pembangunan yang Berkelanjutan”. *Agrodiklat*. No. 10/Agro/XIII/ Jakarta.
- Yudo Husodo, 2004. Siswono dkk. *Pertanian Mandiri Pandangan Strategis Para Pakar Untuk Kemajuan Pertanian Indonesia*. Swadaya. Bogor.
- Yustika, Ahmad Erani. *Negara VS Kaum Miskin*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2003.
- Penulis : Mahmuddin, PPs Sosiologi Fisipol UGM Yogyakarta. Staf Pengajar IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pemberdayaan Sosial Ekonomi Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan

(Studi Kasus Warga KAT Desa Batee Meutudong Kecamatan Panga,
Aceh Jaya dan Desa Alue Bilie Kecamatan Woyla Timur, Aceh Barat)

Oleh:

Dr. Ishak Hasan, M.Si¹

Abstrak

KAT merupakan kelompok sosial dan budaya yang bersifat lokal, relatif kecil, tertutup, tertinggal, homogen, terpencar dan berpindah-pindah ataupun menetap. Kehidupannya masih berpegang teguh pada adat istiadat, kondisi geografis, yang sulit dijangkau, penghidupannya tergantung pada sumberdaya alam setempat dengan menggunakan teknologi yang masih sangat sederhana dan ekonomi subsisten serta terbatasnya akses pelayanan sosial dasar. Warga KAT tinggal di berbagai wilayah tanah air, termasuk di Aceh. Pemberdayaan terhadap mereka relatif masih sangat terbatas dilakukan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dan kesiapan sumberdaya manusia yang peduli terhadap nasib warga KAT sangat sedikit. Penelitian dilakukan di lokasi dengan melakukan observasi dan, wawancara langsung dengan semua kepala keluarga. Masing-masing di Desa Batee Meutudong 43 KK dan di Alue Bilie 38 KK. Strategi pemberdayaan yang dilakukan dengan melakukan penyerapan aspirasi tentang kebutuhan mereka, baik dari aspek sosial maupun dari aspek ekonomi, dan kemudian menyusun skala prioritas pemberdayaan. Pada tahap awal akan dibangun rumah layak huni sebanyak jumlah KK yang ada di dua lokasi tersebut. Rumah berbentuk semi permanen, pemberian biaya hidup beserta dengan berbagai fasilitas sosial lainnya selama masa 2 tahun. Selanjutnya dilakukan pendampingan sampai dimungkinkan mereka mandiri secara sosial dan ekonomi.

Kata Kunci: Pemberdayaan Sosial Ekonomi, Kemiskinan, KAT

1. Dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

A. Pendahuluan

Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sering terabaikan dalam pembangunan. Mereka sering mendapat perlakuan yang kurang adil dari pengambil kebijakan. Makanya tidak heran apabila kondisi kehidupan sosial ekonomi mereka sangat jauh tertinggal bila di bandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Sampai saat ini perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat ini relatif masih amat terbatas dilakukan. Hal ini ditandai dari akses pelayanan publik dasar, seperti pendidikan, kesehatan, sarana transportasi, dan fasilitas sosial ekonomi lainnya sangat terbatas diperoleh oleh mereka. Dengan demikian mereka selalu tertinggal dalam setiap derap pembangunan.

KAT merupakan kelompok sosial dan budaya yang bersifat lokal, relatif kecil, tertutup, tertinggal, homogen, terpecah dan berpindah-pindah ataupun menetap. Kehidupannya masih berpegang teguh pada adat istiadat, kondisi geografis, yang sulit dijangkau, penghidupannya tergantung pada sumberdaya alam setempat dengan menggunakan teknologi yang masih sangat sederhana dan ekonomi subsisten serta terbatasnya akses pelayanan sosial dasar. Kondisi yang demikian disebut dengan komunitas yang belum diberdayakan, dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah (Nasir Abdullah, 2006:5).

Pemberdayaan KAT oleh pemerintah memang telah dilakukan, akan tetapi mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas maka pemberdayaan tersebut juga belum begitu terasa bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat bawah ini. Oleh karena itu dalam setiap kesempatan kita perlu memberikan perhatian secara terencana antar berbagai sektor guna memperbaiki kondisi kehidupan mereka di berbagai wilayah tanah air, termasuk di Aceh.

Wilayah Aceh yang luas terdiri dari wilayah pesisir, wilayah pedalaman dan wilayah kepulauan. Desa Bate Meutudong Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya dan Desa Alue Bilie Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat merupakan desa di pedalaman. Kedua desa ini berada di Wilayah Pantai Barat Aceh. Hampir semua penduduk di dua desa tersebut merupakan Suku Aceh. Wilayah ini bertopografi dataran tinggi, sebagian kecil dataran rendah.

Sebelum gempa dan tsunami melanda Aceh wilayah ini dapat ditempuh dengan transportasi darat yang sangat lancar. Akan tetapi setelah gempa dan tsunami menghancurkan prasarana jalan dan jembatan wilayah ini seperti kembali ke masa silam, terisolir dan sangat terkebelakang bila dibandingkan dengan wilayah dan masyarakat lain di Aceh. Saat ini perbaikan jalan dan jembatan di wilayah pantai barat terus dipacu walau setelah lebih 5 tahun tsunami, transportasi ke wilayah ini sampai saat ini relatif belum lancar. Diharapkan dengan lancarnya transportasi, maka mobilitas penduduk dan sumber-sumber daya alam lainnya bergerak melewati batas-batas wilayah kedua kabupaten tersebut.. Adanya berbagai program pembangunan di daerah tidaklah berarti secara otomatis dapat

menuntaskan isolasi fisik dan keterbelakangan. Hal tersebut dapat dilihat secara langsung kondisi yang dihadapi oleh kedua desa tersebut.

Kedua desa ini terletak diperbukitan dan lembah Gugusan Bukit Barisan yang terhampar di pantai Barat Aceh. Daerah ini menjadi tempat mengadu nasib, dan tempat berusaha menghidupi anak cucu mereka. Desa ini relatif sudah lama ditempati penduduk jauh sebelum kemerdekaan. Keadaan masyarakatnya masih sangat tertinggal dalam segala hal. Dalam situasi seperti di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Bate Meutudong Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya dan Desa Alue Bilie Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat dapat beradaptasi dan mempertahankan hidupnya terhadap perubahan lingkungan alam dan sosial ekonomi serta budaya yang semakin pesat. Khususnya dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka. Selain itu perlu pula dicari model pembinaan yang sesuai dengan aspirasi atau kebutuhan mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi masyarakat yang mencakup aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, (2) Menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam upaya pembinaan kesejahteraan sosial, (3) Tersusunnya model pembinaan dan rencana pemberdayaan yang tepat.

B. Metode Penelitian

Fokus komunitas yang menjadi wilayah penelitian adalah Desa Bate Meutudong Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya dan Desa Alue Bilie Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat. Pemilihan dan penetapan desa ini sebagai objek pengkajian ditetapkan oleh Dinas Sosial Aceh berdasarkan usulan Pemda kedua kabupaten tersebut. Tim peneliti melakukan studi kelayakan di lapangan untuk memperoleh data akurat yang mendukung pencapaian tujuan penelitian di atas. Penelitian lapangan dilakukan selama 2 (dua) bulan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kualitatif, sebagai mana disajikan dalam laporan ini.

C. Hasil Penelitian

1. Kondisi Geografis

a. Desa Batee Meutudong

Desa Batee Meutudong mempunyai luas lebih kurang 1000 Ha, terdiri atas lahan perladangan dan pertanian, semak belukar, sawah serta pemukiman penduduk. Selebihnya merupakan areal hutan Negara yang belum dimanfaatkan oleh penduduk.

Batas Desa Batee Meutudong sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Gampong Alue Thoe
- Sebelah Selatan dengan Gampong Alue Pande
- Sebelah Timur dengan Gampong panton Krueng
- Sebelah Barat dengan Gampong Kabong

Desa Batee Meutudong bertofografi dataran rendah dan sebagian besar dataran tinggi. Ketinggian Desa ini dari permukaan laut berkisar 50 hingga 150 meter. Curah hujan relatif tinggi, musim penghujan dimulai sejak bulan September hingga Juni setiap tahunnya. Struktur pemilikan tanah di Desa Batee Meutudong sebagian besar merupakan tanah negara dan sebagian milik masyarakat. Secara geografis desa ini sangat layak sebagai sebuah pemukiman, karena disamping tanahnya yang subur, desa ini dilalui sebuah sungai yang airnya sangat jernih dan memenuhi standar kesehatan. Letak pemukiman yang berada di lembah perbukitan menjadikan udaranya bersih dan sejuk, karena hutan alamnya yang masih asri.

b. Desa Alue Bilie

Luas Desa Alue Bilie lebih kurang 850 Ha, terdiri atas lahan perladangan dan pertanian, semak belukar, sawah serta pemukiman penduduk. Selebihnya merupakan areal hutan Negara yang belum dimanfaatkan oleh penduduk.

Batas Desa Alue Bilie sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kebun Gampong Alue Bilie
- Sebelah Selatan dengan Gampong Pasi Janeng
- Sebelah Timur dengan Gampong Peuniyoh Rambong
- Sebelah Barat dengan Gampong Alue Eumpek

Desa Desa Alue Bilie bertofografi sebagian besar dataran tinggi Ketinggian desa ini dari permukaan laut berkisar 150 hingga 300 meter. Curah hujan relatif tinggi terutama pada musim angin barat, dimulai sejak bulan September hingga Juni setiap tahunnya. Pemilikan tanah di Desa Alue Bilie sebagian besar merupakan tanah negara dan sebagian milik masyarakat. Secara geografis desa ini sangat layak sebagai sebuah pemukiman, karena disamping tanahnya yang subur, desa ini dilalui sebuah sungai yang airnya sangat jernih dan memenuhi standar kesehatan. Letak pemukiman yang berada di lembah perbukitan menjadikan udaranya bersih dan sejuk, karena hutan alamnya yang masih asri.

Aksesibilitas dengan ibukota kecamatan sejauh 8 Km dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Jalannya hanya jalan tanah. Jarak dengan ibu kota kabupaten 25 Km, dan jarak dengan ibukota propinsi 178 Km dengan menggunakan transportasi bus umum. Mengingat kondisi lapangan maka rencana pembinaan dilakukan juga secara insitu. Lokasi desa ini sangat cocok ditanami jenis tanaman padi, coklat, sawit. Selain itu juga dapat ditanami dengan

berbagai tanaman palawija lainnya, seperti sayur-sayuran. Desa Alue Bilie belum ada sarana perekonomian seperti pasar. Kebutuhan sehari-hari penduduk di datangkan dari desa tetangga.

2. Kondisi Demografis dan Kegiatan Perekonomian

Jumlah penduduk Desa Batee Meutudong berjumlah 126 jiwa, terdiri 59 laki-laki, 67 perempuan. Sedangkan penduduk Alue Bilie berjumlah 58 jiwa, 24 laki-laki 34 perempuan. Pada umumnya penduduk kedua desa mempunyai mata pencaharian sebagai petani padi sawah, pertanian lainnya, dan buruh tani. Lahan yang mereka garap pada umumnya milik sendiri. Namun ada juga sebagian penduduk yang mengusahakan lahan orang lain dengan sistem bagi hasil. Usaha tani yang dominan adalah usaha tani karet, coklat, dan sawit rakyat. Hanya sedikit yang menanam padi. Sedangkan jenis tanaman pangan yang ditanami adalah sayur-sayuran. Hasil dari usaha pertanian dan perkebunan tersebut pada umumnya belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Sedangkan potensi sumberdaya lahan sangat subur. Kebutuhan beras dan kebutuhan lainnya, baik kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan sandang sehari-hari di datangkan dari ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten.

Pola pemukiman penduduk kedua desa ini bersifat terpusat pada lokasi pemukiman yang telah dihuni sejak lama. Bentuk bangunan rumah pada umumnya terbuat dari kayu, beratap rumbia dan sebagian besar berlantai tanah. Ada sebagian berbentuk rumah panggung dengan lantai papan. Sumber air yang digunakan masyarakat, baik untuk mandi, mencuci, maupun untuk kebutuhan air minum digunakan air sungai. Selain itu juga ada sebagian masyarakat yang menggunakan sumur sebagai sumber air untuk berbagai keperluan. Sebagian besar rumah tangga belum memiliki jamban keluarga. Umumnya penduduk membuang kotoran langsung ke sungai atau ke jamban umum yang juga dibuang ke saluran air. Usaha tani dikerjakan secara tradisional dengan peralatan yang relatif sederhana, seperti cangkul, parang dan alat produksi pertanian tradisional lainnya. Produksi hanya untuk sekedar dikonsumsi sendiri, bukan usaha komersial yang mendatangkan pendapatan.

3. Pembangunan

Secara umum pelayanan publik masih sangat memprihatinkan. Di kedua desa ini hanya memiliki masing-masing satu buah rumah ibadah (meunasah yang terbuat dari kayu/papan) dibangun dari hasil swadaya masyarakat sendiri tanpa ada bantuan pemerintah. Jalan menuju desa keduanya belum beraspal, dan saat ini sudah dapat dilalui dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Di desa ini belum ada pos pelayanan kesehatan. Sehingga kalau ada penduduk yang sakit terpaksa harus mencari pelayanan kesehatan ke tempat yang lebih jauh, khususnya ke ibukota kecamatan. Anak-anak usia sekolah terutama usia SD sebagian ada

yang tidak bersekolah karena SD sangat jauh letaknya. Sedangkan sebagian kecil anak usia SD bersekolah di desa tetangga.

D. Kondisi Sosial Budaya

1. Sejarah Singkat Desa

Nama Desa Batee Meutudong dan Desa Alue Bilie telah menjadi nama yang diterima secara kolektif oleh penduduk setempat sejak lama. Tidak diketahui secara pasti kapan pertama sekali nama kedua desa ini muncul. Namun diperkirakan oleh sebagian warga generasi tua, kedua desa ini sudah ada sejak zaman Kolonial Belanda. Nama ke dua desa ini berasal dari masyarakat pendatang yang membuka lahan pertanian di kawasan ini. Pada mulanya kedatangan mereka untuk mencari dan membelah kayu, kemudian mereka membangun pemukiman dan bercocok tanam. Ternyata usaha mereka tidak sia-sia, sehingga dalam waktu yang singkat mereka betah dan menetap di sana. Asal mula penduduk yang berdomisili di desa ini merupakan kaum pendatang yang berasal dari beberapa kecamatan dan kabupaten yang bertetangga, terutama dari Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Besar, Pidie dan Kabupaten Aceh Selatan. Setelah ada penduduk menetap, masing-masing desa semakin ramai dikunjungi para pendatang baru yang berasal dari luar desa.

2. Sistem Keekerabatan dan Interaksi Sosial

Penduduk yang mendiami kedua desa ini seluruhnya berasal dari suku Aceh. Tidak ada penduduk yang bermigrasi dari luar Aceh secara permanen dan dalam jumlah yang besar ke desa ini. Kecuali bagi beberapa orang yang diikat oleh hubungan perkawinan dengan warga setempat. Kehidupan keluarga sangat dipengaruhi oleh kondisi tempat tinggal. Selain itu juga dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, sumber dan tingkat pendapatan, biaya hidup, besarnya keluarga, pola hubungan keluarga, serta keharmonisan hubungan perkawinan.

Sebagaimana pandangan orang Aceh di tempat lain, warga kedua desa tersebut beranggapan bahwa status sebuah keluarga sejahtera dan bermartabat sering diukur apabila sudah mampu memiliki rumah atau tempat tinggal menetap sendiri, tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Rumah tempat tinggal ini merupakan simbol ketentraman lahir dan batin. Oleh karena itu tempat tinggal harus diperhatikan secara baik, pengaturan ruang, dan kelengkapan peralatan rumah juga harus memadai. Sebab suasana tempat tinggal yang aman dan sehat dapat mendatangkan keharmonisan dan ketentraman bagi kehidupan seluruh keluarga. Terjadinya keharmonisan Interaksi sosial antara sesama warga lebih disebabkan karena nilai yang mereka anut, pandangan hidup dan agama serta ras relatif sama. Hubungan sosial berlangsung antar warga desa cukup baik karena didasarkan pada rasa saling membutuhkan dan nilai-nilai agama. Setiap

ada pekerjaan yang bersifat sosial mereka kerjakan secara bersama, seperti gotong royong, kegiatan perkawinan dan upacara adat lainnya. Demikian juga kalau ada warga yang ditimpa musibah mereka bantu meringankan secara bersama, dan saling berbagi rasa, memberi pertolongan berupa tenaga dan harta benda (H. M. Zainuddin, 1961).

Warga di kedua desa ini sangat terbuka terhadap orang lain dari luar kelompoknya. Mereka sudah sejak lama berinteraksi dengan orang-orang di luar kelompok dan desanya, terutama dengan para pedagang, baik yang datang ke desa mereka ataupun mereka sendiri yang pergi ke luar desanya terutama ke ibukota kecamatan telah berlangsung sejak lama. Bentuk interaksi tersebut berlangsung melalui jual beli dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sedangkan interaksi sosial antar sesama warga melalui anjangsana, pesta perkawinan, pesta adat, acara kematian, menyambut hari-hari besar Islam, dan juga melalui jual beli. Kegiatan interaksi antara sesama warga terlihat akrab dalam kegiatan kebersamaan yang ditunjukkan oleh solidaritas yang tinggi, baik dalam upacara perkawinan lebih-lebih dalam peristiwa musibah. Karena semua anggota masyarakat memeluk agama Islam, maka hubungan antar kepercayaan atau agama berlangsung harmonis, tanpa adanya konflik. Hubungan persaudaraan semakin diperkuat oleh tali persaudaraan seiman dan seagama.

Prinsip saling menolong secara resiprositas, penghormatan kepada senior dan azas musyawarah-mufakat merupakan nilai-nilai yang mampu memfasilitasi warga desa mempertahankan keharmonisan hubungan sosial dengan baik, sehingga terbentuknya solidaritas sosial desa yang masih mengental. Warga desa berusaha menyesuaikan dirinya dengan nilai-nilai sebagaimana terlihat dalam berbagai upacara daur hidup, aktivitas pertanian, dan proses pengambilan keputusan. Adanya perbedaan penghasilan/pendapatan di antara warga desa seringkali juga menunjukkan perbedaan status sosial ekonomi di antara mereka. Meskipun dapat diamati secara spintas ada juga golongan yang dianggap mampu, golongan sedang dan golongan yang kurang mampu. Namun perbedaan ini tidak menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial, sehingga tidak pula membawa pengaruh penting terhadap keharmonisan atau keretakan dalam hubungan sosial. Antar anggota masyarakat saling menghormati, dan saling membantu.

Dalam hal perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah dianggap cukup umur untuk masa perkawinan (*baliq*), yaitu umur 14-16 tahun, maka seorang laki-laki bebas memilih jodohnya untuk kawin atau berkeluarga. Perkenalan dan hubungan muda-mudi harus melalui orang tua, tidak ada tempat khusus untuk melangsungkan hubungan muda-mudi sebelum ada ikatan yang sah. Proses peminangan atau pelamaran, ada yang langsung dilakukan pihak laki-laki melalui orang tua gadis yang bersangkutan. Ada juga melalui pertemuan para orang tua dari ke dua belah pihak. Pada umumnya masih dilakukan menggunakan jasa "*seulangke*" (penghubung). Dalam acara peminangan tersebut mahar dibawa berupa emas yang dibayar oleh orang tua calon mempelai laki-laki. Proses perni-

kahan perkawinan dilakukan secara adat yang mengacu pada hukum syari'ah Islami. Ijab kabul pernikahan dilaksanakan di depan penghulu atau *Teungku* (KUA), bersama para orang tua ke dua belah pihak, yang disaksikan oleh kaum kerabat dari kedua mampelai.

3. Kepemimpinan

Pemimpin pada komunitas kedua desa ini hanya mengenal pemimpin formal, yaitu Kepala Desa yang disebut dengan Geusyik Gampong. Seperti desa lainnya di seluruh Aceh, pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Pemilihan mengikuti mekanisme pemerintahan formal. Tahap pertama calon kepala desa ditetapkan oleh masyarakat sebanyak lima orang bakal calon. Kelima calon tersebut dikirim ke kantor camat untuk ditetapkan tiga orang calon tetap. Setelah tiga calon kepala desa ditetapkan oleh camat, kemudian turun lagi ke desa untuk selanjutnya dikirim ke kantor bupati melalui camat untuk ditetapkan sebagai calon tetap. Sebelum disahkan, kepada ketiga calon tersebut diberikan tes yang selanjutnya disahkan dan dikirim ke desa kembali untuk dipilih oleh masyarakat.

Menurut masyarakat, pemimpin yang dianggap baik adalah yang mengerti dan mau menjelaskan petunjuk pemerintah. Bagi mereka, pemimpin itu boleh dijabat oleh siapa saja, sesuai hasil pemilihan warga asalkan pemimpin tersebut mendengarkan masalah dan keluhan warganya. Pemimpin harus bertanggung jawab, bersikap demokratis, jujur dan mengutamakan kepentingan rakyatnya. Dalam kegiatan keagamaan, Imam Mesjid berfungsi sebagai pimpinan spiritual, terutama yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan.

4. Upacara Adat dan Agama

Upacara adat yang berkenaan dengan daur hidup meliputi upacara perkawinan, kematian dan kelahiran. Seperti telah dikemukakan bahwa upacara adat perkawinan berlangsung terutama di rumah pengantin wanita. Untuk memeriahkan pesta perkawinan ditampilkan berbagai kesenian lokal seperti tari ratoh, rapai geleng, barzanji dan hikayat. Dalam upacara kelahiran dilakukan aqiqah berupa penyembelihan seekor kambing, sebagai kenduri untuk memberi nama dan mencukur rambut bayi yang baru lahir. Biasanya pada hari kenduri kerabat dan famili dekat, dan penduduk desa lainnya diundang untuk menghadiri upacara. Pada saat musibah kematian semua warga tidak melakukan kegiatan sampai selesai upacara penguburan. Mereka berkumpul di rumah duka untuk melayat dan mengikuti prosesi sampai kegiatan penguburan selesai. Di rumah duka dilakukan kenduri yang intinya adalah pembacaan do'a selamat (samadiyah) pada malam hari mulai malam pertama sampai malam ketujuh, selanjutnya pada hari ke 40 dan hari ke 100.

Upacara adat misalnya ketika memulai usaha, seperti ingin turun ke sawah mereka melakukan kenduri bersama, masing-masing keluarga biasanya menyembelih ternak, paling kurang ayam untuk dimakan bersama-sama setelah membaca do'a bersama. Maksud dari upacara kenduri tersebut adalah agar memperoleh hasil yang baik semoga dijauhi dari segala gangguan dan marabahaya. Sebagai pemeluk Islam, masyarakat Adan pada umumnya juga melakukan upacara keagamaan yang selalu diperingati secara mariah, terutama pada saat memperingati hari-hari besar Islam, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, Isra' Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan upacara hari-hari besar Islam lainnya.

5. Agama dan Kepercayaan

Seperti halnya orang Islam lain di Aceh, warga di kedua desa ini melaksanakan berbagai ritual peribadatan, kajian keislaman, baik di mesjid maupun di pesantren. Pada hari Jumat dilakukan shalat Jum'at bersama di mesjid desa. Pada bulan Ramadhan mereka melaksanakan ibadah puasa. Mesjid biasanya difungsikan untuk kegiatan shalat lima waktu dengan berjamaah dan kegiatan pendidikan agama, terutama pengajian untuk anak-anak. Masyarakat di kedua desa ini juga masih percaya adanya roh halus, ada yang baik dan ada pula yang jahat. Bagi orang yang telah meninggal dunia (mati), rohnya tetap masih hidup dan kembali kepada Allah SWT, dan untuk selanjutnya akan dibangkitkan pada hari akhirat. Mereka percaya bahwa makhluk halus seperti jin dan setan. Sesuai dengan konsep Islam mereka mengaku bahwa iblis, setan dan jin ada dalam kehidupan di sekitar mereka. Mereka yakin bahwa iblis dan setan selalu mengganggu manusia untuk tidak taat kepada perintah Allah SWT. Sedangkan jin ada yang jahat, tetapi ada pula yang baik, dan jin yang baik disebut jin Islam. Musibah atau gangguan serta penyakit yang terjadi pada manusia pada dasarnya menurut warga di kedua desa ini adalah merupakan kehendak Allah SWT. Namun masih ada juga warga, terutama orang tua lanjut usia yang dikaitkan dengan kedatangan makhluk halus seperti jin dan roh-roh jahat lainnya, setan dan iblis. Dengan demikian musibah tersebut bisa terjadi karena dianggap perilaku manusia yang telah jauh menyimpang. Karena itu menurut mereka jalan yang paling baik adalah masing-masing berdo'a kepada Allah SWT sambil berikhtiar dengan berperilaku baik.

Nilai-nilai agama Islam yang mereka anut mewarnai hampir semua aspek kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terkecuali generasi muda juga menaati dan patuh terhadap ketentuan syari'at yang berlandaskan Islam. Sebagai salah satu manifestasi ketaatan mereka terhadap ritual ke-Islaman, mereka selalu membuat upacara-upacara; seperti memperingati hari-hari besar. Upacara penyembelihan hewan korban dan sampai saat ini secara rutin selalu diadakan. Pada kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW misalnya, mereka melakukan kenduri bersama dengan menyembelih hewan kerbau, kambing, ayam dan lauk-pauk lain sebagai pelengkap santapan secara bersama-sama. Tanpa adanya penyembelihan ternak/unggas, rasanya belum lengkap untuk melangsungkan kegiatan

upacara. Upacara-upacara adat dari sejak kehamilan sampai kelahiran bayi masih berlaku meskipun dilaksanakan secara sederhana.

6. Kesehatan

Secara umum kondisi lingkungan masih alami dan udara di desa relatif bersih. Dengan topografi desa yang dekat dengan hutan serta aliran sungai yang jernih maka desa ini tergolong sangat sehat sebagai tempat pemukiman. Tanggungjawab masyarakat dalam memelihara lingkungan terlihat sangat baik. Dalam pengobatan mereka cenderung berobat secara tradisional, hal ini disebabkan Puskesmas terletak di pusat kecamatan yang agak jauh dijangkau oleh masyarakat. Dalam hal kesehatan diperoleh keterangan bahwa penyakit yang sering diderita dan menimpa warga pada umumnya adalah malaria, diare, penyakit kulit dan gatal-gatal, serta penyakit mata. Sementara untuk melahirkan sebahagian besar masih memanfaatkan tenaga bidan kampung yang belum terlatih secara medis. Proses kelahirannya biasanya dilakukan di rumah sendiri, karena biaya lebih murah. Kalau berobat secara medis, obat-obatnya sulit didapat, harganya tidak terjangkau, keuangan yang terbatas, tempat tinggalnya jauh, serta pengetahuan dan pemahaman masih rendah. Hanya sebagian kecil saja di antara warga yang menggunakan tenaga medis di Puskesmas. Makanan utama yang diberikan kepada bayi yang baru dilahirkan adalah ASI dan *pisang wak* (pisang monyet). Jumlah anak yang diinginkan, pada umumnya masih menganut filosofi “banyak anak, banyak rezeki”. Hanya sebagian kecil di antara warga ada yang menginginkan jumlah anak mereka antara 2-4 orang saja. Diperoleh keterangan bahwa angka kelahiran rata-rata berkisar antara 2 sampai 3 orang bayi per-bulan, dan dapat diperkirakan mencapai antara 20-26 orang bayi per-tahun.

7. Bahasa

Bahasa yang digunakan sehari-hari oleh warga di kedua desa ini adalah bahasa Aceh, pemakaian Bahasa Indonesia terutama digunakan oleh sebagian warga yang merasa mampu atau memahaminya pada saat ada tamu yang berasal dari luar Aceh. Bahasa Indonesia dikenal warga melalui pergaulan dan pendidikan formal di sekolah.

8. Peralatan dan Pelengkapan Hidup

Rumah merupakan kebutuhan hidup yang memiliki nilai penting, selain pakaian dan perhiasan yang mereka miliki. Bentuk rumahnya sama dengan bentuk rumah yang dimiliki masyarakat Aceh pada umumnya, yaitu berbentuk panggung bersegi empat, ada yang semi permanen, ada pula yang masih berbentuk gubuk berlantaikan tanah. Sedikit sekali ditemukan rumah yang berbentuk permanen. Bahan pembuatan rumah terdiri dari papan sebagai dinding dan jendela, sedangkan atap umumnya masih daun rumbia, secara umum dapat dikatakan bahwa

bentuk rumah sangat sederhana. Dari segi kesehatan, kondisi rumah mereka belum memenuhi persyaratan kesehatan. Ada rumah/gubuk sangat kecil, tidak teratur, bahkan tidak memiliki kamar, sedangkan halamannya hampir tidak ada. Fungsi rumah bagi mereka sebagai tempat meneruskan keturunan dan tempat berkumpul keluarga batih ayah, ibu dan anak. Selain itu rumah juga berfungsi sebagai tempat berlindung dari keganasan alam dan makhluk lainnya. Rumah juga sebagai tempat berkomunikasi, hubungan interaksi antar keluarga dan kerabat, dan tempat berlangsungnya proses pendidikan dan agama, termasuk sosialisasi nilai-nilai yang berlaku bagi anggota keluarganya (Manyambeang, 1988).

Sebagaimana orang Aceh pada umumnya, pakaian mereka terbuat dari kain. Cara berpakaian sama dengan berpakaian masyarakat umumnya, yakni menutupi sebagian besar anggota tubuh sesuai dengan Syariat Islam. Sedangkan bagi kaum laki-laki tidak menggunakan perhiasan. Bagi kaum hawa, perhiasan yang dipakai ada yang menggunakan kalung, ada yang memakai cincin, dan memakai anting-anting. Bahan perhiasan umumnya terbuat dari emas (Rusdi Sufi, dkk, 2002). . Pemakaian perhiasan ini, menurut keterangan sebahagian warga tidak ada maksud untuk memamerkan kekayaan, akan tetapi sekedar perlengkapan untuk persiapan/simpanan hari tua, atau jika sewaktu-waktu diperlukan untuk berbagai kebutuhan keluarga.

Peralatan dan perlengkapan yang dimiliki masyarakat meliputi alat-alat pertanian yang ada terdiri dari cangkul, skrup, pacul, sabit dan parang, alat-alat penangkapan ikan yang dimiliki warga meliputi pancing, jala dan bubu. Sedangkan perlengkapan rumah tangga terdiri dari; lemari, meja makan, kursi tamu, dan alat masak-memasak di dapur.

E. Sistem Pengetahuan dan Pendidikan

Pengetahuan yang menonjol dalam masyarakat di kedua desa ini adalah pengetahuan di bidang pertanian. Pengetahuan pertanian dimaksud merupakan pengetahuan sederhana dalam usaha tani, bukan pengetahuan pertanian modern. Dalam bertani mereka sudah memahami dan menentukan waktu-waktu yang tepat untuk bercocok tanam serta membasmi penyakit atau hama. Pengetahuan tersebut diperoleh secara tradisi atau turun-temurun dan bukan merupakan pengetahuan modern dalam pertanian.

Kedua desa ini belum memiliki SD. Anak-anak usia sekolah bersekolah di desa tetangga. Umumnya anak-anak usia sekolah mengikuti pendidikan di lembaga ini. Meskipun demikian guru yang ditempatkan di sekolah tersebut masih sangat terbatas, sehingga proses belajar mengajar kurang berjalan lancar. Perhatian orang tua untuk pendidikan relatif cukup tinggi, hal ini ditandai dengan tingginya partisipasi orang dalam mendorong dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Namun karena kondisi ekonomi ada juga sebagian warga anaknya terpaksa harus *drop-out* dan kemudian membantu orangtua bekerja sebagai petani

F. Kebijakan Pemberdayaan

Berdasarkan hasil temuan lapangan dapat disimpulkan tentang peluang, kendala, potensi dan aspirasi atau kebutuhan komunitas setempat. Dengan memahami masalah tersebut maka selanjutnya dapat dikemukakan pula model dan kebijaksanaan pemberdayaan terhadap masyarakat setempat sebagai mana diuraikan berikut ini.

1. Potensi Pemberdayaan

Setelah dipelajari secara mendalam, potensi untuk pemberdayaan KAT Desa Bate Meutudong Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya dan Desa Alue Bilie Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Barat dapat merencanakan, pembiayaan pembangunan secara swadaya untuk pembangunan fasilitas publik dalam wilayah KAT sesuai dengan UUPA.
- b. Aliran sungai yang ada di desa tersebut cukup potensial sebagai sumber air untuk pertanian, perikanan dan juga untuk berbagai keperluan hidupnya.
- c. Lahan yang tersedia cukup potensial untuk pertanian tanaman padi tanaman hortikultura, dan perikanan darat.
- d. Rasio luas lokasi dengan jumlah penduduk yang memungkinkan pembangunan.
- e. Badan jalan untuk menuju desa sudah ada.
- f. Jaringan listrik belum tersambung sampai ke desa ini, akan tetapi baru sampai di desa tetangga.
- g. Kemampuan penduduk untuk beradaptasi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidup cukup tinggi.
- h. Desa ini sudah memiliki organisasi pemerintahan desa.
- i. Solidaritas sosial antar warga telah terjalin sejak lama.
- j. Lahan dan hutan desa tergolong hutan produksi yang cukup subur.
- k. Semangat, tekad dan kesiapan warga untuk mendapat pembinaan cukup tinggi.

2. Hambatan Pemberdayaan

Hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan KAT Desa Bate Meutudong Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya dan Desa Alue Bilie Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut :

- a. Kemampuan PAD Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Barat masih relatif rendah untuk membiayai keperluan pembangunan terutama

- infrastruktur perekonomian secara cepat
- b. Hubungan transportasi antara desa dengan kota kecamatan atau pusat pertumbuhan ekonomi kurang lancar, karena badan jalan belum layak untuk dilalui oleh kendaraan roda empat.
 - c. Pengetahuan dan teknologi produksi masih tradisional
 - d. Masih ada warga yang tidak mempunyai lahan pemukiman dan lahan produksi.
 - e. Ada warga yang masih mendiami rumah yang tidak layak huni
 - f. Tidak ada sarana kesehatan
 - g. Masalah status kepemilikan tanah di calon lokasi pemukiman.

3. Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga calon binaan dan pengamatan langsung dilapangan maka aspirasi dan kebutuhan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Desa Bate Meutudong Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya dan Desa Alue Bilie Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Masing-masing KK menginginkan lahan seluas 2 ha yang lokasinya berada di sebelah selatan desa yang berjarak lebih kurang 2 km. Apabila calon lokasi ini dibuka maka proses pemberdayaan dan pengembangan masyarakat terutama dari segi ekonomi akan cenderung meningkat, pada gilirannya dapat meningkatkan pula kesejahteraan hidup masyarakat
- b. Pembangunan rumah yang layak
- c. Modal usaha untuk menggarap lahan pertanian,
- d. Bantuan sarana produksi pertanian seperti; benih, obat-obatan dan pupuk
- e. Bimbingan penyuluhan dan latihan ketrampilan mengenai cara bercocok tanam, berkebun dan cara memelihara ikan air tawar secara teknis dan bernilai ekonomis tinggi.
- f. Bimbingan penyuluhan tentang lingkungan hidup, pemerintahan desa dan penyuluhan agama

4. Model Pemberdayaan

Berdasarkan kenyataan diatas maka model pemberdayaan yang tepat diterapkan pada kedua lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pembinaan Mikro:

1. Pembinaan berbentuk insitu sebanyak 100 unit rumah bagi mereka yang belum ada rumah atau rumah yang tidak layak huni
2. Pembangunan Balai Sosial serba guna untuk pertemuan warga dan kebutuhan sosial lainnya.
3. Memberikan bantuan dana stimulus bagi warga dalam mengembangkan potensi ekonomi yang ada.

4. Menyediakan peralatan kerja bibit, pupuk dan obat-obatan untuk pertanian
5. Melakukan pendampingan selama 3 tahun
6. Memberikan penyuluhan tentang teknologi usaha produksi, pengolahan dan pemasaran, lingkungan, pemerintahan agama dan kesehatan
7. Membangun sarana kesehatan dan melengkapi tenaga para medis/bidan desa
8. Membentuk organisasi kelompok tani.

b. Pembinaan Makro:

1. Percepatan peningkatan kualitas jalan dan jembatan untuk menghubungkan desa dengan pusat kota kecamatan.
2. Pembuatan perda yang memberi jaminan hukum untuk melindungi pemukiman dan sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat.
3. Membangun hubungan kemitraan antara warga binaan dengan berbagai instansi dan dengan lembaga kemasyarakatan.

G. Kesimpulan Dan Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas maka di bawah ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan penting.

1. Kesimpulan

- a. Semangat dan keinginan penduduk untuk memperbaiki kualitas kehidupan cukup tinggi. Kondisi ini menjadi modal utama untuk pemberdayaan KAT Desa Batee Meutudong Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya dan desa Alue Bilie Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat.
- b. Kedua desa ini sudah memiliki pranata sosial dan sudah terorganisir secara baik, terutama untuk berjalannya sistem pemerintahan desa dan berjalannya hubungan sosial serta hubungan persaudaraan antar warga yang dilandasi pada nilai-nilai keislaman yang kuat.
- c. Lahan pemukiman dan hutan desa tergolong lahan produksi yang cukup subur.
- d. Kesiapan warga untuk mendapat pembinaan cukup tinggi.

2. Rekomendasi

- a. Berdasarkan potensi yang dimiliki, baik modal fisik (*physical capital*) maupun modal sosial (*social capital*) maka masyarakat di 2 (dua) desa tersebut sangat pantas untuk mendapat pemberdayaan secara terencana dan terpadu oleh

- berbagai elemen masyarakat. Terutama oleh jajaran Departemen Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Aceh pada Tahun 2010.
- b. Lahan lokasi pembinaan KAT menurut masyarakat dan dinas terkait merupakan milik masyarakat dan bila dilihat dari segi potensi kesuburan memenuhi syarat sebagai lokasi pembinaan.
 - c. Perlu dijalin hubungan kemitraan yang lebih intensif dengan berbagai instansi terkait untuk memperoleh sinergi yang kuat dalam pemberdayaan agar diperoleh hasil yang maksimal.

Referensi

- Abdul Kadir Manyambeang, (1988). **Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan (Keuchik dan Keujruen Blang dalam Masyarakat Aceh)**. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. Pustaka Grafika Kita. Jakarta.
- Depsos RI (2003). **Pedoman Teknis Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil**, Jakarta.
- (2003). **Pedoman Kerja Petugas Lapangan (Pendamping Sosial) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil**, Jakarta.
- (2006). **Majalah Pikat (Pusat Informasi Komunitas Adat Terpencil)**, Jakarta.
- (2005). **Profil Keberhasilan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Pada 8 Provinsi**, Jakarta.
- H. M. Zainuddin, (1961). **Tarich Atjeh dan Nusantara**. Pustaka Iskandar Muda. Medan.
- Nasir Abdullah (2006). **Paradigma Baru Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil**, Majalah PIKAT (Pusat Informasi Komunitas Adat Terpencil) Depsos RI, Jakarta.
- Profil Desa Batee Meutudong Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya**
- Profil Desa Alue Bilie Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat**
Tahun 2009.
- Rusdi Sufi, dkk, (2002). **Adat Istiadat Masyarakat Aceh**, Dinas Kebudayaan Provinsi NAD.

